

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**SIKAP DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SOEHARTO
TERHADAP SOEKARNO BESERTA KELUARGANYA
1966 - 1998**

**SEBUAH TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF
HISTORIS-POLITIS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

**Yuli Hananto
NIM : 981314020**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2002**

SKRIPSI

**SIKAP DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SOEHARTO TERHADAP
SOEKARNO BESERTA KELUARGANYA 1966-1998
SEBUAH TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF HISTORIS-POLITIS**

Oleh :

Yuli Hananto

NIM : 981314020

Telah disetujui oleh :

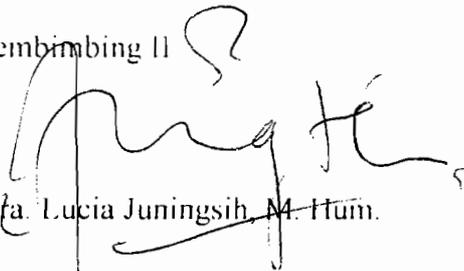
Pembimbing I



Drs. Gregory Moedjanto, M.A.

tanggal 18 November 2002

Pembimbing II



Dra. Lucia Juningsih, M. Hum.

tanggal 18 November 2002

SKRIPSI
SIKAP DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SOEHARTO TERHADAP
SOEKARNO BESERTA KELUARGANYA 1966-1998
SEBUAH TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF HISTORIS-POLITIS

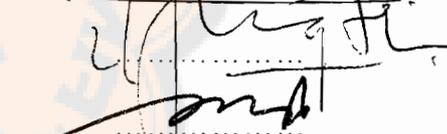
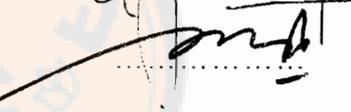
Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Yuli Hananto

NIM : 981314020

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 2 Desember 2002
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua	Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.	
Sekretaris	Drs. B Musidi, M.Pd.	
Anggota	Drs. Gregory Moedjanto, M.A.	
Anggota	Dra. Lucia Juningsih, M.Hum.	
Anggota	Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.	

Yogyakarta, 2 Desember 2002
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma





Slamet Soewandi, M.Pd.

PERSEMBAHAN



Dengan segala rasa cinta dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa skripsi ini kupersembahkan kepada:

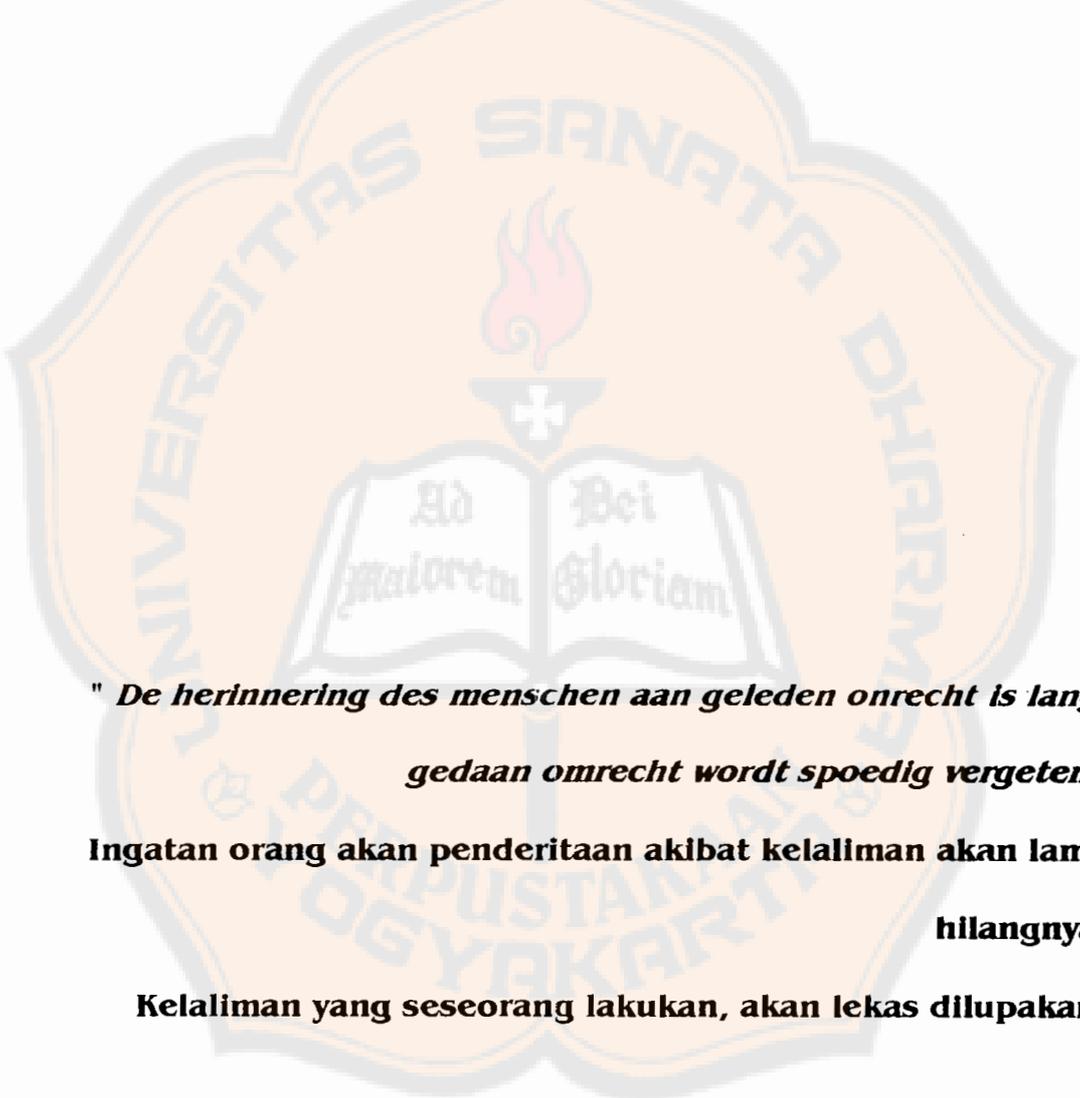
♥ Kedua orang tuaku, yang dengan segala cinta dan kasih sayangnya selalu membimbing dan mendukung secara material maupun spiritual sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.

♥ My love W. Hastuti A.W. Intan Nurullita yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan dukungan.

♥ Adikku Ratna S.T. Fajarwati yang telah memberikan dorongan dan semangat.

♥ Segenap keluarga besarku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, matur nuwun.

MOTTO



**" De herinnering des menschen aan geleden onrecht is lang;
gedaan omrecht wordt spoedig vergeten".**

**Ingatan orang akan penderitaan akibat kelaliman akan lama
hilangnya;**

Kelaliman yang seseorang lakukan, akan lekas dilupakan.

Ir. Soekarno dalam *Indonesia Menggugat*

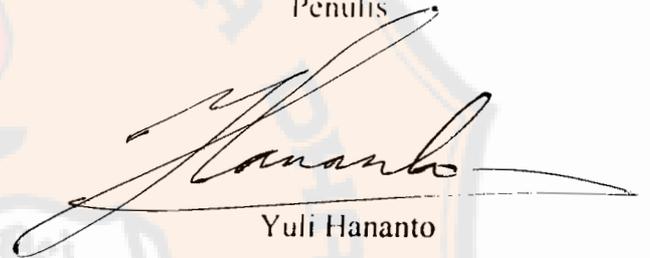
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebut dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah

Yogyakarta, 30 September 2002

Penulis



Yuli Hananto



ABSTRAK

**SIKAP DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SOEHARTO TERHADAP
SOEKARNO BESERTA KELUARGANYA 1966-1998
SEBUAH TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF HISTORIS-POLITIS
OLEH
YULI HANANTO
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menerangkan sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta keluarganya 1966-1998 sebuah tinjauan dalam perspektif historis-politis. Dalam menuju pembahasan tersebut terlebih dahulu dibahas: 1) Pandangan dan Pemikiran Politik Soekarno, 2) Pandangan dan Pikiran Politik Soeharto, 3) Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno, dan 4) Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Keluarga Soekarno.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah. Adapun sebagai langkah-langkah penulisan dalam metode sejarah tersebut mencakup; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-politis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa sikap dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta keluarganya tersebut tidak terlepas dari hal-hal yang bermuatan politis. Disatu pihak Pemerintahan Soeharto melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan penghargaannya terhadap Soekarno yang telah banyak berjasa terhadap Bangsa dan Negara Indonesia. Di pihak lain, sebaliknya Pemerintahan Soeharto melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kejelekan keburukan Soekarno maupun pemerintahannya yang dinilai telah gagal (melaksanakan revolusi). Bahkan Pemerintahan Soeharto juga melakukan tindakan-tindakan untuk menghilangkan hal-hal yang berbau Soekarno (de-Soekarnoisasi) Sikap dan kebijakan (tindakan) yang mendua tersebut tentunya dapat dipahami mengingat dengan menjelek-jelekan pimpinan dan pemerintahan sebelumnya, Pemerintahan Soeharto ingin menciptakan legitimasi untuk menopang kekuasaannya sambil mencitrakan bahwa dirinya lebih baik dibandingkan dengan pimpinan maupun pemerintahan sebelumnya.

Sementara itu Pemerintahan Soeharto juga melakukan pembatasan-pembatasan terhadap keluarga Soekarno (putra-putri Soekarno) baik dalam bidang politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Hal itu menjadi lebih penting lagi manakala tampilnya salah seorang putri Soekarno yaitu Megawati Soekarnoputri ke kursi puncak kepemimpinan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP-PDI) banyak mendapat hambatan dan tekanan. Bahkan Pemerintahan Soeharto secara terang-terangan melakukan intervensi dalam penggulingan Megawati dari kursi puncak kepemimpinan Ketua Umum DPP PDI.

ABSTRACT
THE POLITICAL WILL OF SOEHARTO GOVERNMENT TOWARD
SOEKARNO AND HIS FAMILY 1966-1998
IN THE HISTORICAL POLITICS PERSPECTIVE

by
YULI HANANTO
SANATA DHARMA UNIVERSITY YOGYAKARTA

This research aimed at finding answers for some questions about the political will of Soeharto government toward Soekarno and his family 1966-1998 in the historical-politics perspective. The main purpose of this topic is to describe 1) The political idea of Soekarno 2) The political idea of Soeharto 3) The political will of Soeharto government toward Soekarno, and 4) The political will of Soeharto government toward Soekarno's family.

The method used in this research was historical method. The way of its writing are heuristics, criticism, interpretation and historiografi.

The result of this thesis showed that the political will of Soeharto government toward Soekarno and his family was related to political tendencion. As first president of Indonesia, Soekarno had sucessfully contributed great revolution to Indonesia such as the independence of Indonesia that manifest in Proclamation in August 17 1945, development of democracy, discourses about unity. So that its condition made him become famous figure among Indonesian people. Soeharto as second president saw it as political threat. In order to support his political power, he had created bad image to Soekarno (de Soekarnoisasi). In this case Soeharto had to claim that he was more capable than Soekarno.

This political will (De Soekarnoisasi) also manifest by Soeharto to Soekarno's family. Soeharto had forbidden for all Soekarno's family to participate in the political practice. The consequences of this was Megawati Soekarnoputri, as a leadership of Indonesia Democratic Party (PDI) was difficult to growth her political aspiration. His extremely political action had showed in the intervention of Megawati's fall from leadership of Indonesia Democratic Party.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta Keluarganya Sebuah Tinjauan dalam Perspektif Historis-Politis*

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penulisan skripsi ini dapat berjalan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yang telah memberi dorongan material dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.
4. Bapak Drs. Gregory Moedjanto, M.A. selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberi bimbingan dan pengarahan dari awal sampai akhir penulisan.
5. Ibu Dra. Lucia Juningsih, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah membantu membimbing penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Antonius Kardiyat Wiharyanto, M.M. sebagai Pembimbing Akademik yang telah mendorong untuk menyelesaikan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma.
8. Karyawan Perpustakaan Museum Benteng Vredeburg.
9. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Sejarah; Bimo Setyoseno, S.Pd., Minda, Anik, Rais, S.Pd., Sr. Fr. Bertha, S.Pd, Fuca, Christina Septi, Erwin, Yulita, Br. Martinus, Sr. M. Edhita, S.Pd, Budi Santoso, Patono, Ranto E. Gudel, Dani "Sutan Sjahrir" Chandra, Agung S.B., Hervina, Adi; terima kasih atas sapaannya selama ini, dan tak lupa kepada teman seperjuangan yang masih berkuat dengan "*aktifitasnya*" Agustinus Suko "*Bludrek*" Pracoyo, dan Daniel Tebu Madukismo (**Mendjadi Mahasiswa Dengan Modal Lidah, Ludah dan Dengkul Harus Segera Diachiri !!!**).
10. Sahabat-sahabat yang selalu memberi arti kehidupanku Tri Joko B. Santoso, S.H., Antonius Susilo H. Santoso, S.E., Agustinus T.R.M. Susilo Hadi, Carolus Prasetyo, S.Pd., dan Dwi Widodo, terima kasih semuanya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segala hal yang berhubungan dengan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis. Akhirnya dengan menyadari segala kekurangan dan kelemahan, maka segala kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis



DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Kerangka Konseptual dan Pendekatan.....	19
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II PANDANGAN DAN PEMIKIRAN POLITIK SOEKARNO.....	31
A. Pandangan dan Pemikiran Politik Soekarno sebelum Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.....	31
1. Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme.....	31
2. Marhaenisme.....	39
3. Pancasila Dasar Negara Indonesia Merdeka.....	42

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Pandangan dan Pemikiran Politik Soekarno setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.....	48
1. Konsepsi Presiden tentang Demokrasi Terpimpin	49
2. Menuju Revolusi Nasional.....	52
3. Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom).....	55
BAB III PANDANGAN DAN PIKIRAN POLITIK SOEHARTO.....	57
A. Melaksanakan Demokrasi Pancasila.....	58
B. Pancasila sebagai Ideologi Nasional.....	63
C. Pancasila sebagai Satu-satunya Azas (Azas Tunggal).....	69
BAB IV SIKAP DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SOEHARTO TERHADAP SOEKARNO.....	76
A. Sikap dan Kebijakan Politik Pra-Pemerintahan Soeharto terbentuk terhadap Soekarno sehubungan dengan Pemberontakan G30S/PKI	78
B. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan terjadinya Pemberontakan G30S/PKI.....	86
C. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan Statusnya Pasca Diturunkan.....	89
D. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan Penulisan Sejarah Indonesia terutama pada masa Demokrasi Terpimpin.....	95
E. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan Sejarah Lahirnya Pancasila Dasar Negara.....	103

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V SIKAP DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SOEHARTO	
TERHADAP KELUARGA SOEKARNO	111
A. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto	
terhadap Keluarga Soekarno Secara Umum	111
B. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto	
terhadap Keluarga Soekarno Khususnya	
Megawati Soekarnoputri.....	115
1. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto	
dalam Kongres PDI di Medan	116
2. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto	
Menjelang dan Dalam Peristiwa 27 Juli 1996.....	122
BAB VI SIMPULAN	130
DAFTAR PUSTAKA	
GLOSSARY	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak peristiwa telah mewarnai perjalanan kehidupan bangsa Indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang ini. Berbagai peristiwa tersebut antara lain; Agresi Militer Belanda I dan II, perubahan bentuk negara, Pemilihan Umum I, munculnya gerakan separatis, Dekrit Presiden, penyelesaian masalah Irian Barat, Pemberontakan G30S/PKI, dan lain sebagainya. Dari berbagai peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan adanya dinamika pasang naik dan pasang surut yang telah dialami. Dengan perkataan lain di samping dari berbagai sukses nasional yang dicapai, muncul pula tragedi nasional yang melukai bangsa Indonesia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kesemuanya itu mempunyai arti penting bagi perkembangan sejarah bangsa Indonesia.

Beranjak dari sukses nasional dan tragedi nasional itu, tentunya salah satu dari peristiwa yang merupakan tragedi nasional adalah meletusnya Pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) yang terjadi pada tahun 1965. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemberontakan itu membawa akibat kesulitan di berbagai bidang kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Bahkan pemberontakan tersebut membawa bangsa Indonesia ke dalam suasana yang penuh kekacauan.

Sementara itu, pada tanggal 10 Januari 1966 di Jakarta terjadi gelombang aksi demonstrasi massal. Aksi demonstrasi itu berlangsung lebih kurang 60 hari dan pada intinya mereka menuntut pembubaran PKI. Dengan dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), aksi demonstrasi yang kemudian tergabung dalam Front Pancasila memenuhi halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Mereka mengemukakan tuntutan yang kemudian dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA)¹ yang isinya meliputi:

1. Bubarkan PKI !
2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI (*Retooling* Kabinet Dwikora)!
3. Turunkan harga barang-barang kebutuhan pokok !

Kendati demikian, Presiden Soekarno dalam pandangan itu tetap bersikeras pada pendiriannya yaitu tidak mau membubarkan PKI. Bahkan oknum-oknum PKI yang terlibat dalam Pemberontakan G30S masih dapat berlindung di bawah kekuasaan dan kewibawaan Presiden Soekarno. Sementara itu para pembantu presiden seperti Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Subandrio menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa dengan sikap keras. Sikap itu diwujudkan dalam rencananya untuk mengadakan tindakan balasan dengan membentuk Barisan Soekarno yang terdiri dari para buruh tani terutama para pemuda. Akan tetapi sayang sekali, pembentukan Barisan Soekarno tidak mendapat dukungan rakyat dan pimpinan-pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), khususnya Angkatan Darat (AD)

¹ G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20, Jilid II*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hal. 145

Dalam suasana seperti itulah Presiden Soekarno bukannya me-*retool* Kabinet Dwikora, namun justru me-*reshuffle* kabinet tersebut sehingga kabinet itu disebut Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan (Kabinet Seratus Menteri). Kabinet ini ternyata memperbesar kekecewaan rakyat terhadap Presiden Soekarno karena memasukkan tokoh-tokoh yang diduga mendukung PKI. Bahkan Jenderal A.H. Nasution yang secara jelas anti komunis dan merupakan figur terhormat serta telah menjadi korban dalam peristiwa Pemberontakan G30S, disingkirkan dari kabinet.

Sikap Presiden Soekarno tersebut justru semakin menyulut kemarahan rakyat dan mahasiswa. Disatu pihak pada tanggal 24 Februari 1966, para demonstran menghalangi upacara pelantikan menteri-menteri baru dengan memblokade jalan-jalan. Namun, di pihak lain tindakan itu ternyata menimbulkan kemarahan besar pada diri Presiden Soekarno. Hal ini tercermin dari tindakan presiden yang membubarkan KAMI dan menutup Universitas Indonesia (UI).²

Pembubaran KAMI ternyata tidak memulihkan kewibawaan Presiden Soekarno dan tidak menghalangi aksi-aksi Tritura. Mahasiswa bersama-sama rakyat tetap melanjutkan perjuangannya. Kali ini bersama-sama dengan para pelajar yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) kemudian membentuk Laskar Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kali ini pula aksi-aksi tersebut mendapat perlindungan dari Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kodam Jaya) Bigadir Jenderal Amir Machmud.

² H.A Haris Nasution, *Dari Kup 1 Oktober 1965 ke Sidang Istimewa MPRS 1967*, Jakarta, tanpa penerbit, 1975, hal. 40; Bandingkan dengan O.G. Roeder, *Soeharto Dari Pradjurit Sampai Presiden*, Jakarta, Gunung Agung, 1976, hal. 47-48.

Krisis yang semakin memuncak itu akhirnya memaksa Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 1966 kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk atas nama presiden, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan untuk keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.³

Dengan tindakan itu pada hakekatnya Presiden Soekarno telah kehilangan sebagian besar kekuasaan yang dimiliki yang kemudian jatuh ke tangan Letnan Jenderal Soeharto. Hal itu memang dapat dimengerti karena sehari kemudian yaitu pada tanggal 12 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No.1/3/1966 yang isinya menyatakan tentang pembubaran PKI di seluruh wilayah Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No.5/3/1966 tertanggal 18 Maret 1966, sekali lagi atas nama Presiden Soekarno, Letnan Jenderal Soeharto melakukan penangkapan terhadap 15 orang menteri

³ Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hal. 138-139.

yang disangsikan iktikad baiknya.⁴

Dengan tindakan-tindakan tersebut, maka rakyat terutama kesatuan aksi-kesatuan aksi (KAMI/KAPPI) merasa lega karena sebagian dari tuntutan mereka telah dilaksanakan. Sehubungan dengan banyaknya menteri yang ditangkap dan demi penghematan serta efisiensi kerja maka disusunlah kabinet baru oleh Soekarno yang diberi nama Kabinet Dwikora Yang Lebih Disempurnakan Lagi. Adapun beberapa tokoh utama dalam kabinet ini ialah Jenderal Soeharto, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Adam Malik.⁵ Meskipun dapat dipahami bahwa kabinet ini belum memuaskan berbagai pihak terutama KAMI/KAPPI namun akhirnya diterima juga karena kepercayaan mereka kepada Jenderal Soeharto.

Meskipun demikian Jenderal Soeharto menginginkan supaya langkah-langkah politik berikutnya mendapat landasan yang konstitusional.⁶ Dengan perkataan lain, bahwa ia lebih menekankan pentingnya menjunjung tinggi kehidupan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Oleh karena itu, sebagai langkah selanjutnya pada tanggal 20

⁴ Kelima belas Menteri tersebut antara lain: 1. Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Luar Negeri, 2. Dr. Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III, 3. Ir. Setyadi Reksoprodjo, Menteri Tenaga Listrik, 4. Sumardjo, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, 5. Oey Tjoe Tat, S.H., Menteri Negara Diperbantukan pada Presidium Kabinet, 6. Ir. Surachman, Menteri Irigasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, 7. Jusuf Muda Dalam, Menteri Bank Sentral dan Gubernur Bank Negara, 8. Armunanto, Menteri Pertambangan, 9. Sutomo Marto Pradopo, Menteri Perburuhan, 10. Astrawinata, S.H., Menteri Kehakiman, 11. Mayor Jenderal Achmadi, Menteri Penerangan, 12. Letnan Kolonel Imam Sjafei, Menteri Diperbantukan Pada Presidium Kabinet Urusan Keamanan, 13. J. Tumakaka, Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional, 14. Drs. M. Achmadi, Menteri Transmigrasi dan Koperasi, dan 15. Major Djenderal Dr. Sumarno Sastroatmodjo, Menteri Dalam Negeri/Gubernur Djakarta Raya Dikutip dari O.G. Roeder, *op.cit.*, hal. 51.

⁵ G. Moedjanto, *op.cit.*, hal. 147

⁶ O.G. Roeder, *op.cit.*, hal. 53

Juni 1966, MPRS menyelenggarakan Sidang Umum Ke IV di Jakarta. Sidang tersebut merupakan tumpuan harapan rakyat yang sejak lama mendambakan terlaksananya perubahan-perubahan dari kepemimpinan Orde Lama⁷ kepada tatanan baru yang dapat memenuhi keinginan rakyat, bersendikan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.

Sidang yang diharapkan akan melahirkan landasan-landasan baru bagi kelanjutan kehidupan bangsa dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan konstitusional, memperbaiki haluan politik dan ekonomi, menjadi lebih penting lagi karena dalam sidang tersebut Presiden Soekarno memberikan pertanggungjawaban politiknya mengenai terjadinya Pemberontakan G30S/PKI. Sidang itu berlangsung dalam keadaan dan suasana yang amat serius serta dengan pengamanan yang ekstra ketat. Terasa betapa gentingnya suasana politik-militer waktu itu yang disebabkan oleh adanya demonstrasi-demonstrasi yang setiap hari menuju ke gedung MPRS, di samping adanya pro dan kontra dalam partai-partai politik dan ABRI terhadap Presiden Soekarno.⁸

Dalam Sidang Umum ke IV MPRS Presiden Soekarno memberikan pidato pertanggungjawaban mengenai kebijaksanaan Presiden/Mandataris MPRS dalam Pemberontakan G30S/PKI beserta *epilognya*. Selain itu Presiden Soekarno juga diminta untuk melengkapi laporan pertanggungjawabannya mengenai masalah kemunduran ekonomi dan kemerosotan moral. Keseluruhan pidato

⁷ Orde Lama adalah suatu periode pemerintahan yang mana pada masa itu Presiden Soekarno mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Dalam periode tersebut juga disebut sebagai periode Demokrasi Terpimpin. Pemerintahan Soekarno pada masa itu berlangsung antara tahun 1959-1966.

⁸ H.A. Haris Nasution, *op.cit.*, hal. 49.

Presiden/Mandataris MPRS yang disampaikan kepada MPRS RI pada tanggal 22 Juni 1966 diberi judul *Nawaksara* (sembilan pokok uraian).

Akan tetapi karena isi pidato itu kurang memenuhi harapan rakyat pada umumnya dan anggota-anggota MPRS pada khususnya, karena tidak memuat secara jelas pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan Presiden/Mandataris MPRS mengenai peristiwa Pemberontakan G30S/PKI beserta *epilognya* maka, pidato tersebut dinyatakan belum dapat diterima. Oleh karena itu MPRS meminta kepada Presiden Soekarno untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban kepada MPRS khususnya mengenai hal tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya MPRS mengeluarkan Keputusan No.V/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Presiden Soekarno supaya melengkapi pidato *Nawaksaranya*. Nota permintaan MPRS tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden Soekarno pada tanggal 22 Oktober 1966, dengan harapan presiden akan segera melengkapi pidato pertanggungjawabannya seperti yang telah diucapkan di depan Sidang Umum MPRS yang lalu.⁹ Selain itu MPRS juga memutuskan untuk memberi tugas kepada Jenderal Soeharto supaya membentuk kabinet baru yang menggantikan Kabinet Dwikora Yang Lebih Disempurnakan Lagi (selambat-lambatnya sampai tanggal 17 Agustus 1966) dan menciptakan stabilitas politik-ekonomi nasional. Kabinet itulah yang kemudian dikenal dengan nama Kabinet Ampera.

Meskipun Kabinet Ampera telah bekerja keras untuk menciptakan

⁹ Radik Utoyo Sudirjo dkk, *Fajar Orde Baru Lahirnya Orde Baru*, Jakarta, Yayasan Kesejahteraan Jayakarta-Kodam V Jaya Badan Penerbit Almanak RI/BP ALDA, 1979, hal. 69.

stabilitas politik dan ekonomi, namun Presiden Soekarno tidak membantu ke arah pemulihan tersebut. Harapan rakyat bahwa Presiden Soekarno akan membantu membangun tatanan baru dengan kewibawaannya ternyata meleset. Bahkan kesempatan yang diberikan oleh MPRS kepada Presiden Soekarno untuk melengkapi pidato *Nawaksaranya* tidak segera dilakukan. Sementara pidato kenegaraannya yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1966 yang diberi judul "*Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah*" (*Jas Merah*) justru semakin memperuncing keadaan.¹⁰ Berbagai sikap dan pidato Presiden Soekarno ternyata tidak sejalan dengan keputusan-keputusan dalam Sidang Umum MPRS.

Sementara itu rakyat dan mahasiswa semakin gencar menuntut supaya MPRS bersidang lagi untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno sesuai dengan keputusan No V/MPRS/1966. Tuntutan itu juga didukung oleh fakta-fakta dalam Persidangan Pengadilan terhadap Jusuf Muda Dalam, Subandrio, dan Laksamana Omar Dhani yang menunjukkan adanya keterlibatan Presiden Soekarno dalam peristiwa itu.¹¹ Oleh karena Presiden Soekarno tidak segera memenuhi keputusan MPRS, maka pada tanggal 6 Desember 1966, ABRI mengeluarkan pernyataan sikap yang isinya menyatakan bahwa ABRI akan bertindak tegas terhadap siapapun yang tidak mau melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Umum MPRS.¹²

Pada tanggal 10 Januari 1967, akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan juga pelengkap pidato *Nawaksaranya*. Pidato itu disampaikan oleh Sekretaris

¹⁰ H.A. Haris Nasution, *op.cit.*, hal. 53.

¹¹ Periksa O.G. Roeder, *op.cit.*, hal. 71; Bandingkan dengan Radik Utoyo Sudirjo dkk, *op.cit.*, hal. 74.

¹² *Ibid*, hal. 89.

Militer Presiden Soekarno kepada MPRS. Pidato pelengkap *Nawaksara* Presiden Soekarno ini mendapat tanggapan luas dari partai-partai politik, organisasi masyarakat, dan segenap kalangan masyarakat. Pidato pelengkap tersebut diberi judul "*Pelengkap Nawaksara*" (*Pelnawaksara*). Akan tetapi karena isinya lebih merupakan pengelakkan tanggung jawab daripada pertanggungjawaban maka MPRS menolak pidato tersebut.

Sementara itu pada tanggal 3 Februari 1967 Sidang Paripurna DPR GR telah mengajukan memorandum dan resolusi yang merupakan reaksi dari ketidakpuasan umum terhadap pidato Pelengkap *Nawaksara* yang disampaikan oleh Presiden Soekarno.¹³ Pada intinya DPR GR meminta kepada MPRS supaya segera menyelenggarakan Sidang Istimewa selambat-lambatnya bulan Maret 1967 dan meminta Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib)/Pengembangan Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 untuk memberi keterangan tentang hubungan Presiden Soekarno dengan peristiwa G30S/PKI.

Menyadari akan situasi yang membahayakan kedudukannya, maka Presiden Soekarno pada tanggal 20 Februari 1967 menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto untuk melegakan rakyat.¹⁴ Meskipun demikian jalur konstitusional yaitu melalui Sidang Istimewa MPRS tetap ditempuh sebagaimana yang telah direncanakan. Akhirnya pada tanggal 7 Maret 1967 berlangsunglah Sidang Istimewa MPRS. Dalam sidang tersebut

¹³ Adapun isi dari memorandum itu lihat Team Dokumentasi Presiden Republik Indonesia, *Jejak Langkah Pak Harto 1965-27 Maret 1968*, Jakarta, PT Citra Lanitoto Gung Persada, 1991, hal. 156.

¹⁴ G. Moedjanto, *op.cit.*, hal. 149; Bandingkan dengan O.G. Roeder, *op.cit.*, hal. 76.

dikeluarkanlah Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan selanjutnya mengangkat pemegang Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum yang akan datang.¹⁵ Dengan demikian selaku Pejabat Presiden, Jenderal Soeharto kemudian melaksanakan pengamanan terhadap Ketetapan No.XXXIII/MPRS/1967.

Beranjak dari pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden tersebut, maka Indonesia memasuki tahapan baru dalam proses perkembangannya. Mulai sejak saat itulah pada kesempatan ini akan diteliti tentang *Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta Keluarganya 1966-1998 Sebuah Tinjauan dalam Perspektif Historis-Politis*. Hal ini terdorong oleh keinginan untuk mengungkap beberapa bagian Sejarah Indonesia yang terasa *kontroversial* yang pada masa Pemerintahan Soeharto *tabu* untuk dikaji. Dengan perkataan lain dalam kondisi politik pada saat itu memang tidak memungkinkan untuk mengungkapkan pemikiran yang tidak sejalan dengan sikap yang formal.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pada masa Pemerintahan Soeharto sejarah dikendalikan sedemikian rupa demi kepentingan penguasa (kekuasaan). Sejarah digunakan sebagai sarana untuk membangun, melegitimasi, dan melanggengkan kekuasaan. Pengendalian sejarah pada masa Pemerintahan Soeharto disatu pihak banyak mereduksi peran Soekarno, sementara di pihak lain peran Soeharto banyak dibesar-besarkan dalam sejarah. Sejalan dengan tindakan

¹⁵ Lihat Team Dokumentasi Presiden Republik Indonesia, *op.cit.*, hal. 303-309.

tersebut bagaimanakah sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan penulisan Sejarah Indonesia terutama sekitar peristiwa Pemberontakan G30S/PKI. Sejauh mana keterlibatan Soekarno dalam peristiwa tersebut. Selain itu bagaimana status Soekarno pasca ia diturunkan dari kekuasaannya, nasib dan keberadaannya serta adakah kepastian tentang keberadaan Soekarno disisa-sisa hidupnya?

Sehubungan dengan alasan itu masih ada beberapa alasan lain tentang pentingnya topik itu dikaji. Pertama, belum ada penelitian yang mengkaji tentang sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta keluarganya 1966-1998 sebuah tinjauan dalam perspektif historis-politis secara khusus. Dengan tinjauan tersebut maka diharapkan akan diketahui bagaimana sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan penulisan Sejarah Indonesia terutama pada masa Demokrasi Terpimpin. Dalam Pemerintahan Soeharto masa Demokrasi Terpimpin selalu dikatakan sarat dengan penyelewengan dan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 disatu pihak. Di pihak lain apakah memang benar bahwa dalam masa Demokrasi Terpimpin terjadi penyelewengan dan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, ataukah justru anggapan tersebut merupakan strategi politik untuk mempopuleritaskan kekuasaannya.

Kedua, berbicara mengenai figur Soekarno sama halnya berbicara perihal tokoh besar Indonesia dengan segala kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Terlepas dari kelebihan dan kelemahan yang dimiliki itu, namun satu kenyataan yang tak dapat dibantah bahwa Soekarno adalah seorang pemikir. Sehubungan

dengan hal tersebut bagaimanakah sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap pemikiran politik dan ajaran politik Soekarno. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam pidato Soekarno di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengemukakan rumusan (konsepsi) tentang Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia telah dipersoalkan. Hal ini dapat dilihat dalam buku *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara* yang ditulis oleh Nugroho Notokusanto yang salah satu alineanya menyatakan:

"Kalau ada orang yang menyatakan, bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahir Pancasila, maka kita harus menanyakan terlebih dulu: *Pancasila yang mana?* Kalau jawabannya adalah Pancasila Bung Karno, maka hal itu dapat dibenarkan. Tetapi jika yang dimaksud dengan Pancasila adalah Pancasila Dasar Negara yang sah dan autentik (sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), maka hal itu *tidak* benar. Karena Pancasila Dasar Negara itu *tidak hanya* bersumber kepada Pancasila Bung Karno 1 Juni 1945, melainkan juga bersumber kepada konsepsi-konsepsi lain."¹⁶

Ketiga, penelitian ini sengaja menyertakan keluarga Soekarno dalam pembahasannya karena dalam Pemerintahan Soeharto mereka kurang mendapat kesempatan terutama dalam gelanggang politik. Di samping adanya tuduhan bahwa mereka dianggap akan membangkitkan kembali ajaran-ajaran Soekarno (Soekarnoisme) juga mereka dikhawatirkan akan meneruskan cita-cita dan perjuangan dari ayahnya itu. Hal ini tercermin dari kemunculan salah seorang putri Soekarno yaitu Megawati Soekarnoputri dalam kancah politik yang selalu mendapat persoalan, tekanan, dan banyak sekali usaha-usaha untuk

¹⁶ Nugroho Notokusanto, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1981, hal. 27.

menjatuhkannya. Bahkan secara terang-terangan usaha-usaha itu didukung oleh pemerintah dan ABRI.

Keempat, dalam penelitian ini diambil batasan waktu antara tahun 1966-1998, dengan alasan karena pada tahun 1966 adalah awal dari munculnya Pemerintahan Soeharto atau yang sering disebut sebagai awal dari lahirnya Pemerintahan Orde Baru, walaupun hal itu secara resmi baru akan disahkan dalam Sidang MPRS satu tahun kemudian. Penentuan akhir batasan waktu 1998 karena pada tahun itu merupakan akhir dari kekuasaan Pemerintahan Soeharto. Setelah berkuasa selama lebih dari lima periode, akhirnya Soeharto tidak dapat lagi mempertahankan kekuasaannya. Dengan tumbangya Pemerintahan Soeharto maka berakhirilah kiprah Orde Baru yang selama 32 tahun mewarnai dinamika perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah pandangan dan pemikiran politik Soekarno?
2. Apa sajakah pandangan dan pikiran politik Soeharto?
3. Bagaimana sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno?
4. Bagaimana sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap keluarga Soekarno?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno dan keluarganya 1966-1998 sebuah tinjauan dalam perpektif *historis-politis*.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menjelaskan tentang pandangan dan pemikiran politik yang dikemukakan oleh Soekarno.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan dan pikiran politik Soeharto.
- c. Untuk menjelaskan sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno.
- d. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap keluarga Soekarno.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penulisan skripsi yang berjudul Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta Keluarganya 1966-1998 Sebuah Tinjauan dalam Perspektif Historis-Politis ini akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Penulisan ini bermanfaat bagi pendidikan sejarah yaitu untuk menunjukkan sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta keiuarga

yang dapat menjadi bekal bagi guru dalam menggambarkan dua tokoh tersebut secara proporsional.

2. Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sejarah yaitu untuk memperkaya wawasan tentang Pemerintahan Soeharto terutama mengenai sikap dan kebijakannya terhadap Soekarno dan keluarganya.
3. Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sejarah yaitu untuk meluruskan penulisan sejarah yang selama ini masih banyak dibelokan untuk kepentingan politik penguasa.
4. Penulisan ini bermanfaat bagi generasi muda yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan sejarah pada khususnya dan ilmu pengetahuan sosial pada umumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji tentang Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta Keluarganya 1966-1998 Sebuah Tinjauan dalam Perspektif Historis-Politis. Dalam membahas topik di atas, digunakan buku-buku, majalah, dan surat kabar. Adapun mengenai sumbernya terdapat dua jenis yaitu: sumber primer dan sumber sekunder.

Beberapa sumber primer antara lain:

Pertama, *Dibawah Bendera Revolusi*, merupakan kumpulan karangan (artikel) yang ditulis oleh Soekarno, dan diterbitkan oleh Panitia Penerbit *Bendera* Dibawah Revolusi, Jakarta, 1964. Buku ini sangat penting untuk digunakan dalam penelitian ini karena isinya merupakan kumpulan dari pandangan dan pemikiran

politik Soekarno terutama pada masa revolusi perjuangan. Pada intinya buku ini berisi pandangan dan pemikiran politik Soekarno dalam rangka merealisasikan cita-citanya yaitu untuk mempersatukan Bangsa Indonesia dan mewujudkan Kemerdekaan Indonesia.

Kedua, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, merupakan buku yang berisi kumpulan kursus tentang Pancasila di Istana Negara dan Kuliah Umum Pada Seminar Pancasila di Yogyakarta serta Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945 yang dikemukakan oleh Soekarno. Buku ini diterbitkan atas kerjasama Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, Jakarta, 1984. Buku ini sangat bermanfaat untuk membahas tentang pandangan dan pemikiran Soekarno terutama tentang rumusan Pancasila.

Ketiga, *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, Otobiografi Soeharto seperti yang dituturkan kepada G. Dwipayana, dan Ramadhan K.H., diterbitkan oleh PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1989. Buku ini adalah sumber yang sangat penting karena isinya merupakan otobiografi dari Soeharto. Dalam buku ini diuraikan tentang perjuangan dan karier politik-militer Soeharto sejak dari masa muda sampai menjadi Presiden RI dan memegang jabatan itu hingga beberapa ^{kali} periode.

Beberapa sumber sekunder antara lain:

Pertama, *Soekarno Sebuah Biografi Politik*, karangan John D. Legge, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, tahun 1985, merupakan buku yang berisi tentang biografi politik Soekarno semenjak masa kanak-kanak sampai dengan jatuhnya ia dari kursi kekuasaan. Dalam buku ini banyak mengupas tentang perjuangan dan

karier politik Soekarno. Selain itu dalam buku ini juga mengupas tentang pandangan dan pemikiran politik Soekarno dalam rangka mencapai kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan. Buku ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk menjawab permasalahan tentang pandangan dan pemikiran politik Soekarno.

Kedua, *Jejak Langkah Pak Harto*, disusun oleh Team Dokumentasi Presiden RI, diterbitkan oleh PT. Citra Lamtoro Gung Persada, tahun 1991. Buku ini adalah sumber yang lengkap karena terdapat beberapa jilid. Buku ini penting digunakan karena di dalamnya menjelaskan tentang pandangan dan pikiran politik Soeharto dan pemerintahannya. Selain itu buku ini juga berisi tentang sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto dalam berbagai hal. Buku ini bermanfaat untuk mengkaji tentang pandangan dan pikiran politik Pemerintahan Soeharto.

Ketiga, *Soeharto, Dari Pradjurit Sampai Presiden*, ditulis oleh O.G Roeder, yang diterbitkan oleh Gunung Agung, Djakarta, 1969. Buku ini penting untuk dipakai karena di dalamnya menguraikan tentang latar belakang lahirnya Pemerintahan Soeharto sampai dengan ia diangkat menjadi presiden penuh. Selain itu buku ini juga menjelaskan berbagai sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno.

Keempat, *Pak Harto Pandangan dan Harapannya*, karya Abdul Gafur, diterbitkan oleh Pustaka Kartini, Jakarta, 1987. Dalam buku ini dibahas tentang pandangan dan pikiran politik Presiden Soeharto. Selain itu buku ini juga memuat tentang perkembangan sejarah politik dan demokrasi di Indonesia yang di dalamnya menguraikan pula tentang Demokrasi Terpimpin. Walaupun buku ini sangat dominan memuat peran Soeharto dalam segala hal, namun buku ini sangat

dibutuhkan untuk menjelaskan berbagai permasalahan yang akan dikaji terutama pandangan dan pikiran Soeharto.

Kelima, *Kehormatan Bagi Yang Berhak*, karya Manai Sophiaan, diterbitkan oleh Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Jakarta, 1994. Buku ini sangat bermanfaat dalam penelitian ini karena isinya mengungkapkan bagian-bagian sejarah yang sangat penting untuk di ketahui. Buku ini sangat diperlukan untuk mengkaji sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan terjadinya Pemberontakan G30S/PKI.

Keenam, *Meluruskan Sejarah*, karya B.M. Diah, diterbitkan oleh Pustaka Merdeka, Jakarta, 1987. Buku ini berisi tentang berbagai uraian yang intinya menuntut supaya penulis sejarah mampu bersikap kritis, dan obyektif dalam menyajikan tulisannya. Selain itu dalam buku ini mengandung pesan agar masyarakat mau mengembangkan sikap peka atau kritis dan lebih berhati-hati dalam membaca karya-karya sejarah yang muncul dari waktu ke waktu. Buku ini sangat bermanfaat untuk menjelaskan tentang sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan penulisan Sejarah Indonesia terutama pada masa Demokrasi Terpimpin.

Ketujuh, *Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993-1996*, karya Ahmad Bahar, Penerbit Pena Cendekia, Yogyakarta, 1996. Buku ini mengupas tentang riwayat hidup dan perjuangan politik Megawati. Selain itu buku ini juga mengulas tentang karier dan perjuangan politik Megawati yang mana hal itu banyak mengalami persoalan dan hambatan serta berbagai usaha untuk menjatuhkannya, yang ternyata usaha tersebut mendapat dukungan dari pihak

pemerintah dan militer. Buku ini sangat penting untuk mengkaji persoalan tentang sikap dan kebijakan politik Pemerintahan Soeharto terhadap keluarga Soekarno dalam hal ini adalah Megawati.

F. Kerangka Konseptual dan Pendekatan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta Keluarganya 1966-1998 Sebuah Tinjauan dalam Perspektif Historis-Politis, terlebih dahulu dijelaskan beberapa konsep yang akan digunakan sebagai kerangka berpikir. Konsep-konsep tersebut antara lain adalah; sikap, kebijakan, politik, dan Pemerintahan Soeharto.

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, sikap diartikan sebagai pendirian yang mendasari suatu tindakan baik perseorangan maupun sekelompok orang. Selain itu sikap juga didefinisikan sebagai pendirian yang didasarkan atas pandangan hidup.¹⁷ Kebijakan diartikan sebagai keputusan atau tindakan dari suatu organisasi maupun institusi.¹⁸ Istilah sikap dan kebijakan pada dasarnya merupakan pengertian yang sangat erat kaitannya. Sikap adalah pendirian atau pernyataan, sedangkan kebijakan merupakan wujud konkrit atau merupakan realisasi dari sikap. Kebijakan lebih berbentuk sebagai keputusan atau tindakan baik dari organisasi maupun institusi.

Sejalan dengan pengertian tersebut untuk mengetahui sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta keluarganya, mula-mula harus

¹⁷ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal. 1319.

¹⁸ *Ibid*, hal. 182-183.

dipahami terlebih dahulu perilaku dari Soeharto itu sendiri, maupun tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pemerintahannya. Mereka merupakan pelaku-pelaku sentral yang menentukan sikap dan kebijakan pemerintah tersebut. Orientasi yang tepat untuk memahami perilaku Soeharto beserta tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pemerintahannya itu adalah dengan mengetahui dan memahami situasi yang berkembang ^{pada} saat itu. Dengan perkataan lain situasi yang berkembang saat itu akan mempengaruhi sikap dan kebijakan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang mengenai cara bertindak satu sama lain.

Pemahaman perilaku terhadap aktor maupun sekelompok orang akan sangat efektif untuk dipergunakan sebagai pisau analisa. Dengan memahami perilaku melalui pendekatan perilaku (*Behavioral Approach*) maka akan terungkap faktor-faktor *sosio-psikologis* dan *psiko-historis* dari aktor dan sekelompok orang tersebut. Ungkapan itu berupa pengalaman kolektif dimasa lalu yang mempengaruhi aktor atau sekelompok orang dalam menginterpretasikan situasi yang berkembang sampai pada proses perumusan tindakan.¹⁹

Adapun faktor-faktor yang membentuk pemikiran, sikap, maupun kebijakan (tindakan) politik Pemerintahan Soeharto adalah bahwa mereka ingin segera menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Oleh karena itu maka Pemerintahan Soeharto harus melakukan pengamanan terhadap pimpinan rezim lama (Soekarno) sekaligus mengikis habis sisa-sisa maupun unsur-unsur yang menopang pemerintahan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk membangun dan

¹⁹ Robert F. Berkhofer, Jr., *A Behavioral Approach to Historical Analysis*, New York, The Free Press, 1969, hal.68-69.

meningkatkan kekuasaannya menuju tercapainya pemerintahan yang kokoh.

Kondisi politik yang buruk yang telah diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Soeharto, mendorong pemerintahan tersebut berusaha untuk mengatasinya. Dengan perkataan lain Pemerintahan Soeharto berusaha untuk segera menciptakan stabilitas terutama dalam bidang politik.²⁰ Langkah-langkah yang ditempuh antara lain adalah mengembalikan format politik luar negeri Indonesia yang selama pemerintahan sebelumnya mengalami penyimpangan. Indonesia harus kembali ke politik luar negeri yang bebas dan aktif. Pemerintahan Soeharto juga melakukan penghentian terhadap *Konfrontasi Ganyang Malaysia* yang dulu pernah diserukan oleh Soekarno.²¹ Selain itu untuk menghindari supaya Indonesia tidak dikucilkan oleh dunia internasional maka sejak tanggal 28 September 1966 Indonesia aktif kembali dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini merupakan sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap pemerintahan sebelumnya yang sejak awal Januari 1965 menyatakan keluar dari forum internasional tersebut.

Sebagaimana telah disebut di atas bahwa Pemerintahan Soeharto juga melakukan tindakan-tindakan politik terhadap Soekarno. Pada tanggal 6 Mei 1967 Pejabat Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan No.62/5/1967 perihal perlakuan selanjutnya terhadap Soekarno. Keputusan itu berisi tentang larangan terhadap Soekarno untuk menggunakan gelar sebagai Kepala Negara Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata atau Panglima

²⁰ G. Moedjanto, *op.cit.*, hal. 151.

²¹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Terj), Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1995, hal. 414; Periksa pula G. Moedjanto *op.cit.*, hal. 119 dan 149.

Besar Komando Tertinggi (KOTI). Bahkan Soekarno juga tidak diijinkan untuk menggunakan bendera kepresidenan.²²

Dalam perkembangan selanjutnya, Soekarno yang telah dicabut semua hak politiknya ia kemudian dikenakan "karantina politik".²³ Status ini secara resmi diumumkan pada awal tahun 1968, beberapa bulan setelah ia tidak berkuasa. Mulai sejak saat itulah Soekarno harus tinggal di Pavilyun Istana Bogor.²⁴ Selanjutnya pada permulaan tahun 1969 Soekarno dipindahkan ke tempat karantina lain yaitu di Wisma Yaso. Di tempat itulah Soekarno dirawat oleh Team Dokter yang diketuai oleh Prof. Dr. Mahar Mardjono dan di tempat itu pula dia berstatus sebagai tahanan politik serta berada dalam pemeriksaan Kopkamtib sampai ia meninggal pada 21 Juni 1970.²⁵

Konsep politik terdapat bermacam-macam definisi. Secara umum politik diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem atau institusi politik (negara) yang berhubungan dengan proses menentukan tujuan dari sistem itu serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.²⁶ Dalam pengertian lain Ramlan Surbakti mendefinisikan politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.²⁷

²² O.G. Roeder, *op.cit.*, hal. 191.

²³ Hardi, *Api Nasionalisme Percikan Pengalaman*, Jakarta, PT Gunung Agung, 1983, hal. 188.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Periksa Soeharto, G. Dwipayana, dan Ramadhan K.H., *Soeharto: Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya Otobiografi*, Jakarta, PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, hal. 245; Selanjutnya Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973*, Jakarta, PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1986, hal. 212.

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1993, hal. 8.

²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, hal.2.

Dalam pandangannya tentang politik, Riswanda Imawan mengemukakan definisi politik sebagai *steering manipulating human behavior*. Artinya bahwa politik mengendalikan dan memanipulasi tingkah laku manusia.²⁸ Dengan perkataan lain politik mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu demi keuntungannya, tanpa orang tersebut merasa terpaksa melakukannya. Berdasarkan konteks inilah kita meragukan adanya kejujuran dalam politik. Politik sering diartikan sebagai arena atau gelanggang untuk bermain kotor.

Tidak dapat disanggah bahwa berpolitik berarti mencari, merebut, mempertahankan maupun membangun kekuasaan. Dalam rangka hal-hal tersebut orang harus berjuang dengan keras, licik, tipu muslihat, benar dianggap salah dan salah dibenarkan lawan dipukul tanpa ampun, sahabat yang terlalu kuat diganjal sebelum menjadi ancaman.²⁹ Demi kekuasaan segala cara dan apapun jalannya harus ditempuh.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai suatu pemerintahan yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun tentunya tidak terlepas dari cara-cara seperti yang dilakukan di atas. Sebagai bagian dari cara-cara itu berbagai tindakan politik (sikap dan kebijakan) dilakukan dalam rangka melanggengkan kekuasaannya. Di antara tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh Pemerintahan Soeharto salah satunya adalah pembatasan-pembatasan yang ditujukan kepada Keluarga Soekarno. Hal ini menjadi lebih penting karena munculnya salah seorang putri dari Soekarno yaitu Megawati Soekarnoputri dalam gelanggang perpolitikan

²⁸ Riswanda Imawan dalam Ahmad Bahar, *Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993-1996*, Yogyakarta, Pena Cendekia, 1996, hal. 2.

²⁹ Franz Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-Butir Pemikiran Kritis*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 114-115.

nasional banyak mendapat hambatan. Bahkan secara terang-terangan pemerintah mendukung usaha-usaha untuk menggulingkan Megawati dari kursi kepemimpinan puncak Partai Demokrasi Indonesia (PDI).³⁰

Kemunculan Megawati ke atas panggung politik PDI bagaimanapun akhirnya memunculkan perkiraan dan spekulasi akan lahirnya kembali Soekarnoisme. Soekarnoisme adalah paham yang berasal dari pandangan dan pemikiran Soekarno. Dalam konteks ini, PDI dianggap meneruskan semangat Marhaenisme yang dijadikan azas Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1963.³¹ PNI bersama-sama dengan partai yang lain yaitu Partai Katolik, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), dan Murba kemudian berfusi ke dalam PDI pada tahun 1973.

Mengapa Soekarnoisme begitu ditakuti? Alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah bahwa kharisma yang melekat dalam diri Soekarno (Bung Karno) yang disandang Megawati menjadi faktor yang bertuah dalam menebarkan "ketakutan" di lingkungan pusat kekuasaan³² dalam hal ini adalah pemerintah. Oleh karena itu pemerintah tidak menghendaki Megawati tampil memimpin PDI lebih lama karena popularitas Megawati yang semakin besar itu merupakan ancaman politis terhadap eksistensinya.

³⁰ Ahmad Bahar, *op.cit.*, hal. 93-99.

³¹ Mengenai PNI lihat Nazaruddin Sjamsuddin, *PNI dan Kepolitiannya*, Jakarta, CV Rajawali, 1984, hal. 13-14.

³² Pernyataan itu dikemukakan oleh Cornelis Lay dalam Ahmad Bahar, *op.cit.*, hal. 112.

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis³³ dan pendekatan situasional. Pendekatan psikologis digunakan untuk menganalisa latar belakang dari kehausan dan ambisi seseorang atau sekelompok orang akan kekuasaan, dalam hal ini adalah Soeharto dan pemerintahannya. Selain itu dari pendekatan tersebut dapat diketahui pula motif-motif dan hasrat Soeharto dan pemerintahannya yang selalu berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya. Oleh karena itu diharapkan, kita akan lebih memahami bagaimana karakter Soeharto dan pemerintahannya dalam menentukan sikap dan kebijakan terhadap Soekarno beserta keluarganya. Pendekatan situasional digunakan untuk memahami dan mengetahui perilaku dari aktor yang berperan dalam peristiwa itu.³⁴ Aktor yang dimaksud adalah Soeharto. Fokus yang tepat untuk memahami perilaku Soeharto adalah dengan mengetahui situasi yang berkembang pada saat itu. Situasi itulah yang membentuk perilaku/sikap Soeharto dan pemerintahannya yang akan terwujud dalam tindakan-tindakan. Artinya bahwa suatu peristiwa dapat memunculkan interpretasi yang kemudian membentuk sikap dan perilaku serta tindakan berdasarkan situasi yang berkembang pada saat itu.

G. Metode Penelitian

Dalam mengkaji tentang sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta keluarganya 1966-1998 sebuah tinjauan dalam

³³ Robert F. Berkhofer, Jr., *op.cit.*, hal. 40; Bandingkan dengan Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal. 30-31.

³⁴ Robert F. Berkhofer, Jr., *op.cit.*, hal. 68-69.



perpektif *historis-politis*, digunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau secara imajinatif dari fakta-fakta yang diperoleh melalui proses historiografi.³⁵ Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah tersebut antara lain:

1. Heuristik

Heuristik adalah proses pengumpulan data untuk keperluan subyek yang diteliti.³⁶ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur yang terdapat di perpustakaan dan berbagai tempat yang lain, yang berupa buku pustaka, majalah, surat kabar, dokumen, dan publikasi, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Soeharto: Ucapan, Pikiran, dan Tindakan Saya Seperti Diturunkan Kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.* (Otobiografi), sedangkan sumber sekunder antara lain *Meluruskan Sejarah dan Kehormatan Bagi Yang Berhak*.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah pengujian dari sumber-sumber sejarah. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat *otentisitas* (keaslian sumber) dan tingkat *kredibilitas* (kebisaan dipercaya) sumber.³⁷ Kritik sumber juga merupakan uji data pada penelitian sejarah yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dengan cara meneliti bahan yang digunakan, sifat bahan, gaya penulisan,

³⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah Pengantar Ilmu Sejarah* (Terj), Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1975, hal. 32.

³⁶ *Ibid*, hal. 33.

³⁷ Koentowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Benteng Budaya, 1995, hal. 99-100.

bahasa yang dipakai, jenis huruf yang digunakan dan jauh dekat dari peristiwa (membuktikan keasliannya). Sedangkan kritik intern dilakukan dengan menilai apakah sumber tersebut dapat dipercaya. Hasil dari kritik sumber adalah fakta-fakta yang merupakan unsur untuk melakukan rekonstruksi

3. Interpretasi

Interpretasi adalah langkah yang dilakukan apabila data telah terseleksi dan teruji kebenarannya. Dalam tahap ini dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data seteliti mungkin supaya hasil penulisan menjadi akurat. Oleh karena itu dilakukan pengolahan data dan analisis data secara cermat untuk mengurangi unsur subyektifitas. Meskipun demikian unsur tersebut akan selalu ada dalam setiap penulisan sejarah karena kejadian sebagai sejarah dalam arti obyektif (aktualitas) diamati, dialami atau dimasukkan kepikiran subyek sebagai persepsi. Sudah barang tentu sebagai masukan tidak akan pernah tetap murni tetapi telah diberi warna sesuai dengan selera subyek.³⁸ Sejalan dengan hal itu, penulis akan berusaha untuk menyusun dan menganalisis data secermat mungkin mengingat penelitian ini merupakan pembahasan terhadap peristiwa yang belum lama terjadi (sejarah kontemporer).

4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Langkah ini adalah suatu proses rekonstruksi dari rentetan peristiwa-peristiwa masa lampau yang merupakan suatu totalitas perjalanan sejarah yang utuh. Dalam

³⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 62; Bandingkan dengan Louis Gottschalk, *op.cit.*, hal. 27-28.

penelitian ini akan disajikan model penulisan *deskriptif-analitis*³⁹, sehingga selain merupakan rangkaian tulisan yang mendeskripsikan, sekaligus menganalisis Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno Beserta Keluarganya 1966-1998 Sebuah Tinjauan dalam Perspektif Historis-Politis.

H. Sistematika Penulisan

Dalam mengkaji tentang Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta Keluarganya 1966-1998 Sebuah Tinjauan dalam Perspektif Historis-Politis, akan disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Konseptual dan Pendekatan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, membahas tentang pandangan dan pemikiran politik Soekarno sebelum dan sesudah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Adapun pandangan dan pemikiran Soekarno sebelum Indonesia merdeka meliputi; Nasionalisme Islamisme dan Marxisme, Marhaenisme, dan Pancasila. Sedangkan pandangan dan pemikiran politik Soekarno setelah Indonesia merdeka meliputi Konsepsi Presiden tentang Demokrasi Terpimpin, Menuju Revolusi Nasional, dan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis).

³⁹ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 60-61.

Bab III, membahas tentang pandangan dan pikiran politik Soeharto yang meliputi; Melaksanakan Demokrasi Pancasila, Pancasila sebagai Ideologi Nasional, dan Pancasila sebagai Satu-satunya Azas (Azas Tunggal).

Bab IV, membahas sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno yang meliputi; sikap dan kebijakan pra Pemerintahan Soeharto terbentuk terhadap Soekarno sehubungan dengan Pemberontakan G30S/PKI, sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan Pemberontakan G30S/PKI, sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan status Soekarno pasca diturunkan, sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan penulisan Sejarah Indonesia terutama pada masa Demokrasi Terpimpin, dan sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan sejarah lahirnya Pancasila Dasar Negara.

Bab V, membahas tentang sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap keluarga Soekarno yang meliputi; sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap keluarga Soekarno secara umum serta sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap keluarga Soekarno secara khususnya (Megawati Soekarnoputri), dalam hal ini adalah sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto dalam kongres PDI di Medan serta sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto menjelang dan dalam peristiwa 27 Juli 1996.

Bab VI, berisi Simpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan bab-bab sebelumnya.

Sampai di sini pendahuluan dalam penelitian tentang Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta Keluarganya 1966-1998 Sebuah Tinjauan dalam Perspektif Historis-Politis. Dalam bab selanjutnya penelitian ini akan membahas tentang pandangan dan pemikiran politik Soekarno.



BAB II

PANDANGAN DAN PEMIKIRAN POLITIK SOEKARNO

Soekarno merupakan tokoh yang dominan dalam panggung politik Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1965. Hal ini semakin diperjelas lagi lebih-lebih pada delapan tahun terakhir sebelum kekuasaannya berakhir. Akan tetapi jauh sebelumnya Soekarno sudah menjadi terkenal sebagai seorang pemikir maupun aktifis dalam Pergerakan Nasional Indonesia. Di bawah ini akan dibahas tentang pandangan dan pemikiran politik Soekarno yang dibagi menjadi dua bagian yaitu; sebelum dan sesudah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

A. Pandangan dan Pemikiran Politik Soekarno sebelum Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945

1. Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme

Pada tanggal 17 Januari 1926 didirikanlah *Algemeene Studie Club* atau Kelompok Studi Umum yang merupakan wadah untuk mengemukakan gagasan-gagasan menuju kepemimpinan nasional. Kelompok studi ini memiliki corak tersendiri yang jelas yaitu merupakan perkumpulan politik. Dengan perkataan lain kelompok studi ini lebih banyak ditujukan kepada upaya mencapai kemerdekaan dan menolak pandangan bahwa kemerdekaan itu dapat dicapai secara berangsur-angsur melalui kerjasama dengan Belanda.

Dalam mewujudkan tujuan perjuangan kelompok studi itu, Soekarno berusaha memimpinya dari suatu titik tolak baru dalam perlawanan rakyat

Indonesia melawan kekuasaan kolonial Belanda. Soekarno melihat fenomena gerakan kemerdekaan yang terpecah-pecah yang terjadi di Indonesia. Hal ini tercermin dari adanya bentrokan antara Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menunjukkan sifat perpecahan itu.¹ Selain itu juga adanya gerakan-gerakan kemerdekaan yang terdiri atas kelompok-kelompok yang lebih kecil yang mendasarkan diri pada kesatuan suku maupun keagamaan. Soekarno menyayangkan perpecahan-perpecahan ini. Ia melihat keharusan untuk bangun dan mulai merintis jalan ke arah pembentukan suatu organisasi massa yang mencakup keseluruhannya sebagaimana untuk mengembangkan kekuatan yang mampu membendung kekuasaan rezim kolonial.

Menjelang tahun 1926 Soekarno sudah dapat menanggapi gagasan sentral bahwa suatu konsep nasionalisme yang diolah kembali dan dipertajam mungkin dapat digunakan untuk menarik semua lapisan masyarakat Indonesia yang sadar akan politik. Naluri politik membawa Soekarno kepada keyakinan bahwa ia dapat menjembatani perpecahan-perpecahan yang ada. Suatu program yang terlepas dari teori Islam maupun Marxis tentang revolusi sosial, yang memberikan tekanan pada keutamaan perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan dan mengabaikan masalah-masalah mengenai bentuk negara dan tipe masyarakat yang akan dibangun jika kemerdekaan telah tiba, mencerminkan suatu konsep nasionalisme yang lebih murni dibandingkan dengan konsepsi-konsepsi nasionalisme yang berlaku sebelumnya di Indonesia.²

¹ John D. Legge, *Soekarno Sebuah Biografi Politik* (Terj), Jakarta, Sinar Harapan, 1985, hal. 97.

² *Ibid*, hal. 99.

Sejalan dengan hal tersebut sebagai titik tolak, Soekarno mendasarkan diri pada teori Ernest Renan. Renan menyatakan bahwa "suatu bangsa tidak ditentukan oleh jenis ras, bahasa, agama, kesamaan kepentingan ataupun perbatasan teritorial, melainkan adalah jiwa atau suatu pandangan yang fundamental yang lahir dari kesamaan historis dan dari suatu kemauan atau keinginan untuk hidup bersama dan bersatu serta akan selalu mempertahankan kebersamaan dan kesamaannya itu dengan jalan apapun".³ Berdasarkan teori tersebut Soekarno memahaminya sebagai gagasan pemersatu yang potensial yang dapat mempertemukan adanya perbedaan yang saling bertentangan dalam masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya *Algemeene Studie Club* menerbitkan majalah yang diberi nama "*Indonesia Muda*". Majalah ini yang kemudian banyak memuat gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran politik kaum nasionalis Indonesia. Dalam bulan April 1926, sekitar tiga bulan setelah Soekarno menyelesaikan studinya di *Technische Hoogeschool* (THS), ia menulis sebuah karangan berjudul "*Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme*".⁴ Karangan itu dimuat berturut-turut dalam tiga penerbitannya pada tahun 1926. Pada intinya Soekarno menyerukan untuk melakukan kerja sama yang lebih erat di antara ketiga golongan itu.

Soekarno melihat adanya keanekaragaman unsur yang telah ditemukan dalam nasionalisme Indonesia, maka terdapat tiga gagasan perjuangan yang

³ Dikutip dari Soekarno *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964, hal. 3; Bandingkan dengan Ernest Renan, *Apakah Bangsa Itu?* (Terj), Jakarta, Erlangga, 1968, hal. 35.

⁴ Periksa Soekarno, *op.cit.*, hal. 1; Lihat pula John D. Legge, *op.cit.*, hal. 99.

dominan yang telah memberikan motivasi kepada tiga partai yang berbeda-Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme-ia mengemukakan apa yang baginya merupakan pertanyaan sentral ialah:

"Partai Boedi Oetomo, *Nationaal Indische Partij* (NIP) yang kini masih "hidup", Partai Serikat Islam, Perserikatan Minahasa, Partai Komunis Indonesia, dan masih banyak partai-partai lain.....itu masing-masing mempunyai roh Nasionalisme, roh Islamisme, dan roh Marxisme. Dapatlah roh-roh ini dalam situasi kolonial bekerja bersama-sama menjadi satu roh yang besar, roh persatuan? Roh persatuan yang akan membawa kita ke kebesaran."⁵

Pemikiran mengenai Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme secara bergiliran nampak diuraikan sebagai tiga aliran yang terpisah dalam arus umum kegiatan politik di Indonesia. Soekarno menghimbau agar masing-masing aliran mengajak mereka untuk menghilangkan perbedaan yang ada. Selanjutnya dijalinlah kerja sama antara satu sama lain untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama. Adalah suatu hal yang keliru dalam memahami arah perkembangan sejarah apabila kaum Nasionalis menolak untuk bekerja sama dengan kaum Marxis. Munculnya Marxisme di Indonesia sama dengan munculnya Nasionalisme, dua hal itu merupakan perlawanan yang sama terhadap penindas yang sama. Pada gilirannya Kaum Muslimin hendaknya menghilangkan rasa takutnya terhadap Marxisme dan mengakuinya sebagai sekutunya. Kapitalisme adalah musuh kaum Marxis, oleh karena itu Kapitalisme juga adalah musuh Islam.⁶ Taktik dan strategi Marxis yang baru ialah bekerja bersama gerakan-gerakan nasionalisme Islam yang sejati di Asia.

⁵ Soekarno, *op.cit.*, hal. 3.

⁶ John D. Legge, *op.cit.*, hal. 100.

Soekarno menyatakan bahwa kesadaran mengenai tragedi penjajahan telah menimbulkan protes di seluruh Asia. Lebih lanjut Soekarno menyatakan bahwa "Roh Asia" tidak akan mengalah kepada kaum penindas. Hal ini tercermin dari munculnya suatu pergerakan rakyat di Indonesia yang telah memanifestasikan ke dalam tiga aliran politik, walaupun ketiganya mempunyai tujuan yang sama. Ketiga aliran itu adalah aliran Nasionalis, aliran Islamis, dan aliran Marxis. Sekarang sudah menjadi kewajiban semua rakyat Indonesia berupaya untuk mempersatukan ketiga aliran itu.⁷ Hal ini untuk membuktikan bahwa di daerah jajahan bahwa mereka tidak perlu bermusuhan satu sama lain. Seandainya saja mereka bersatu mereka akan menjadi suatu kekuatan yang maha besar yang tak akan dapat ditahan oleh rezim kolonial. Dengan semangat yang tak kunjung padam dan tanpa mengenal putus asa rakyat Indonesia harus memikul tugas yang berat ini. Akan tetapi Soekarno yakin, bahwa persatuanlah yang kelak kemudian hari membawa kita ke arah tercapainya tujuan dan cita-cita kita yaitu "Indonesia Merdeka".

Sejalan dengan hal itu untuk pertama kalinya Soekarno memberikan rumusan yang jelas dan gamblang dari gagasan yang untuk selanjutnya akan mendominasi semua tindakannya yang merupakan kunci untuk mewujudkan harapan-harapannya.⁸ Soekarno yakin bahwa hanya persatuan di dalam pergerakan sajalah yang mampu memberikan kekuatan yang cukup besar kepada tindakan-tindakannya untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut Soekarno menyatakan:

⁷ Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (Terj), Jakarta, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1987, hal. 77.

⁸ *Ibid.*

"Entah bagaimana tercapainya persatuan itu; entah pula bagaimana wajahnya persatuan itu; akan tetapi tetaplah, bahwa kapal yang membawa kita ke Indonesia Merdeka itu ialah dengan Kapal Persatuan! Mahatma, jurumudi yang akan membuat dan mengemudikan Kapal Persatuan itu kini barangkali belum ada, akan tetapi yakinlah kita pula, bahwa di kelak kemudian hari mustilah datang saatnya, Sang Mahatma itu berdiri di tengah-tengah kita!..."⁹

Dalam pandangan ini Soekarno merasa optimis mengenai tugas mempersatukan aliran-aliran itu. Hal ini tercermin dari pernyataan-pernyataannya bahwa semua aliran itu tujuannya sama.¹⁰ Oleh karena itu maka pertama-tama mereka harus menjauhi percekocokan atau konflik di antara sesama mereka. Bagi Soekarno sudah jelas dengan sendirinya bahwa kaum Nasionalis, Islamis, dan Marxis harus bersatu dalam perjuangan melawan rezim kolonial.

Dalam menguraikan pandangan-pandangannya, Soekarno memperlihatkan pemahamannya yang sederhana atas bermacam-macam pemikiran dan gagasan yang diserapnya sejak masih menjadi mahasiswa. Soekarno mengambil perbandingan-perbandingan dari Ernest Renan, H.G Wells, Karl Marx, Frederich Engels, Karl Kautsky, Karl Radek, Otto Bauer, Sun Yat Sen, Mahatma Gandhi, Kemal Ataturk, Sismondi, Blanqui, dan Mohammad Abduh. Bahkan Soekarno juga mengambil perbandingan dari Al Qur'an.

Sementara itu sebagai seorang yang berasal dari suku Jawa yang telah dibentuk oleh kebudayaan Jawa serta berakar dalam tradisi kebudayaan Jawa, maka hakikat Jawaisme sangat jelas mewarnai pemikiran Soekarno.¹¹ Dalam pandangannya Soekarno beranggapan bahwa segala fenomena yang ada di dunia

⁹ Soekarno, *op.cit.*, hal. 2.

¹⁰ Bernhard Dahm, *op.cit.*, hal. 78.

¹¹ Soekarno, *op.cit.*, hal. 1-23.

ini berdasarkan pendekatan Jawa adalah "satu".¹² Dengan perkataan lain bahwa *sinkretisme* Jawa melihat Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme adalah satu, sebab ketiga unsur ini sama-sama menghadapi atau melawan kolonialisme dan imperialisme.

Oleh karena itu Soekarno dapat dikatakan sudah mengenal semua aliran politik khususnya dalam Pergerakan Nasional Indonesia. Dalam hal ini Soekarno memiliki kualifikasi-kualifikasi yang ideal bagi tugasnya untuk menciptakan persatuan tanpa harus segera berhadapan dengan perlawanan yang sengit dari pihak manapun. Hal ini disebabkan karena masing-masing dari sekian banyak partai dan perhimpunan itu, hampir tanpa kecuali dapat ditelusuri sumbernya kepada salah satu dari ketiga aliran politik yang mendasarinya yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme.¹³ Meskipun demikian Soekarno telah melakukan suatu pencarian yang lama sebelum ia sampai kepada suatu rumusan yang dapat memuaskan, tidak hanya terbatas kepada orang-orang Nasionalis, tetapi orang-orang Islamis, maupun orang-orang Marxis. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Soekarno yang menyatakan bahwa:

"Nasionalis yang sejati, yang cintanya kepada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, nasionalis yang bukan chauvinis, tak boleh tidak haruslah menolak segala paham pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati, yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu *copy* atau tiruan dari Nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan, nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti, adalah terhindar dari segala paham kekecilan dan kesempitan. Baginya, maka rasa cinta bangsa itu

¹² Dikutip dari tulisan Onghokham tentang Sukarno: Pemikir atau Politikus Dalam Bernhard Dahm, *op.cit.*, hal. xvi.

¹³ *Ibid*, hal. 75.

adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat kepada lain-lain sesuatu, sebagai lebar dan luasnya udara yang memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup."¹⁴

Selanjutnya Soekarno menyatakan bahwa hanya nasionalisme ke-Timuran yang sejatilah yang pantas dipeluk oleh nasionalis Timur yang sejati. Nasionalisme Barat (Eropa), ialah suatu nasionalisme yang bersifat menyerang-menyerang atau suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi. Nasionalisme yang semacam itu pastilah akan binasa.¹⁵ Dengan mengadakan perbedaan yang tajam antara Timur dan Barat, Soekarno menegaskan bahwa ia menolak untuk memandang nasionalisme sebagai "cinta kepada segala manusia". Soekarno memandang hal tersebut sebagai kerangka bersama bagi semua partisipan dalam *Bharata Yudha*, konflik yang menentukan. Bagi Soekarno, nasionalisme merupakan kerangka bersama terhadap semua unsur anti imperialis, anti Barat tidak hanya di Indonesia, akan tetapi juga di seluruh Asia. Nasionalisme yang sejati adalah "yang seperti udara".¹⁶ Hal itu memberikan gambaran bahwa tidak sebatas hanya untuk Indonesia melainkan semua bangsa-bangsa Asia dengan mudah dapat dipersatukan.

Anggapan Soekarno bahwa nasionalisme "seluas udara" maka tidak ada masalah lagi bagi Soekarno untuk menghimbau kaum nasionalis agar mengadakan kerja sama yang lebih erat dengan orang-orang Islamis dan Marxis. Adanya kerja

¹⁴ Soekarno, *op.cit.*, hal. 5-6.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bernhard Dahm, *op.cit.*, hal. 83.

sama itu akan terjalin persatuan yang kuat. Sehubungan dengan keyakinan tersebut Soekarno mengatakan bahwa:

"Dengan jalan yang jauh kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain. Dengan jalan yang jauh kurang sempurna kita menunjukkan teladan pemimpin-pemimpin di lain negeri. Akan tetapi kita yakin, bahwa kita dengan terang benderang menunjukkan kemauan kita menjadi satu. Kita yakin bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia semuanya insyaf, bahwa persatuanlah yang membawa kita ke arah ke-Besaran dan ke-Merdekaan. Kita yakin pula bahwa, walaupun pikiran kita itu tidak mencocoki semua kemauan dari masing-masing pihak, ia menunjukkan bahwa Persatuan itu tidak tercapai. Sekarang tinggal menetapkan sahaja organisasinya, bagaimana persatuan itu bisa berdiri; tinggal mencari organisasinya sahaja yang menjadi Mahatma persatuan itu. Apakah Ibu Indonesia yang mempunyai putera-putera sebagai Oemar Said Tjokroaminoto, Tjipto Mangunkusumo, dan Semaun, apakah Ibu Indonesia itu tak mempunyai pula Putera yang bisa menjadi Kampiun Persatuan itu?"¹⁷

Akhirnya Soekarno memberikan kesimpulan bahwa pada intinya persatuan itu terbentuk atas dasar saling memberi dan menerima. Inilah yang menjadi rahasia persatuan itu. Dengan perkataan lain persatuan tidak akan terjalin kalau masing-masing pihak tidak mau memahami dua unsur tersebut (saling memberi dan menerima).

2. Marhaenisme

Berdasarkan Etimologi kata Marhaenisme berasal dari kata Marhaen. Marhaen adalah seorang petani yang dijumpai oleh Soekarno di daerah Cigereleng, Bandung bagian selatan. Meskipun petani itu miskin namun menurut Soekarno ia mempunyai segala sesuatu yang berhubungan dengan alat-alat

¹⁷ *Ibid*, hal. 22-23.

produksi. Terlepas dari tepat dan tidaknya asal-usul istilah tersebut, namun kenyataannya istilah kaum Marhaen memang untuk menyebut kebanyakan rakyat Indonesia yang sudah diterima secara umum.¹⁸ Akan tetapi pada hakekatnya Soekarno mengartikan Marhaenisme sebagai suatu ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat yang sejahtera secara merata.¹⁹ Perkataan "Marhaenisme" adalah lambang dari penemuan kembali kepribadian nasional yang mencerminkan sifat dari masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangannya Marhaenisme kemudian menjadi dasar dari Partai Nasional Indonesia (PNI).²⁰ Azas Marhaenisme adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Adapun yang dimaksud dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi menurut Soekarno adalah:

"Dua perkataan ini adalah perkataan buatan orang, kami punya buatan. Sebagaimana perkataan Marhaen adalah tempo hari kami "bikinlah" buat menyebutkan kaum yang melarat-sengsara, maka perkataan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi adalah pula perkataan-buatan untuk menyebut kita punya nasionalisme dan kita punya demokrasi. Istilah sosio adalah terambil daripada perkataan yang berarti; masyarakat, pergaulan hidup, hirup-kumbuh, siahwee. Sosio-nasionalisme adalah dus:

¹⁸ Istilah kaum Marhaen sama halnya dengan Kaum Kromo. Lihat Soekarno, *Indonesia Menggugat Pidato Pembelaan Bung Karno Di Muka Hakim Kolonial*, Jakarta, SK Seno, 1951, hal. 130-136; Bandingkan dengan G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hal. 49.

¹⁹ Dikutip dari Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat* (Terj), Jakarta, Gunung Agung, 1966, hal. 82-85; Lihat juga G. Moedjanto, *Indonesia Jilid I...*, *op.cit.*

²⁰ Pada tanggal 4 Juli 1927 Soekarno dan *Algemeene Studie Club*nya memprakarsai pembentukan sebuah partai politik baru yaitu Perserikatan Nasional Indonesia, dengan Soekarno sebagai ketuanya. Pada bulan Mei 1928 nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Tujuan PNI adalah Kemerdekaan Bagi Kepulauan Indonesia yang akan dicapai secara non-kooperatif dan dengan menggalang organisasi massa. Inilah partai politik yang terpenting pertama yang beranggotakan Bangsa Indonesia dan semata-mata menciptakan kemerdekaan politik, berpandangan kewilayahan yang meliputi batas-batas Indonesia yang nanti berlaku serta berideologi nasionalisme "Sekuler". Pada bulan Mei 1929 PNI telah mempunyai cabang-cabangnya di kota-kota besar di Jawa dan satu cabang di Palembang, serta menyatakan memiliki anggota sebanyak 3860 orang (mayoritas di Bandung, Batavia dan Jakarta); Pada akhir tahun 1929 jumlah anggota partai ini telah mencapai 10000 orang. Dikutip dari M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Terj), Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1995, hal. 277-278.

nasionalisme masyarakat, dan sosio-demokrasi adalah demokrasi-masyarakat."²¹

Lebih lanjut Soekarno menerangkan bahwa yang dimaksud dengan nasionalisme-masyarakat dan demokrasi-masyarakat yaitu:

"Nasionalisme masyarakat adalah nasionalisme yang timbulnya tidak karena "rasa" sahaja, tidak karena "gevoel" sahaja, tidak karena "lyriek" sahaja, -tetapi ialah karena keadaan-keadaan yang nyata di dalam masyarakat. Nasionalisme- masyarakat, -sosio-nasionalisme-, bukanlah nasionalisme "ngalamun", bukanlah nasionalisme "kemenyan", bukanlah nasionalisme "melayang", tetapi ialah nasionalisme yang dengan dua-dua kakinya berdiri di dalam masyarakat."²²

Sebagaimana telah diketahui bahwa maksud dari sosio-nasionalisme pada intinya ialah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat bumi putera, sehingga adanya kepincangan yang terjadi itu sekarang telah menjadi keadaan yang sempurna. Dengan kata lain tidak terdapat lagi kaum yang tertindas dan sengsara. Sejalan dengan hal itu Soekarno menambahkan:

"Oleh karenanya maka sosio-nasionalisme adalah nasionalisme Marhaen, dan menolak tiap tindakan borjuisme yang menjadi sebabnya kepincangan masyarakat itu. Jadi; sosio-nasionalisme adalah nasionalisme politik dan ekonomi, -suatu nasionalisme yang bermaksud mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki."²³

Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi-masyarakat menurut Soekarno adalah:

"Demokrasi-masyarakat, sosio-demokrasi-, adalah timbul karena sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi adalah pula demokrasi yang berdiri dengan dua-dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdikan kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi bukanlah demokrasi a la Revolusi Perancis, bukan demokrasi a la Amerika, a la Inggris, a la

²¹ Soekarno, *Dibawah Bendera.....*, *op.cit.*, hal. 174.

²² *Ibid*, hal. 174-175.

²³ *Ibid*.

Nederland, a la Jerman dan lain-lain, -tetapi ia adalah demokrasi sejati yang menjadi keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi."²⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan atau dengan perkataan lain adalah perasaan cinta kepada bangsa yang dijiwai oleh perasaan cinta kepada sesama manusia. Sedangkan sosio-demokrasi adalah demokrasi yang menuju kepada kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan bagi seluruh bangsa.

3. Pancasila Dasar Negara Indonesia Merdeka

Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkanlah rencana pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).²⁵ Dalam perkembangannya penyusunan keanggotaan BPUPKI memerlukan jangka waktu yang lama karena terjadi tawar-menawar antara pihak-pihak Indonesia dan Jepang. Sungguhpun demikian akhirnya diumumkan juga daftar susunan keanggotaan BPUPKI, walaupun dalam selang waktu dua bulan kemudian. Adapun anggota-anggota BPUPKI terdiri atas orang Indonesia dan Jepang. Sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi ketua BPUPKI adalah Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Dalam kesempatan itu Soekarno justru menolak untuk menjadi ketua karena dirinya ingin memperoleh kebebasan yang lebih luas dalam berbagai

²⁴ *Ibid.*

²⁵ BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Junbi Cosakai*.

perdebatan tersebut. Adapun tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyusun rencana-rencana pembangunan politik Pemerintahan Indonesia Merdeka.²⁶

Sementara itu dalam sidang BPUPKI yang pertama yang berlangsung antara tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 membahas persoalan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang inilah Soekarno memperkenalkan untuk pertama kali konsepsi mengenai dasar filsafat negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945.²⁷ Pada kesempatan itu Soekarno menguraikan apa yang ia namakan "lima sila (dasar)" yang akan menjadi falsafah resmi dari negara yang hendak dibentuk yaitu Indonesia Merdeka.²⁸

Pada hakekatnya pandangan dan pemikiran Soekarno yang tertuang dalam pidato tersebut merupakan argumentasi yang khas sebagaimana yang telah dikemukakan pada saat-saat sebelumnya. Dengan kata lain pidato itu merupakan suatu ikhtisar (rangkuman) dari gagasan-gagasan politik yang telah dikembangkan sampai saat itu yaitu tahun 1945.²⁹ Setelah beberapa kata pendahuluan tentang perlunya suatu landasan filosofis dalam mendirikan suatu negara, selanjutnya Soekarno berkata kepada para anggota BPUPKI:

"Paduka Tuan Ketua yang mulia! saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki! Paduka Tuan Ketua minta *dasar*, minta *philosophische grondslag*, atau, jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu "*Weltanschauung*", di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu."³⁰

²⁶ G. Moedjanto, *Indonesia Jilid I...*, *op.cit.*, hal. 34-35; Bandingkan John D. Legge, *op.cit.*, hal. 213.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Periksa Sukarno, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta, Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, 1984, hal. 133-158; Teks yang sama lihat Oedijo (dkk), *Doktrin Revolusi Indonesia*, Surabaya, Persahabatan Press, 1965, hal. 25-42.

²⁹ Bernhard Dahm, *op.cit.*, hal. 410.

³⁰ Sukarno, *Pancasila...*, *op.cit.*, hal. 140.

Seperti telah diketahui bahwa itulah yang merupakan tujuan utama Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu menawarkan kepada semua anggota suatu sistem filsafat yang dapat diterima oleh semua pihak.

Sebagai prinsip dari sila pertama dasar negara yang hendak dibangun oleh Soekarno adalah "kebangsaan". Akan tetapi lebih lanjut Soekarno menambahkan bahwa yang dimaksudnya bukanlah kebangsaan dalam arti yang sempit. Negara yang hendak didirikan menurut Soekarno adalah negara "kebangsaan untuk semua".³¹ Dengan perkataan lain semua orang berhak atas tanah air Indonesia. Hal ini seperti yang telah disebut-sebut oleh Soekarno bahwa:

"Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *Chauvinisme*, sebagai yang dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan "*Deutschland über Alles*", tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsanya *minulya*, berambut jagung dan bermata biru, "bangsa Arya", yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian, Tuan-tuan jangan berkata, bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia."³²

Selanjutnya sebagai prinsip kedua yang oleh Soekarno ditawarkan kepada para anggota BPUPKI adalah "kemanusiaan" dalam hubungan antara bangsa-bangsa (kekeluargaan bangsa-bangsa). Dalam pandangan itu Soekarno menyatakan bahwa kemanusiaan atau perikemanusiaan sama halnya dengan "*internasionalisme*". Hal ini memberi penjelasan bahwa "kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, melainkan kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa" atau "kita harus menuju persatuan dunia,

³¹ Bernhard Dahm, *op.cit.*, hal. 142.

³² Lihat Sukarno, *Pancasila....., op.cit.*, hal. 148.

persaudaraan dunia". Akan tetapi Soekarno menjelaskan kembali bahwa *internasionalisme* yang dimaksud:

"Tetapi jikalau saya katakan *internasionalisme*, bukanlah saya bermaksud *kosmopolitisme*, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lain."³³

Soekarno menyatakan bahwa *internasionalisme* tidak akan dapat tumbuh subur apabila tidak berakar di dalam alam nasionalisme. Sebaliknya nasionalisme tidak akan tumbuh subur pula kalau tidak hidup dalam wadah *internasionalisme*. Dengan demikian dua hal tersebut saling berkaitan erat. Artinya prinsip kebangsaan sebagai prinsip yang pertama berkaitan erat dengan prinsip yang kedua yaitu perikemanusiaan atau *internasionalisme*.

Adapun yang menjadi prinsip atau azas yang ketiga adalah mufakat. Prinsip ini sering pula disebut sebagai prinsip "demokrasi". Soekarno berpendapat bahwa hal ini hanya dapat dicapai jika semua pihak diwakili sampai ke suatu tingkat yang memuaskan semua orang.³⁴ Dengan perkataan lain negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua, semua buat satu". Hal ini meyakinkan Soekarno bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan, perwakilan. Oleh karena itu Soekarno menyatakan gagasannya bahwa:

"Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, -maaf beribu-ribu maaf kelslaman saya jauh belum sempurna, -tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, Tuan-tuan akan dapat tidak

³³ *Ibid*, hal. 148-149.

³⁴ Bernhard Dahm, *op.cit.*, hal. 414.

lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat."³⁵

Pada intinya gagasan Soekarno tersebut ditujukan kepada golongan Islam supaya tidak bersikeras menuntut pembentukan sebuah Negara Islam yang tidak akan memungkinkan adanya kerja sama yang aktif dari golongan-golongan agama lain.

Selanjutnya sebagai hasil yang dicita-citakan oleh Soekarno diungkap dalam prinsip yang keempat yaitu kesejahteraan, prinsip yang menyatakan bahwa tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Sehubungan dengan hal tersebut Soekarno kembali berbicara mengenai kesia-siaan demokrasi parlementer. Dengan meminjam pendapat yang pernah dikemukakan oleh seorang pemimpin Perancis Jean Jaures dalam tahun 1893 yang mengatakan bahwa:

"Di dalam *Parlementaire Democratie*, tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama. Hak politik yang sama, tiap-tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk di dalam parlemen. Tetapi adakah *Sociale rechtvaardigheid*, adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat?"³⁶

Oleh karena itu Soekarno mempunyai keyakinan "kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, melainkan permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-ekonomische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!" Selain itu Soekarno juga menginginkan badan permusyawaratan yang akan dibentuk hendaknya bukan badan permusyawaratan demokrasi politik saja, tetapi badan yang bersama-sama

³⁵ Sukarno, *Pancasila...*, *op.cit.*, hal.149.

³⁶ *Ibid*, hal. 151.

masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip, yaitu keadilan politik dan keadilan sosial.³⁷

Akhirnya prinsip yang kelima menurut Soekarno adalah menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip itu sering disebut sebagai prinsip ketuhanan. Dalam pandangan itu Soekarno menerangkan:

"Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya *Negara* Indonesia satu *Negara* yang bertuhan!"³⁸

Dengan demikian Soekarno menghendaki untuk mengamalkan jalannya agama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun agama-agama yang lain dengan cara berkeadaban. Cara yang berkeadaban yang dimaksudkan adalah saling hormat-menghormati satu sama lain. Di sinilah dalam pengakuan prinsip yang kelima inilah Soekarno bermaksud supaya segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya dan negara Indonesia akan bertuhan pula.

Demikianlah rumusan dari pidato Pancasila yang telah dikemukakan oleh Soekarno mengenai lima *soko guru* negara yang hendak dibangun. Hal itu merupakan suatu upaya untuk memberikan kepada aliran-aliran politik yang

³⁷ *Ibid*, hal. 152.

³⁸ *Ibid*, hal. 153.

heterogen di Indonesia untuk dapat mencapai suatu landasan bersama dalam negara baru yang akan dibentuk itu. Pancasila bukan merupakan hasil dari tahun-tahun terakhir ini tetapi cita-cita itu sudah hidup dalam Pergerakan Nasional Indonesia sejak dahulu. Sekarang kita akan mempraktekkannya sehingga ia dapat menjadi Dasar Negara Indonesia.

B. Pandangan dan Pemikiran Politik Soekarno setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan bukti puncak kesuksesan perjuangan panjang yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno (dan Hatta). Hal ini tercermin dari peran Soekarno yang merupakan tokoh yang dapat mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan (di samping Mohammad Hatta). Pada saat itu Soekarno (dan Hatta) adalah lambang dari suatu bangsa yang bersatu seperti yang telah dicita-citakannya sejak dahulu. Meskipun masih melanjutkan perjuangan yang berat dalam tahun-tahun berikutnya, Soekarno kembali menjadi tokoh sentral yang mendominasi kepolitikan Indonesia terutama diakhir tahun 1950-an sampai pertengahan tahun 1960-an. Dalam kurun waktu tersebut muncul kembali pandangan dan pemikiran politik Soekarno. Pandangan dan pemikiran politik Soekarno tersebut akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini:

1. Konsepsi Presiden tentang Demokrasi Terpimpin

Di tengah-tengah krisis yang terjadi pada akhir tahun 1956 dan awal 1957 diambillah langkah-langkah pertama menuju suatu bentuk pemerintahan yang oleh Soekarno dinamakan Demokrasi Terpimpin.³⁹ Hal ini merupakan suatu sistem yang tidak tetap yang muncul akibat dari adanya krisis yang berkepanjangan dan terus-menerus berubah sepanjang masa yang paling kacau dalam sejarah Indonesia sejak Revolusi. Gagasan mengenai Demokrasi Terpimpin banyak didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun prakarsa untuk pelaksanaannya diambilnya bersama-sama dengan pimpinan Angkatan Bersenjata.⁴⁰

Soekarno menyatakan bahwa sebagai titik tolak dari Demokrasi Terpimpin adalah menggunakan atau memperhatikan lembaga-lembaga yang sesuai dengan sifat-sifat dan jiwa bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain Soekarno tidak menghendaki segala peniruan bentuk-bentuk konstruksi politik dari negara-negara lain apalagi negara-negara Barat. Oleh karena itu Soekarno menolak gagasan Demokrasi Liberal dengan alasan bahwa demokrasi jenis itu adalah bentuk yang diimport dari negara Barat yang mengizinkan pemaksaan mayoritas atas minoritas. Bentuk demokrasi ini bukanlah cara bagi bangsa Indonesia.

³⁹ Menurut Herbert Feith yang dimaksud dengan Demokrasi Terpimpin adalah suatu bentuk demokrasi dengan kepemimpinan akan tetapi tetap merupakan demokrasi. Lihat Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca, Cornell University Press, 1962, hal. 518; Mengenai pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin lihat Daniel S. Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*, Ithaca Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1966, hal. 59.

⁴⁰ M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hal. 387; Bandingkan dengan Baskara Wardaya, "Bung Karno dan Kaum Muda", *Bernas*, 6 Juni 2002, hal. 4.

Sejalan dengan hal di atas, Soekarno telah mendapatkan suatu gaya demokrasi yang dapat mencapai kata sepakat dalam pengambilan keputusan pemerintah yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Soekarno menemukannya dalam bentuk musyawarah dalam kehidupan di pedesaan. Keputusan-keputusan hanya dapat diambil sesudah pertimbangan-pertimbangan yang lama dan cermat. Selama masih ada golongan minoritas yang masih belum sependapat akan suatu usul, musyawarah tetap diteruskan, sampai akhirnya di bawah tuntunan seorang pemimpin, dicapai kata sepakat. Tata cara musyawarah untuk mufakat yang khas Indonesia ini bersama dengan kepemimpinan memungkinkan semua pendapat dipertimbangkan dengan menghargai perasaan minoritas. Demokrasi semacam itulah yang seharusnya menjadi model untuk bangsa Indonesia.⁴¹

Dalam menerjemahkan prinsip-prinsip demokrasi itu ke dalam bentuk perangkat politik yang nyata disatu pihak Soekarno menyerahkannya kepada para pemimpin politik yang lain. Akan tetapi di pihak lain ia mempunyai konsepsinya sendiri. Pada tanggal 21 Februari 1957 Soekarno mengajukan dua usul dari konsepsinya tersebut. Dalam konsepsinya yang pertama Soekarno menyarankan dibentuknya Kabinet Gotong-Royong yang mewakili semua partai politik. Semua partai politik yang dimaksudkan oleh Soekarno lebih khususnya adalah empat partai pemenang Pemilu tahun 1955 yaitu PNI, Masyumi (Majelis Syuro

⁴¹ Periksa John D. Legge, *op.cit.*, hal. 325.



Muslimin Indonesia), NU (Nahdlatul Ulama), dan PKI.⁴² Dengan demikian suatu pemerintahan yang berdiri di atas empat kaki (Kabinet Empat Kaki) yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU, dan PKI dan mungkin dibantu oleh wakil-wakil partai kecil lainnya, Kabinet Gotong-Royong ini akan lebih mampu menjalankan kebijaksanaan politik nasional yang dapat diterima dan meningkatkan kerukunan persatuan nasional. Perkataan gotong-royong menurut Soekarno adalah istilah asli Indonesia yang menggambarkan jiwa asli Indonesia yang semurni-murninya.

Sedangkan konsepsinya yang kedua Soekarno mengusulkan pembentukan suatu Dewan Nasional di bawah kepemimpinannya yang diharapkan dapat memusyawarahkan garis-garis besar politik nasional. Dewan ini bukanlah suatu badan perwakilan partai-partai, melainkan perwakilan dari golongan-golongan fungsional. Sebagaimana yang dimaksud dengan golongan-golongan fungsional menurut Soekarno adalah golongan karyawan yang terdiri dari wakil-wakil buruh tani, cendekiawan, pengusaha nasional (Islam, Protestan, Katolik), Angkatan Bersenjata, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan juga wakil-wakil daerah.

Dewan Nasional ini adalah pencerminan dari masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana Kabinet Empat Kaki itu adalah pencerminan dari parlemen. Dengan memasukkan unsur-unsur utama dari masyarakat bangsa, maka kedua hal tersebut (Pemerintah dan Dewan Nasional) akan dapat mengambil

⁴² *Ibid*, hal. 325-326; Menurut Dahm, karena kabinet tersebut mengikutsertakan PKI di dalamnya, maka hal itu mendapat tantangan dari berbagai pihak. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa Sukarno sudah menjadi seorang komunis, terutama setelah kunjungannya ke Uni Soviet dan Cina. Meskipun demikian Sukarno tetap berpegang teguh pada Pancasila "sekarang maupun dulu Sukarno tetap masih Sukarno dari 1927". Lihat Bernhard Dahm, *op.cit.*, hal. 405; Mengenai hal tersebut lebih jelasnya periksa Daniel S. Lev, *op.cit.*, hal. 65.

keputusan yang bukan didasarkan kepada penjegalan minoritas oleh mayoritas, tetapi didasarkan kepada musyawarah untuk mufakat.⁴³ Dengan demikian bentuk tersebut akan mendapat dukungan dari segenap bangsa Indonesia.

2. Menuju Revolusi Nasional

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang setelah sekian lama tidak dijadikan sebagai konstitusi Republik Indonesia kini berlaku kembali. Sebagai langkah awal Soekarno sebagai presiden langsung memimpin pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 itu maka Presiden Soekarno tidak lagi hanya sebagai Kepala Negara melainkan ia sekaligus juga sebagai Kepala Pemerintahan. Hal ini merupakan langkah awal dari pelaksanaan sistem yang dikenal dengan nama Demokrasi Terpimpin.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1959 dalam rangka peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno menyampaikan pidatonya. Pidato Presiden Soekarno tersebut diberi judul "*Penemuan Kembali Revolusi Kita*". Dalam pidato itu ia menguraikan ideologi dari Demokrasi Terpimpin yang beberapa waktu kemudian dikenal dengan nama *Manifesto Politik* (Manipol). Sebagai langkah selanjutnya Soekarno menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial dan *retooling* lembaga-lembaga dan organisasi negara demi pelaksanaan revolusi nasional yang berkesinambungan.

⁴³Pandangan-pandangan politik Soekarno itu pada intinya adalah bahwa ia menginginkan/menghendaki supaya bangsa Indonesia tetap utuh. Soekarno mengusahakan untuk memperjuangkan persatuan yang memungkinkan terjalannya kerukunan antara aliran-aliran politik yang saling berlawanan dalam cara berpikir masyarakat Indonesia. Dikutip dari Bernhard Dahm, *op.cit.*

Pada awal tahun 1960 Soekarno kembali menyampaikan keyakinannya (pemikiran politik) untuk menyempurnakan ideologinya. Sebagaimana yang telah disampaikan enam bulan yang lalu tentang Manipol, kali ini ia menambahkan dengan istilah USDEK. USDEK merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme a la Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Nasional. Dalam perkembangannya gagasan Soekarno ini kemudian ditetapkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehubungan dengan hal tersebut Manipol-USDEK sering disebut sebagai kitab suci dari Demokrasi Terpimpin.⁴⁴

Sementara itu Soekarno juga banyak menyampaikan pemikiran-pemikiran politiknya yang dituangkan dalam pidato-pidato amanatnya. Dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1960 dalam rangka peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-15 Soekarno mewujudkan curahan pemikirannya yang begitu menonjol tentang konsep revolusi. Pidato itu berjudul "*Djalannya Revolusi Kita*" (Djarek). Dalam pidato tersebut Soekarno menyatakan:

"Sekarang revolusi kita sudah 15 tahun usianya banyak kesalahan yang kita lakukan. Banyak penyelewengan dan pendurhakaan yang kita derita, tetapi koreksipun demikian kita adakan. Banyak jasa-jasa yang kita kerjakan, dan program Revolusipun kini telah terpapar dalam Manifesto Politik dan USDEK, tetapi jasa-jasa itu sebagai kekuatan tadi adalah sekadar batu loncatan-saja, kepada jasa-jasa yang masih harus berdentam-dentam kita usulkan. Atau hendaklah kamu menjadi bangsa yang „ngglenggem"? Bangsa yang tidak bergerak tetapi *adem-enteng* „*teren op oud roem*"? Bangsa yang *zelfgenoegzaam*? Bangsa yang angler *memetheti* burung perkutut dan minum teh *nastelgi*? Bangsa yang

⁴⁴ Seperti telah diketahui apabila *Manifesto Komunis* merupakan kitab suci bagi kaum Marxis, maka menurut G. Moedjanto Manipol-USDEK boleh disebut kitab suci dari Demokrasi Terpimpin. Lihat G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 Jilid II*, Yogyakarta, Kanisius, 1993, hal. 115.

demikian itu pasti nanti akan hancur lebur terhimpit dalam desak-mendesakkan bangsa-bangsa lain yang berebut-rebut hidup?"⁴⁵

Soekarno lebih mengutamakan perjuangan yang bersifat revolusioner daripada tujuan dari revolusi itu sendiri. Dalam pandangan ini Soekarno menyatakan bahwa revolusi lebih untuk mencapai nilai spiritual daripada mencapai tujuan praktisnya. Oleh karena itu Soekarno berpendapat bahwa revolusi belum selesai.⁴⁶ Sehubungan dengan hal tersebut Soekarno berkata:

"Ada orang-orang di tengah jalan berkata revolusi sudah selesai. Padahal Revolusi belum selesai dan masih berjalan terus, terus, dan sekali lagi terus. Logika revolusioner ialah bahwa; sekali kita mencetuskan revolusi, kita harus meneruskan revolusi itu, sampai segala cita-citanya terlaksana. Ini secara mutlak merupakan hukum revolusi yang tak dapat dielakkan lagi dan tak dapat ditawar-tawar lagi! Karena itu jangan berkata "revolusi sudah selesai" padahal revolusi sedang berjalan..... adapula orang-orang yang..... bertanya; Apakah perlu kita selalu mengobar-ngobarkan saja semangat revolusi?..... Apakah tidak bisa dengan cara yang lebih sabar, apakah tidak bisa dengan cara *alon-alon asal kelakon*? *Amboi! Alon-alon asal kelakon!* Ini tidak mungkin kalau kita tidak mau digilas oleh Rakyat!....."⁴⁷

Sementara itu Soekarno selalu mengemukakan pemikiran-pemikiran politiknya dalam berbagai pidato terutama pidato resmi kenegaraan. Pada tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

⁴⁵ Oedijo (dkk), *op.cit.*, hal. 212.

⁴⁶ Sehubungan dengan pandangannya mengenai konsep revolusi Sukarno berbeda pendapat dengan Moh Hatta. Hatta menganggap Revolusi sudah selesai dengan dicapainya kemerdekaan. Selanjutnya tugas utama kita sesudah itu adalah menumpahkan seluruh perhatian, usaha dan tenaga pada masalah berat yang mendesak yaitu pembangunan ekonomi. Tanpa usaha untuk memecahkan masalah ini tidak akan ada perhatian dalam kehidupan dan kemajuan. Jika revolusi tidak dibendung pada saatnya yang tepat ia akan mengakibatkan kekacauan. Lihat John D. Legge, *op.cit.*, hal. 402; Mengenai perbedaan pandangan antara Soekarno dan Moh Hatta lebih lanjut periksa G. Moedjanto tentang "Dwi Tunggal Soekarno-Hatta" dalam *Kompas*, 9 Agustus 2002, hal. 4 dan 5.

⁴⁷ John D. Legge, *op.cit.*, hal. 403.

Soekarno menyampaikan pidatonya, yang dalam kesempatan itu pidato Soekarno diberi judul "*Membangun Dunia Kembali*".⁴⁸

Dalam setiap peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia Presiden Soekarno selalu menyampaikan pidato amanatnya. Pidato-pidato itu pada intinya merupakan pandangan politik Soekarno untuk selanjutnya dijadikan sebagai doktrin revolusi bagi pemerintahannya. Dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1961 Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul "*Revolusi, Sosialisme a la Indonesia, dan Pimpinan Nasional*" (RESOPIM). Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1962 pidato yang disampaikan Soekarno diberi judul "*Tahun Kemenangan*" (TAKEM). Sedangkan pada tanggal 17 Agustus 1963 Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul "*Genta Suara Revolusi Indonesia*" (GENSURI). Pada tanggal 17 Agustus 1964 dalam rangka peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pula Soekarno membacakan pidatonya yang berjudul "*Tahun Vivere Pericoloso*" (TAVIP) dan lain sebagainya.⁴⁹

Dengan seperangkat doktrin-doktrin revolusi yang berbentuk akronim-akronim itu Soekarno ingin mendorong rakyat Indonesia dalam rangka tugas membangun suatu bangsa yang telah bersatu. Soekarno merasa yakin akan kebesaran nasional dari bangsanya. Dalam pandangan itu Soekarno menghendaki supaya gema revolusi Indonesia berkumandang sampai ke seluruh penjuru dunia.

3. Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM)

Pada awal tahun 1960, dalam usahanya untuk menggalang persatuan

⁴⁸ *Ibid*, hal. 291-399.

⁴⁹ Oedijo dkk, *op.cit.*, hal. 227-263.

nasional, Soekarno memperkenalkan pemikiran baru untuk melengkapi doktrin revolusinya. Doktrin tersebut merupakan sebuah akronim yang dikenal dengan istilah "*Nasakom*". Adapun yang dimaksud dengan Nasakom adalah lambang persatuan atas pencerminan golongan-golongan dalam masyarakat Indonesia. Nasakom adalah jiwa dari kepribadian masyarakat yang berisi tiga kekuatan yang meliputi; Nas adalah golongan nasionalis, A adalah golongan agama, dan Kom adalah golongan yang beraliran komunis.⁵⁰ Doktrin tersebut mengandung arti bahwa ketiga golongan yang dimaksud (nasionalis, agama, dan komunis) akan bersama-sama berperan dalam Pemerintahan Soekarno sehingga akan menghasilkan suatu sistem yang didasarkan pada koalisi kekuatan-kekuatan politik yang ada.

Pada intinya Soekarno sebenarnya ingin menghidupkan kembali pemikirannya yang pernah dikemukakan dahulu pada tahun 1926. Ia tetap yakin bahwa kepentingan golongan Nasionalis, Islam, maupun Marxis dapat sama-sama cocok satu sama lain. Pada saat itu Soekarno merasa yakin akan adanya gerakan nasional yang sangat memerlukan pentingnya suatu identitas nasional yang khusus. Hanya saja di tahun 1960 Soekarno tidak lagi menekankan pentingnya identitas nasional namun ia menghendaki terciptanya kepribadian nasional. Dengan kepribadian nasional itu maka revolusi akan mempunyai arti yang jelas.

Sampai di sini penjelasan mengenai pandangan dan pemikiran politik Soekarno. Dalam bab selanjutnya akan dibahas mengenai pandangan dan pikiran politik Soeharto.

⁵⁰ Cindy Adams, *op.cit.*, hal. 433; Bandingkan dengan M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hal. 406.

BAB III

PANDANGAN DAN PIKIRAN POLITIK SOEHARTO

Soeharto merupakan tokoh yang banyak berperan dalam perkembangan politik di Indonesia khususnya pasca meletusnya Pemberontakan G30S/PKI. Di antara berbagai peran tersebut tentunya salah satu peran besar Soeharto adalah keberhasilannya dalam memimpin penumpasan Pemberontakan G30S/PKI. Tidak dapat dielakkan bahwa Soeharto memang berjasa besar dalam penumpasan Pemberontakan G30S/PKI. Oleh karena jasa-jasanya dan kecerdikannya itulah maka ia kemudian diangkat menjadi Pejabat Presiden dalam Sidang Istimewa MPRS 1967. Berdasarkan Sidang Umum MPRS yang diselenggarakan pada bulan Maret 1968 Soeharto kemudian ditetapkan menjadi presiden penuh Republik Indonesia untuk masa jabatan lima tahun ke depan. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata Soeharto mampu menjadi presiden sampai beberapa kali periode. Di bawah ini akan dibahas pandangan dan pikiran Soeharto yang ditinjau dari aspek politiknya.

Pandangan dan pikiran politik Soeharto yang disampaikan ini pada intinya merupakan visi dan misi seorang pemimpin bangsa (presiden) yang menjangkau masa depan bangsa yang jauh ke depan yang isinya jelas mengandung peringatan supaya belajar dari sejarah kegagalan masa lalu dan sejauh mana pemerintahan Soeharto telah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Soeharto menghimbau dan berharap kepada bangsa Indonesia sebagai generasi penerus supaya seluruh cita-cita, aspirasi, dan gagasan-gagasan dasar

tentang masyarakat Indonesia yang diidam-idamkan yang telah dikembalikan ke atas relnya sejak lahirnya pemerintahan Orde Baru¹ terus dijaga dan dipertahankan serta dikembangkan secara dinamis. Di bawah ini adalah pandangan dan pikiran politik Soeharto yang meliputi:

A. Melaksanakan Demokrasi Pancasila

Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966² merupakan suatu peristiwa yang menandai berawalnya perjuangan Orde Baru dengan memunculkan pimpinan nasional yang baru yaitu Soeharto. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Pemerintahan Orde Baru memperoleh dukungan dari seluruh rakyat Indonesia maupun ABRI. Dalam Pemerintahan Orde Baru inilah Soeharto berusaha untuk mengoreksi kesalahan dan penyelewengan serta penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dengan perkataan lain Soeharto ingin melaksanakan koreksi secara total dan kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 4 Mei 1966 beberapa partai politik dan organisasi massa menandatangani piagam pembentukan Front Pancasila yang akan dijadikan wadah persatuan dan kesatuan rakyat pendukung Pancasila dan UUD 1945. Adapun partai-partai dan organisasi-organisasi massa

¹ Penggunaan istilah Orde Baru ini didasarkan atas periodisasi yang dipakai dalam Sejarah Indonesia. Istilah Orde sering dipakai untuk membedakan masa Pemerintahan Presiden Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya (Orde Lama) yang berlangsung antara tahun 1959-1966, sedangkan Orde Baru adalah suatu masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berlangsung antara tahun 1966-1998. Selain itu penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk mempertegas garis pemisah masa komunisme bebas berkembang di Indonesia dan masa komunisme dilarang berkembang di Indonesia.

² Periksa Mangil Martowidjojo, *Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967*, Jakarta, Grasindo, 1999, hal. 421-426. Bandingkan dengan Soeharto, G. Dwipayana, dan Ramadhan K. H., *Soeharto: Pikiran Ucahan dan Tindakan Saya Otobiografi*, Jakarta, PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, hal. 171-174.

yang tergabung dalam Front Pancasila adalah; NU, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), Perti (Partai Persatuan Tarbiyah-Islamiah Indonesia), Muhammadiyah, dan SOKSI (Serikat Organisasi Karya Seluruh Indonesia). Bersama-sama dengan kesatuan-kesatuan aksi lainnya Front Pancasila muncul sebagai kekuatan besar pendukung Orde Baru dan memelopori tuntutan yang lebih luas yang menyangkut penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.³

Berdasarkan tekad itulah maka tema pokok perjuangan Orde Baru dibakukan yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Perjuangan Orde Baru diberi landasan yang kuat baik secara ideologis-konstitusional. Sebagai landasan ideologi adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945 sedangkan sikap mental yang menjadi landasan perjuangan Orde Baru adalah kemurnian pengabdian kepada kepentingan rakyat banyak.⁴ Sikap ini segera tercermin dalam kabinet yang baru yang dipimpin oleh Soeharto yang diberi nama Kabinet Ampera.

Tekad perjuangan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dicetuskan dalam diskusi-diskusi dan seminar beberapa waktu kemudian. Dalam bulan Mei 1966 Universitas Indonesia dalam kerja sama dengan KAMI dan KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) menyelenggarakan simposium. Dalam simposium tersebut dibahas mengenai permasalahan yang

³ Dikutip dari Nugroho Notosusanto (Ed), *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1985, hal. 27.

⁴ Abdul Gafur, *Pak Harto Pandangan dan Harapannya*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1987, hal. 268-269.

meliputi bidang politik dalam negeri, bidang ekonomi dan lain sebagainya. Di dalam bidang politik dalam simposium itu diajukan saran-saran kepada pemerintah untuk menegakkan kembali kewibawaan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.⁵

Meskipun belum secara eksplisit istilah Demokrasi Pancasila digunakan untuk menggambarkan sistem demokrasi dalam suatu negara hukum, namun apa yang dibahas dalam simposium itu adalah esensinya demokrasi dalam suatu negara bangsa yang berlandaskan Pancasila. Istilah Demokrasi Pancasila baru muncul dalam pembahasan ilmiah melalui Seminar II Angkatan Darat dalam bulan Agustus tahun yang sama.⁶ Dalam seminar itu telah dirumuskan dasar-dasar Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menegakkan kembali azas-azas negara hukum. Azas Demokrasi Pancasila adalah mengikutsertakan semua golongan yang mempunyai kepentingan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan jalan musyawarah mencapai mufakat.

Konsep-konsep pemikiran mengenai Demokrasi Pancasila yang dihasilkan oleh Seminar II Angkatan Darat menjadi masukan yang sangat penting bagi upaya pelaksanaan program Kabinet Ampera. Kabinet ini dibentuk oleh Soeharto dalam suasana negara yang belum stabil dalam segala aspek kehidupan. Demikian pula tugas pemerintah untuk melaksanakan Pemilu tahun 1968, sebagai sarana pelaksanaan Demokrasi Pancasila terpaksa tidak dapat dilakukan meskipun

⁵ Nugroho Notosusanto (Ed), *op.cit.*, hal. 28-29.

⁶ *Ibid*, hal. 30.

sudah diperintahkan oleh MPRS sejak tahun 1966. Kendati demikian Soeharto tetap berusaha untuk melaksanakan tugas kabinetnya yaitu memulihkan kembali stabilitas politik dan ekonomi nasional.⁷

Dalam membangun dan mengembangkan Demokrasi Pancasila yang penuh dengan kesulitan dan cobaan itu, dua belas tahun kemudian digambarkan kembali oleh Soeharto dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1978.

Soeharto menyatakan dalam pidatonya yakni:

"Kita kembali sadar bahwa penyelewengan dari falsafah dan ideologi, Pancasila dan UUD 1945 hanya akan membawa kita kejurang kehancuran. Dan kita pun kembali bertekad untuk kembali ke pangkalan cita-cita perjuangan bangsa kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Tekad itulah yang menjiwai kelahiran dan perjuangan Orde Baru."⁸

Sejak langkah-langkah yang diambil oleh Soeharto untuk membangun sistem demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang mempunyai ciri khas seperti yang telah dikemukakan, maka sambil menengok sekilas perjalanan Orde Baru yang telah berlangsung selama 12 tahun dan setelah dua kali diselenggarakan Pemilu yaitu pada tahun 1971 dan 1977 yang telah berlangsung berdasarkan semangat Demokrasi Pancasila, maka Soeharto kembali mengemukakan pandangannya yakni:

"Demokrasi Pancasila tidak lain adalah Demokrasi yang di dasarkan atas falsafah dan Ideologi Pancasila, demokrasi yang kita pandang sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa kita, demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Demokrasi yang mengutamakan isi dan tujuan maupun cara-cara untuk mencapai tujuan. Akan tetapi seperti berulang kali saya katakan bahwa demokrasi bukanlah barang jadi. Mewujudkan demokrasi tidaklah bisa satu malam *judi*. Demokrasi adalah suatu proses yang melakukan pembinaan terus-menerus."⁹

⁷ Soeharto, G. Dwipayana, dan Ramadhan K.H., *op.cit.*, hal. 423; Bandingkan dengan Abdul Gafur, *op.cit.*, hal. 270.

⁸ *Ibid*, hal. 271.

⁹ *Ibid*, hal. 272.

Lebih lanjut Soeharto menerangkan bahwa:

"Pada intinya demokrasi adalah keselarasan. Demokrasi memang dimaksudkan sebagai suatu sistem dan sekaligus mekanisme yang menampung dan menyalurkan perbedaan-perbedaan sehingga tidak menyebabkan tabrakan satu sama lain di antara golongan-golongan masyarakat yang berbeda pendapat. Apalagi dengan Demokrasi Pancasila yang sedang kita kembangkan, yang jelas-jelas tidak berdasarkan paham individualisme melainkan paham kekeluargaan dan kegotong-royongan. Dengan demikian, kita tidak menganggap kebebasan individu bersifat mutlak melainkan, selalu harus diselaraskan dengan tanggungjawab sosial. Di dalam kebebasan itu harus selalu melekat dengan sendirinya tanggungjawab terhadap kepentingan umum dan kepentingan bersama."¹⁰

Selama kurang lebih 12 tahun dan sejak masa Kabinet Ampera sampai dengan Kabinet Pembangunan II, pembangunan Demokrasi Pancasila makin berhasil memberikan dan menciptakan iklim politik yang stabil dan dinamis. Demokrasi yang intinya adalah musyawarah mencapai mufakat dan digelorakan oleh semangat kekeluargaan ini oleh Soeharto diberikan resep jaminan bahwa:

"Dalam sistem dan mekanisme Demokrasi Pancasila tidak akan terjadi dominasi mayoritas maupun tirani minoritas, sebab konsep mayoritas dan minoritas tidak selaras dengan semangat kekeluargaan."¹¹

Setelah melampaui berbagai macam rintangan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto boleh bangga akan hasil ketekunan dan kesabarannya yaitu membangun suatu sistem demokrasi yang benar-benar berakar dari gagasan dan pergaulan hidup kekeluargaan. Hal ini terbukti dalam kegiatan politik praktis, sistem ini mampu meningkatkan kesadaran politik rakyat dalam dasawarsa terakhir. Adapun salah satu sarana untuk membuktikan suatu sistem politik yang diyakini benar dan didukung sepenuhnya oleh rakyat adalah Pemilu.

¹⁰ *Ibid*, hal. 273.

¹¹ *Ibid*, hal. 276.

Semenjak dibangun kembali dan dikembangkan oleh Soeharto, Demokrasi Pancasila secara pelan tapi pasti tumbuh dan berkembang. Dalam pertumbuhan dan perkembangan tersebut pada gilirannya membawa bangsa Indonesia untuk berkesimpulan, bahwa pembangunan Demokrasi Pancasila sebagai bagian yang amat penting dalam pembangunan politik telah berhasil mencapai sasarannya. Hal ini merupakan sumbangan besar terhadap pengembangan sistem Demokrasi Pancasila pada masa datang.

B. Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Pada bulan Desember 1974 di hadapan Civitas Akademika Universitas Gajah Mada yang sedang merayakan Dies Natalisnya yang ke-25 Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidatonya. Dalam pidato tersebut, Soeharto mengemukakan pandangan-pandangannya yang antara lain tentang falsafah negara yaitu Pancasila. Di hadapan para ilmuwan dan mahasiswa Soeharto mengajak mereka untuk memikirkan bersama mengenai penghayatan dan penjabaran Pancasila agar dapat dimengerti, diamalkan, dan memberi wujud yang nyata dalam segala segi kehidupan dan tingkah laku sehari-hari. Sehubungan dengan hal itu Soeharto mengemukakan bahwa:

"Pancasila adalah milik kita. Kita telah memilikinya tetapi baru merasa memiliki, belum memahami atau menghayati apa yang sebenarnya Pancasila itu."¹²

¹² *Ibid*, hal. 278.

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tentang kerukunan umat beragama sehingga memungkinkan pendekatan pemimpin dan pemuka-pemuka agama dalam merumuskan kebijaksanaan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya Soeharto menyatakan bahwa:

"Dalam masyarakat berdasarkan Pancasila yang mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa, maka takwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah mutlak. Semua agama menghargai manusia dan karena itu semua umat beragama juga wajib saling harga-menghargai. Ini juga mengandung arti kewajiban di antara umat beragama untuk saling menghormati agama dan ibadah agama serta kepercayaannya yang dianut."¹⁵

Mencermati pandangan dan pikiran Soeharto yang disampaikan kepada Civitas Akademika Universitas Indonesia pada intinya ia telah membulatkan pandangannya yang amat mendasar mengenai butir-butir mutiara Pancasila. Seperti yang telah dijabarkan melalui pidato-pidato dalam forum sebelumnya, sebagai pemimpin bangsa yang berwawasan ke depan dan berguru pada pengalaman dan sejarah perkembangan Pancasila ia telah membulatkan tekad untuk menghindarkan bangsanya dari perbedaan pengertian dan tafsiran terhadap Pancasila. Seperti telah diketahui di masa lalu hal ini telah mengakibatkan perselisihan dan pertentangan yang hampir memecah persatuan bangsa.

Pada tahun 1976 di depan Forum Musyawarah Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta Soeharto menyampaikan pidato yang berjudul: "*Pedoman Penghayatan dan Penjabaran Pancasila*"(P4). Hal ini merupakan tindak lanjut dari uraian-uraian sebelumnya mengenai bagaimana Pancasila dijabarkan. Dalam kesempatan ini Soeharto berkata:

¹⁵ Abdul Gafur, *op.cit.*, hal. 112.

"Dalam usaha merumuskan Pedoman Penghayatan dan Penjabaran Pancasila ini, kita harus tetap membatasi diri pada isinya yang tetap tidak berubah. Ini penting kita perhatikan sebab Pancasila itu harus kita amalkan secara kreatif. Dengan Pedoman Pengamalan dan Penjabaran Pancasila yang lebih jelas dan sederhana yang dapat menggugah semangat dan memberi harapan, maka kita akan memiliki pengertian dan keyakinan. Dengan pengertian dan keyakinan yang kita amalkan, maka akan mantaplah Pancasila yang secara konstitusional tidak perlu dipersoalkan lagi."¹⁶

Selain menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai Pedoman Penghayatan dan Penjabaran Pancasila, Soeharto juga memberikan nama pedoman tersebut dengan "*Eka Prasetya Panca Karsa*". Adapun arti dari *Eka Prasetya Panca Karsa* adalah janji pada dirinya sendiri dengan segala keberanian dan kemampuan selalu berusaha mengendalikan kepentingan pribadinya guna memenuhi kewajibannya sebagai mahluk sosial dalam mewujudkan kehidupan Pancasila (*eka prasetya*), sedangkan *panca karsa* adalah keinginan untuk menghayati dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila oleh *karsa* pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan *prasetya yang tunggal* sebagai dasar pokok melaksanakan Pancasila, dan *karsa pribadi* menghayati dan mengamalkan lima sila dari Pancasila, yang kemudian Soeharto menyebutnya dengan "*Eka Prasetya Panca Karsa*".¹⁷

Pada tanggal 1 Oktober 1977 dalam upacara pengambilan sumpah/janji para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawarah Rakyat (MPR) Soeharto menyampaikan dua bahan pertimbangan mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan yang kedua adalah bahan pertimbangan

¹⁶ *Ibid*, hal. 113.

¹⁷ *Ibid*, hal. 118-119; Mengenai penggerakan dan pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Penjabaran Pancasila (P4) periksa Soeharto, G. Dwipayana, dan Ramadhan K H., *op.cit.*, hal. 336-338.

tentang "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila". Menurut Soeharto ada beberapa alasan yang kuat mengapa ia menganggap perlu untuk menyampaikan bahan-bahan pertimbangan itu. Sebagaimana apa yang telah dikemukakan dalam pidatonya pada hari itu bahwa hal itu tidak dapat dilepaskan dari langkah usaha yang sungguh-sungguh untuk mensukseskan tugas Majelis yang akan bersidang dalam bulan Maret 1978 mendatang. Mengenai bahan pertimbangan Soeharto yang kedua yakni tentang P4, ia menyimpulkan bahwa:

"Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang akan diputuskan oleh MPR, apabila terlaksana merupakan pedoman yang sangat penting, dan akan memperlancar usaha pembinaan dan pembimbingan sikap dasar tingkah laku kita yang dijiwai berdasarkan moral Pancasila. Pedoman tersebut juga akan merupakan bahan penting bagi lingkungan-lingkungan pendidikan di sekolah dalam rangka memberikan pendidikan moral Pancasila, yang sangat penting bagi pembinaan watak dan sikap generasi muda yang menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila."¹⁸

Sementara itu dalam bulan Maret 1978 dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dan sungguh-sungguh dari seluruh wakil rakyat Indonesia dan dengan suara bulat akhirnya mereka sepakat menetapkan sebagai Ketetapan Majelis di samping sudah barang tentu GBHN yang memang adalah tugas pokok MPR untuk menetapkannya.¹⁹

Pada tanggal 1 Oktober 1978 sebagai Presiden Republik Indonesia Soeharto secara resmi membuka Penataran P4 yang diselenggarakan di Istana Bogor. Soeharto memilih Istana Bogor guna mengawali satu gerakan raksasa dalam rangka memahami kembali dan menghayati serta mengamalkan gagasan-

¹⁸ Abdul Gafur, *op.cit.*, hal.121.

¹⁹ Ketetapan tersebut dalam perkembangannya menjadi Ketetapan MPR No.II/MPR/1978. Periksa Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 514.

gagasan mengenai masyarakat yang oleh bangsa ini dicita-citakan.²⁰ Istana Bogor dibangun dalam jaman penjajahan dan menyimpan banyak catatan-catatan penting dari peristiwa sejarah.

Dalam acara yang diselenggarakan di Istana Bogor tersebut Soeharto menyampaikan pidatonya yang di antaranya menyatakan:

"Pancasila tidak lain adalah memang jiwa bangsa Indonesia. Sama halnya dengan kita semua yang akan mati-matian bertahan terhadap orang lain, yang akan merengut jiwa kita, maka jiwa bangsa Indonesia juga mati-matian akan melawan kekuatan manapun yang akan merengut Pancasila dari jiwa bangsa Indonesia."²¹

Selanjutnya Soeharto mengingatkan:

"Namun demikian mempertahankan Pancasila sama sekali tidak berarti hanya mengucapkan kesetiaan kepada Pancasila itu. Biar seribu kali sehari mengucapkan kesetiaan kepada Pancasila, tetapi apabila Pancasila itu tidak kita amalkan maka sama saja, kita tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu Pancasila harus dihayati. Dan untuk menghayati maka Pancasila itu harus dimengerti, di dalam, dan diresapi bukan hanya diterima dengan akal tetapi harus diyakini dalam hati."²²

Dengan dasar dan pegangan yang kuat yaitu P4, Soeharto menyerukan dan berharap agar Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Ia menambahkan bahwa orang akan sulit menghayati dan memahami Pancasila apabila hanya sebatas dengan menghafalkan sila-silanya seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Adalah sungguh membingungkan setiap warga negara Republik Indonesia kalau Pancasila ditafsirkan menurut kepentingan dan selera golongan-golongan dalam masyarakat seperti yang telah terjadi pada masa lalu. Untuk itu koreksi dan

²⁰ Penataran yang diselenggarakan di Istana Bogor tersebut merupakan penataran tingkat nasional.

²¹ Abdul Gafur, *op.cit.*, hal. 102.

²² *Ibid*, hal. 103.

pembaharuan yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru tidak lain adalah meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan dan mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.²³

Tersusunnya P4 yang merupakan hasil dari keputusan MPR dalam sidang itu jelas merupakan satu pencapaian besar yang merupakan satu perwujudan nyata dari tekad pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan kemurnian Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen. Sedangkan dalam pidato Soeharto yang dilakukan di Istana Bogor tersebut merupakan pengejawantahan dari pandangannya terhadap Pancasila yang sudah lama tertanam dalam hati yang pengungkapannya kali ini lebih pada satu konsep ideologi nasional yang memberikan semangat pada para pendahulu yang merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam berbagai kesempatan Soeharto selalu mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa:

"Pancasila mempunyai akar yang dalam di bumi Indonesia, lahir dan tumbuh dalam sejarah dan kebudayaan kita"..... "dan kebudayaan yang tua itulah yang telah membentuk pandangan hidup bangsa kita."²⁴

C. Pancasila sebagai Satu-satunya Azas (Azas Tunggal)

Seperti telah diketahui apabila Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan satu karya besar dari pikiran Soeharto, maka Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baru dapat dirumuskan dalam GBHN tahun 1983 adalah suatu keberhasilan Soeharto yang menentukan kehidupan bermasyarakat dan berpolitik.

²³ Lihat Soeharto, G. Dwipayana, dan Ramadhan K.H., *op.cit.*, hal. 410.

²⁴ Abdul Gafur, *op.cit.*, hal. 139.

Tidak jauh berbeda dengan P4 yang telah berproses selama kurang lebih lima tahun, maka Pancasila sebagai satu-satunya azas untuk mencapai finalisasinya juga akan memakan waktu yang lama pula. Hal ini merupakan keputusan nasional yang menurut Soeharto adalah sangat penting dan mendasar.²⁵

Soeharto menegaskan bahwa pemerintahannya ingin melaksanakan koreksi secara total dan kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas. Hal ini khususnya berlaku bagi partai-partai politik yang ada.

Bertolak dari konsekuensi inilah partai-partai politik dapat lebih disederhanakan jumlahnya dengan menggunakan (sesuai dengan) jalan pikiran Soeharto. Dengan Pancasila sebagai satu-satunya azas maka partai-partai tinggal melaksanakan program-program demi tercapainya tujuan yang dikehendaki bagi kehidupan rakyat. Kehidupan rakyat Indonesia yang harus diperjuangkan adalah kehidupan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan akhirat.²⁶

Mula-mula Soeharto merintis untuk melakukan penyederhanaan kehidupan kepartaian di Indonesia yang diamanatkan oleh MPRS tahun 1966 dan MPRS tahun 1968. Diakui bahwa langkah tersebut memang tidak semudah seperti yang telah diharapkan. Kenyataan terbukti bagaimana alot dan rumit jalannya musyawarah dengan pemimpin-pemimpin sembilan partai politik waktu itu.²⁷ Kendati demikian dasar argumentasi yang digunakan oleh Soeharto adalah

²⁵ Soeharto, G. Dwipayana, dan Ramadhan K.H., *op.cit.*, hal. 408

²⁶ Abdul Gafur, *op.cit.*, hal. 156

²⁷ Periksa Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 155

tekad dari perjuangan Orde Baru yaitu memperjuangkan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepada para pemimpin partai, Soeharto menghimbau agar kembali kepada tekad Orde Baru tersebut. Seperti yang sering dikatakan Soeharto bahwa:

"Orde Baru ingin melaksanakan koreksi secara total dan kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945."²⁸

Dalam perkembangan selanjutnya jalan pikiran dan pendekatan yang digunakan oleh Soeharto tersebut ternyata menarik perhatian para pemimpin dari sembilan partai politik. Akhirnya tercapailah konsensus untuk berhimpun dalam material-spiritual dan spiritual-material. Partai Katolik dan Parkindo mengambil keputusan bergabung dengan PNI, IPKI, dan Murba dalam kelompok material-spiritual, sedangkan NU, Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), PSII, dan Perti berhimpun dalam kelompok spiritual tanpa meninggalkan material. Selanjutnya mengenai Golkar (Golongan Karya) dan ABRI Soeharto menguraikan bahwa sebagai kekuatan fungsional, Golkar yang secara mutlak berdiri di atas dasar Pancasila harus selalu memperjuangkan programnya dalam pembangunan bangsa secara seimbang material-spiritual dan spiritual-material. Sedangkan ABRI menurut Soeharto sebagai kekuatan stabilisator dan dinamisator, dengan dwi fungsinya harus tampil secara *Tut Wuri Handayani* kepada ketiga kekuatan sosial politik itu.²⁹

Dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun 1971 Golkar yang relatif berusia muda dan merupakan satu himpunan dari bermacam-macam

²⁸ Abdul Gafur, *op.cit.*, hal. 156.

²⁹ *Ibid.*

organisasi profesi dan fungsional keluar sebagai pemenang. Kemenangan Golkar itu dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merealisasi tekad perjuangannya yaitu mengajak kembali pemimpin-pemimpin partai politik untuk setia kepada konsensus semula yakni menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas (ideologi) dan penyederhanaan kepartaian. Langkah Soeharto ini membuahkan hasil satu langkah ke arah penyederhanaan dengan terciptanya fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu yang antara lain meliputi Fraksi Persatuan Pembangunan (PNU, Parmusi, PSII, dan Perti), Fraksi Demokrasi Indonesia (PNI, IPKI, Partai Katolik, Parkindo, dan Murba), Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) dan Fraksi ABRI. Kedudukan kelompok dalam bentuk fraksi-fraksi ini meskipun belum dikukuhkan dengan Undang-Undang namun mantap hingga berlangsungnya Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1973, yang merupakan peristiwa penting dalam Sejarah Republik Indonesia.³⁰

Sementara itu Sidang Umum MPR yang pertama diadakan dalam bulan Maret 1973. Dalam sidang tersebut Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden/Mandataris MPR dan sebagai Wakil Presiden dipilih Sri Sultan Hamengku Buwono IX.³¹ Selain itu MPR juga menugaskan kembali kepada Presiden Soeharto untuk melanjutkan upaya penyederhanaan kepartaian. Penyederhanaan kepartaian tersebut sesuai dengan pola pengelompokan yang telah disepakati bersama dan harus selesai seluruhnya sebelum Pemilu 1977.³²

³⁰ *Ibid*, hal. 157.

³¹ Mengenai keputusan-keputusan Sidang Umum MPR 1973 lihat G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20 Jilid II*, Yogyakarta, Kanisius, 1993, hal. 156.

³² Abdul Gafur, *op.cit.*, hal. 157-158.

Berdasarkan tugas yang diberikan oleh MPR itu maka Soeharto kemudian memberikan garis rencana sampai tahun 1975 untuk terakhir harus sudah selesai proses penyederhanaan itu. Akhirnya setelah DPR menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang partai politik dan Golkar, kemudian berlangsung pembahasan dan perdebatan sesuai dengan aturan dan tata tertib dari DPR itu. Proses tersebut berlangsung alot dan memakan waktu sampai berbulan-bulan. Kendati demikian akhirnya dapat dicapai kesepakatan yang tidak bulat terutama yang menyangkut azas Pancasila. Meskipun Undang-Undang yang mengatur kehidupan Partai dan Golkar akhirnya dapat disahkan sebagai Undang-Undang, namun banyak pihak yang tidak puas. Sehubungan dengan hal tersebut Soeharto menyatakan bahwa pihaknya sangat tidak puas dengan keputusan itu.³³

Soeharto menambahkan bahwa sudah begitu lama masalah itu dibicarakan, bahkan sejak tahap-tahap awal pemerintahannya antara dirinya dengan para pemimpin partai dan telah sepakat mengenai penyederhanaan partai, dan Pancasila sebagai satu-satunya azas, namun realisasinya selalu tidak utuh. Dalam Pemilu 1971 jumlah partai tetap saja yaitu sembilan. Sedangkan dalam tahun 1975, dengan lahirnya Undang-Undang Kepartaian jumlah partai menjadi dua dari sembilan partai dan satu Golkar, namun Pancasila sebagai satu-satunya azas, diterima bukan sebagai satu-satunya, karena masih ada embel-embel azas ciri.³⁴ Sejalan dengan hal itu Soeharto secara tegas menyatakan tidak sependapat. Soeharto menjelaskan mengenai akibat yang ditimbulkan dikemudian hari apabila

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

di samping menerima Pancasila sebagai azas, masih ada azas ciri. Hal ini dikhawatirkan oleh Soeharto akan kekuatan-kekuatan ekstrim yang selalu saja akan memanipulir azas ciri itu untuk membangkitkan sentimen-sentimen keagamaan.

Dalam Sidang Umum MPR yang diselenggarakan tahun 1983, akhirnya secara bulat ditetapkan azas bagi Partai Politik dan Golongan Karya tidak memakai (tanpa embel-embel) azas ciri lagi. Ketetapan tersebut kemudian dicantumkan dalam GBHN hasil Sidang Umum MPR tahun 1983. Berdasarkan ketetapan inilah DPR kemudian membuat Undang-Undang yang meninjau Undang-Undang Kepartaian yang telah ada.³⁵

Akhirnya lahirlah Undang-Undang No.III tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang secara tuntas menyelesaikan satu masalah bangsa yang krusial dan sudah bertahun-tahun. Hal ini tidak lepas dari jasa besar Soeharto yang telah menuangkan pandangan dan pikiran yang terwujud dalam tekad perjuangannya yaitu ingin melaksanakan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam tahun itu juga sekaligus disusun Undang-Undang tentang organisasi sosial kemasyarakatan yang juga menegaskan keharusan Pancasila sebagai azas tunggal yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.³⁶

³⁵ *Ibid*, hal. 158-159.

³⁶ *Ibid*.

Demikianlah pembahasan mengenai pandangan dan pikiran politik Soeharto. Dalam bab berikutnya akan dijelaskan tentang sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno.



BAB IV

SIKAP DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SOEHARTO TERHADAP SOEKARNO

Dalam Sidang Umum MPRS yang diselenggarakan tahun 1966 Presiden Soekarno selaku Mandataris MPRS diminta memberi laporan pertanggungjawaban atas terjadinya Pemberontakan G30S/PKI, kemunduran ekonomi dan kemerosotan moral. Presiden Soekarno memenuhi permintaan MPRS tersebut dalam pidatonya yang disampaikan pada tanggal 22 Juni 1966. Pidato presiden di depan Sidang Umum MPRS itu diberi judul "*Nawaksara*".

Sidang Umum MPRS ternyata kurang puas dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Soekarno karena isinya cenderung kepada memberi amanat, sebagaimana seperti biasa ia lakukan dihadapan sidang-sidang lembaga yang berada dalam lingkungan tanggungjawabnya. Satu hal yang menjadi sangat penting adalah bahwa Presiden Soekarno tetap tidak mau mengutuk Pemberontakan G30S/PKI dan memberi keterangan tentang sebab-sebab kemunduran ekonomi dan kemerosotan moral. Oleh karena itu Sidang Umum MPRS meminta kepada Presiden Soekarno bersedia memberi pelengkap atas pidatonya.

Pada tanggal 10 Januari 1966 akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan naskah pelengkap yang dimaksud untuk melengkapi pidato pertanggungjawabannya. Naskah pelengkap itu diberi judul "*Pel Nawaksara*". Pelengkap *Nawaksara* ini ternyata tidak memuaskan MPRS karena isinya lebih

merupakan pengecilan tanggungjawab daripada pertanggungjawab.¹ Hal ini mendapat tanggapan dari seluruh rakyat yang sebagian besar mereka menyatakan tidak puas.

Sehubungan dengan masalah Pei *Nawaksara* dan bertambah gawatnya situasi konflik maka, pada tanggal 9 Februari 1967 DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS supaya segera menyelenggarakan Sidang Istimewa selambat-lambatnya bulan Maret 1967 dan meminta kepada Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 untuk memberikan keterangan tentang hubungan Presiden Soekarno dengan Pemberontakan G30S/PKI.² Oleh karena itu maka pada tanggal 7 Maret 1967 diselenggarakanlah Sidang Istimewa MPRS. Beranjak dari pelaksanaan Sidang Istimewa MPRS tersebut di bawah ini akan dibahas tentang sikap dan kebijakan pra-Pemerintahan Soeharto terbentuk

¹ Berdasarkan penilaian Presiden Soekarno sebab-sebab terjadinya Pemberontakan G30S adalah:

- 1) Keblingernya pemimpin-pemimpin PKI;
- 2) Lihainya *Neo-Kolonialisme* dan *Imperialisme (Nekolim)*,
- 3) Adanya oknum-oknum yang tidak benar.

Dikutip dari Manai Sophiaan, *Kehormatan Bagi Yang Berhak*, Jakarta, Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1994, hal 16 dan 79; Dalam versi lain menurut Asvi Marwan Adam, berdasarkan penilaian dari berbagai buku yang pernah terbit mengenai peristiwa Pemberontakan G30S di seluruh dunia, paling sedikit ada lima versi lainnya yang juga patut dipertimbangkan sebagai dalang dari peristiwa tersebut, yaitu; 1) Sebuah Klik Angkatan Darat (*Cornell Paper*, Wertheim), 2) *Central Intelligence Agency* (CIA)/Pemerintah Amerika Serikat (Peter Dale Scott, G. Robinson), 3) Presiden Soekarno (John Hughes, Antonie Dake), 4) Oknum PKI (tim Institut Studi Arus Informasi), 5) Tidak ada pelaku tunggal (Nawaksara Manai Sophiaan dalam *footnote* di atas). Lihat " *Pengendalian Sejarah Sejak Orde Baru*" dalam Henry Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambari (Editor), *Panggung Sejarah, Persembahan Kepada Prof. Dr. Danys Lombart*, Ecole Francaise, d'Extreme-Orient, Jakarta, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Yayasan Obor Indonesia, 1999, hal. 573-577; Lebih lanjut mengenai uraian tersebut periksa Asvi Warman Adam dalam "Berbagai Kisah G30S", *Kompas*, 30 September 2002, hal. 4.

²Dikutip dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, Sidang Istimewa Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara pada tahun 1967, Jakarta, Penerbitan MPRS No.6, 1967, hal. 12-18; Bandingkan dengan G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 Jilid II*, Yogyakarta, Kanisius, 1993, hal. 149.

terhadap Soekarno khususnya mengenai hubungannya dengan Pemberontakan G30S/PKI.

A. Sikap dan Kebijakan Politik Pra-Pemerintahan Soeharto terbentuk terhadap Soekarno sehubungan dengan Pemberontakan G30S/PKI

Dalam Sidang Istimewa MPRS yang diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 1967 Jenderal Soeharto selaku Pangkopkamtib sekaligus pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 memberikan laporan (keterangan) tentang hubungan Presiden Soekarno dengan peristiwa Pemberontakan G30S/PKI. Walaupun Jenderal Soeharto pada saat itu belum bisa dikatakan sebagai seorang yang sudah memimpin/menjalankan pemerintahan, tetapi ia sudah mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Dengan kata lain secara *de facto* Jenderal Soeharto mempunyai pengaruh besar dalam pemerintahan walaupun secara *de jure* ia belum berkuasa.

Sebagai langkah awal Jenderal Soeharto menyampaikan keterangan tentang rangkaian fakta-fakta mengenai sikap dan perbuatan Presiden Soekarno yang berhubungan dengan Peristiwa G30S/PKI. Fakta-fakta itu didasarkan oleh sikap dan tindakan Presiden Soekarno yang dilakukan sekitar tanggal 1 Oktober 1965 yang langsung ada hubungannya dengan peristiwa G30S/PKI. Dalam keterangan itu Jenderal Soeharto mengatakan:

"Di dalam menyajikan fakta-fakta, tindakan serta sikap Presiden yang bertitik pusat pada tanggal 1 Oktober 1965, diungkapkan rangkaian kejadian yang mendahului maupun apa yang terjadi sesudah tanggal tersebut, agar dapat diperoleh gambaran yang cukup jelas bahwa kegiatan

presiden pada hari itu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudahnya."³

Selain itu Jenderal Soeharto juga menyampaikan fakta-fakta dalam *epilog* G30S/PKI yang berhubungan dengan peristiwa G30S/PKI. Dalam bagian ini Jenderal Soeharto menyatakan bahwa masih banyak tindakan atau sikap Presiden Soekarno yang kurang dapat dimengerti atau bahkan menimbulkan prasangka curiga terhadap presiden karena seolah-olah ia membela dan menguntungkan G30S/PKI. Hal ini terbukti dari berbagai fakta yang didapatkan dalam bentuk pidato atau ucapan Presiden Soekarno yang tidak tegas menyalahkan PKI dan sebaliknya justru menguntungkan kelompok itu. Selanjutnya Jenderal Soeharto mengatakan:

"Dalam pidato Presiden Soekarno pada tanggal 13 Desember 1965 itu beliau berkata; tetapi hendaknya para Gubernur tetap mendasarkan kewajibannya demi pengabdianya kepada rakyat Negara dan Revolusi. Kita semua adalah anak-anak revolusi, dan anak-anak revolusi harus setia kepada induknya, sebab kalau tidak anak itu sendiri akan dimakan oleh induknya."⁴

Kemudian Jenderal Soeharto menambahkan:

"Pada tanggal 21 Desember 1965, dalam pidatonya Presiden Soekarno mengatakan bahwa..... Gestoknya harus kita hantam, tetapi komunisnya tidak bisa, karena ajaran komunis itu adalah hasil keadaan obyektif dalam masyarakat Indonesia seperti halnya nasionalis dan agama..... Dan Nasakom telah kutulis sejak aku berumur 25 tahun dalam tahun 1926, dan ini akan kupegang teguh sampai aku masuk ke liang kubur."⁵

Jenderal Soeharto selanjutnya mengatakan bahwa:

³ Lebih jelasnya mengenai rangkaian fakta-fakta itu lihat Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, *op.cit.*, hal. 47-56.

⁴ *Ibid*, hal. 57.

⁵ Gestok adalah akronim dari Gerakan 1 Oktober. Presiden Soekarno lebih sering menggunakan istilah ini daripada istilah Gerakan 30 September. Gerakan 30 September atau G30S sering pula disebut dengan istilah Gestapu (Gerakan September 30). Periksa G. Moedjanto, *Indonesia Jilid II.....op.cit.*, hal. 142.

"Selain beberapa hal di atas masih ada tindakan atau kebijaksanaan yang bersifat melindungi tokoh-tokoh G30S/PKI. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi: Pembentukan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan, yang terkenal dengan nama Kabinet 100 Menteri, dimana orang-orang yang tegas-tegas anti PKI tidak didudukkan di dalamnya, sedangkan orang-orang yang mendukung PKI atau yang disangsikan iktikad baiknya justru didudukkan dalam kabinet."⁶

Sesudah Jenderal Soeharto memberikan serangkaian fakta-fakta dan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pribadi Presiden Soekarno dalam rangkaian peristiwa Pemberontakan G30S/PKI selanjutnya ia mengemukakan bahwa penilaian sampai dimana kesalahan Presiden Soekarno atau sampai sedalam mana ia tersangkut dalam peristiwa G30S/PKI adalah terutama persoalan hukum.⁷ Sehubungan dengan hal tersebut Jenderal Soeharto mengajak kepada Sidang Istimewa untuk meninjau dan menghubungkan fakta-fakta itu dengan sewajarnya dan sejujur-jujurnya serta obyektif. Selanjutnya Jenderal Soeharto berkata:

"Kami sendiripun bukan sarjana atau ahli hukum; maka apabila kami memberikan penilaian hukum terhadap rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno itu akan lebih banyak didasarkan kepada rasa kesadaran hukum kami, yang dilandasi oleh rasa moral keadilan dan kebenaran daripada didasarkan pada ilmu-pengetahuan hukum dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku (hukum positif)."⁸

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh, Jenderal Soeharto kemudian menyatakan bahwa timbul suatu masalah atau pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab mengenai mengapa Presiden Soekarno sampai mengambil kebijaksanaan atau bersikap melindungi dan menguntungkan G30S/PKI, seperti yang telah

⁶ Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, *op.cit*

⁷ *Ibid*, hal. 60.

⁸ *Ibid*.

diuraikan di atas. Padahal menurut fakta-fakta berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan Mahmillub (Mahkamah Militer Luar Biasa) sudah jelas, bahwa G30S/PKI merupakan suatu gerakan pengkhianatan terhadap Pancasila. Demikian pula mengapa Presiden Soekarno hingga saat ini tetap tidak mau membubarkan PKI, meskipun tindakan itu yang diharapkan dan dikehendaki oleh rakyat banyak. Lebih lanjut Jenderal Soeharto mengatakan "*sungguh hal ini merupakan suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab.*"⁹

Setelah itu Jenderal Soeharto menambahkan bahwa memang setelah mempelajari semua fakta-fakta yang diuraikan di atas dan menghubungkannya dengan paham politik Presiden Soekarno terutama mengenai konsepsi politiknya Nasakom maka tidaklah mustahil bahwa sikap dan kebijaksanaan beliau seperti yang diuraikan itu dilandaskan (bermotif) pada pelaksanaan konsepsi politiknya. Demikian pula dapatlah ditarik kesimpulan bahwa konsepsi politik tentang Nasakom itulah yang memberikan jalan keleluasaan bagi PKI untuk bergerak hingga melakukan pemberontakan yang dikenal dengan G30S/PKI. Oleh karena itu untuk memahami latar belakang tindakan-tindakan politik Presiden Soekarno, maka seyogyanya harus dipahami konsepsi beliau sendiri secara keseluruhan.¹⁰

Dalam keterangan selanjutnya Jenderal Soeharto mengatakan bahwa apabila mengikuti tulisan-tulisan beliau (Soekarno) mengenai paham dan konsepsi politiknya, maka dapatlah disimpulkan bahwa sejak tahun 1926 itu, beliau berpendapat dan yakin bahwa untuk perjuangan mencapai kemerdekaan, maka

⁹ *Ibid*, hal. 63.

¹⁰ *Ibid*, hal. 64.

seluruh rakyat Indonesia yang dalam kenyataannya terdiri dari golongan nasionalis, golongan Islam, dan golongan komunis harus dan memang bersatu. Persatuan antara ketiga paham atau golongan itu menurut Soekarno harus ditumbuhkan dari persamaannya dan bukan dari perbedaan-perbedaannya.¹¹

Berdasarkan keyakinan dan *kegandrungan* Soekarno akan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia itu, akhirnya beliau pada tanggal 1 Juni 1945 berhasil menemukan landasan ideologi yang kemudian diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tentang dasar falsafah negara Indonesia Merdeka Pancasila yang secara resmi pula tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian kesatuan yang utuh. Sebaliknya PKI yang mendasarkan strategi perjuangannya pada ajaran Marxisme-Leninisme dalam rangka Komunisme Internasional (Komintern), apabila ia menerima Pancasila sebagai dasar negara, hal itu adalah sekadar sebagai tempat berlindung.¹²

Dalam rangka pengamalan dasar falsafah Pancasila untuk mencapai cita-cita revolusi Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur Presiden Soekarno menggunakan konsepsi Nasakom (dalam pengertian jiwa Nasakom). Nasakom dijadikan alat yang diharapkan dapat mempersatukan rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai aliran dan paham politik, yang satu di antaranya adalah PKI. Akan tetapi bagi PKI, konsepsi Nasakom diterima sebagai pengertian struktural dan

¹¹ Menurut Soekarno, perjuangan mencapai Kemerdekaan Indonesia akan berhasil apabila ketiga paham/golongan itu dapat bersatu. Dalam konsepsi politiknya yang ditulis pada tahun 1926 Soekarno menuliskan persatuan antara Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Lihat Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta, Panitia Penerbitan Dibawah Bendera Revolusi, 1964, hal. 1-23.

¹² Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, *op.cit.*, hal. 63-64.

pengertian fisik yang akan dimanfaatkan legalitas dalam usahanya memegang fungsi kepeloporan menuju tujuan revolusi menurut konsepnya.¹³

Selanjutnya Jenderal Soeharto menambahkan bahwa karena PKI memang hanya mau menerima Pancasila sebagai alat mencapai tujuannya, maka pada suatu saat yang dinilai berpeluang terhadap cita-cita dan tujuannya PKI pasti mengkhianati Pancasila. Sudah jelas bahwa tidak ada pikiran ataupun pilihan lain bagi PKI selain menerima Pancasila sebagai alat; bila ia menerima Pancasila secara murni berdasarkan maksud dan fungsinya, maka berarti bahwa PKI tidak mendasarkan geraknya pada kemurnian Marxisme-Leninisme. Oleh karena itu PKI konsekuen pada Marxisme-Leninisme maka ia harus menerima Pancasila sekadar sebagai kenyataan obyektif yang terpaksa harus dilalui dalam menuju sasaran akhir yaitu mendirikan negara komunis di Indonesia.¹⁴

Jenderal Soeharto kemudian melanjutkan keterangannya bahwa di situlah kesalahan pokok politik dari Presiden Soekarno yaitu kegagalannya untuk mem-Pancasilakan PKI yang sebenarnya memang tidak mungkin dapat untuk dilakukan. Presiden Soekarno terlalu percaya kepada PKI sehingga ia tidak waspada terhadap Pancasila itu sendiri. Bahkan setelah terjadinya Pemberontakan G30S/PKI yang dapat digagalkan itu, Presiden Soekarno tetap berusaha

¹³ *Ibid*, hal. 64-65.

¹⁴ Analisa-analisa yang telah dijabarkan di atas telah sering dikemukakan kepada Presiden Soekarno oleh beberapa sahabat-sahabatnya yang mewaspadaai terhadap gerakan komunis. Sehubungan dengan hal tersebut, Jenderal Soeharto pernah menyampaikan gagasan serupa dalam tahun 1958 di Semarang. Ia menyatakan bahwa komunis dan agama tidak akan dapat dipersatukan dalam Pancasila. Akan tetapi rupanya Presiden Soekarno tetap yakin bahwa PKI dan agama dapat dipersatukan dalam Pancasila, dengan kata lain PKI dapat di Pancasilakan. Periksa Soeharto, G Dwipayana, dan Ramadhan K.H., *Soeharto: Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya Otobiografi*, Jakarta, PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, hal. 248; Bandingkan dengan Abdul Gafur, *Pak Harto Pandangan dan Harapan*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1987, hal. 249

menyelamatkan idealismenya mengenai Nasakom dengan segala konsekuensi dibidang politik dan pemerintahan.¹⁵

Menanggapi hal tersebut rakyat Indonesia sebenarnya masih mempercayai dan mentaati serta setia kepada kepemimpinan Presiden Soekarno, meskipun mereka kurang dapat memahami tindakan beliau pada tanggal 1 Oktober 1965 itu. Rakyat Indonesia masih berharap bahwa mudah-mudahan setelah pengalaman pahit yang menimpa bangsa Indonesia dalam peristiwa G30S/PKI itu, beliau akan menyadari kesalahan dalam teori politiknya. Akan tetapi ternyata Presiden Soekarno masih tetap pada cita-citanya dan pendiriannya mengenai Nasakom yang hal itu tidak didukung sepenuhnya oleh rakyat Indonesia.¹⁶

Dalam keterangan selanjutnya Jenderal Soeharto mengatakan oleh karena itu kemudian dilakukanlah usaha-usaha untuk menyelesaikan konflik melalui Sidang Umum MPRS ke IV yang diselenggarakan pada tahun 1966 yang telah menghasilkan keputusan-keputusan yang bijaksana dengan harapan untuk dapat mempertemukan pola pemikiran Presiden Soekarno dengan pola pemikiran rakyat Indonesia. Oleh karena usaha itu ternyata belum dapat membuahkan hasil yang diharapkan maka situasi konflik semakin berlarut-larut.¹⁷

Berdasarkan keterangan Jenderal Soeharto yang mengkaitkan fakta-fakta tentang hubungan Presiden Soekarno dalam rangka peristiwa G30S/PKI itu, maka ia kemudian menarik kesimpulan umum bahwa Presiden Soekarno dapat dinilai

¹⁵ Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, *op.cit.*, hal. 68.

¹⁶ *Ibid*, hal. 68-69.

¹⁷ Mengenai hasil keputusan-keputusan Sidang Umum ke IV MPRS lihat O.G. Roeder, *Soeharto Dari Pradjurit Sampai Presiden*, Jakarta, Gunung Agung, 1969, hal. 58; Bandingkan dengan G. Moedjanto, *Indonesia Jilid II....*, *op.cit.*, hal. 148.

melakukan dua bidang kesalahan, yaitu kesalahan politik dan kesalahan yuridis (pidana). Mengenai kesalahan politik Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto mengatakan :

"Presiden Soekarno yang didorong oleh keyakinan politiknya untuk mempersatukan dan mem-Pancasilakan seluruh rakyat Indonesia dengan mengikutsertakan semua golongan dan aliran yang ada (termasuk PKI) dengan konsepsi Nasakom ternyata disalahgunakan dan dikhianati oleh PKI, yang memang mempunyai maksud-maksud yang tidak baik dengan Pancasila. Dengan demikian Presiden Soekarno menunjukkan kurang kewaspadaannya dalam mengamankan Pancasila. Meskipun sesuai dengan kenyataan yang ada, PKI telah mengkhianati Pancasila dan melakukan Pemberontakan G30Snya untuk memaksa konsepsi komunismenya, presiden masih tetap berusaha mengamankan konsepsinya sendiri dengan membiarkan pertumbuhan PKI, sehingga apabila ini berlangsung terus akan membahayakan Pancasila, perikehidupan rakyat, bangsa dan negara."¹⁸

Sedangkan mengenai kesalahan yuridis yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa:

"Dengan latar belakang atau dengan maksud menyelamatkan garis politik seperti yang diuraikan dalam uraian di atas, Presiden yang menuntut rasa keadilan dan kebenaran kita, seharusnya beliau mengambil tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku utama G30S/PKI. Akan tetapi Presiden justru membiarkan dengan leluasa pelaku-pelaku tersebut, bahkan sebaliknya beliau telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G30S/PKI dan melindungi tokoh-tokohnya. Kebijakan tersebut merupakan suatu kenyataan yang menunjukkan adanya pelanggaran pidana, sekalipun tujuan pokoknya bukan untuk membantu G30S/PKI, tetapi untuk mengamankan kebijaksanaan politiknya."¹⁹

Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Jenderal Soeharto selaku Pangkopkamtib sekaligus pengembal Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 kepada Sidang Istimewa MPRS tentang fakta-fakta dan penilaian mengenai

¹⁸ Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, *op.cit.*, hal. 69-70.

¹⁹ *Ibid.*

hubungan fakta-fakta yang telah diterangkan yang menyangkut diri Presiden Soekarno. Jenderal Soeharto yakin bahwa bahan-bahan itu akan dijadikan materi penilaian bagi Sidang Istimewa MPRS selaku forum tertinggi rakyat Indonesia yang akan mengambil keputusan yang adil dan bijaksana berdasarkan prosedur konstitusional.²⁰

B. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan terjadinya Pemberontakan G30S/PKI

Berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh Jenderal Soeharto beserta berbagai kebijaksanaan Presiden Soekarno yang dinilai tidak memuaskan, maka Sidang Istimewa MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 yang menyatakan mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan menarik kembali Mandat MPRS dari Presiden Soekarno. Ketetapan ini selanjutnya menetapkan pengangkatan terhadap pengembalian Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yaitu Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden sampai dipilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilu yang akan datang.²¹ Dengan demikian mulai sejak saat itulah maka Presiden Soekarno tidak lagi berkuasa dan kekuasaan pemerintahan kemudian dipegang oleh Pejabat Presiden Jenderal Soeharto.

Sementara itu pelarangan terhadap demonstrasi mahasiswa dan pelajar sebelum Sidang Istimewa MPRS telah menyebabkan kekecewaan di antara mereka. Kekecewaan itu kemudian semakin bertambah, oleh karena ternyata

²⁰ Sehubungan dengan sikap tersebut lihat O.G. Roeder, *op.cit.*, hal. 81-82.

²¹ Periksa Team Dokumentasi Presiden Republik Indonesia, *Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965-27 Maret 1968*, Jakarta, PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1991, hal. 166 dan 287; Bandingkan dengan G. Moedjanto, *Indonesia Jilid II...*, *op.cit.*, hal. 149.

Presiden Soekarno tidak dicopot dengan resmi dari kedudukannya sebagai presiden, apalagi ia tidak segera diajukan ke pengadilan. Menurut MPRS dalam penyelesaian menurut hukum terhadap persoalan mengenai hubungan Presiden Soekarno dalam peristiwa G30S/PKI akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan keputusan ini akan diserahkan kepada Pejabat Presiden. Akan tetapi Pejabat Presiden berdasarkan yang telah diketahui, ia menunjukkan keengganannya untuk menghadapkan Presiden Soekarno ke depan pengadilan.²²

Seperti telah diketahui bahwa setelah Sidang Istimewa MPRS diselenggarakan, persoalan mengenai masalah-masalah pokok terutama mengenai hubungan Presiden Soekarno dengan Pemberontakan G30S/PKI akan diambil alih oleh Pejabat Presiden Jenderal Soeharto. Dalam menghadapi segala persoalan, sebagai Pejabat Presiden Jenderal Soeharto menyadari bahwa dirinya tidak saja merupakan pemimpin revolusioner melainkan dirinya juga sebagai seorang negarawan. Oleh karena itu segala persoalan yang menyangkut sikap dan kebijakan politik pemerintahan harus dipertimbangkan.²³

Sebagai seorang yang lahir dan dibesarkan menurut tradisi dan kebudayaan Jawa Jenderal Soeharto selalu mencoba untuk bersikap dan bertindak adil terhadap Presiden Soekarno. Dengan cara-cara yang mencerminkan budaya Jawa Jenderal Soeharto berusaha mencopot kekuasaan Presiden Soekarno tanpa

²² Menurut O.G. Roeder pemeriksaan terhadap Presiden Soekarno sehubungan dengan meletusnya Pemberontakan G30S/PKI menimbulkan berbagai tanda tanya, mungkin saja pemeriksaan itu akan ditangguhkan! Ia mengakhiri kalimatnya dengan kata-kata "*Sampai ke Akhir Zaman*". Lihat O.G. Roeder, *op.cit.*, hal. 84.

²³ *Ibid.*

banyak menyinggung perasaannya dan menghidupkan kembali *issue* Soekarno. Ia menginginkan Presiden Soekarno meninggalkan gelanggang politik tanpa kehilangan muka, walaupun hal tersebut banyak mendapat kritik yang tajam dari tokoh-tokoh radikal Orde Baru.²⁴ Mereka tetap menuntut supaya diambil tindakan-tindakan tegas terhadap Presiden Soekarno yang harus bertanggungjawab atas terjadinya Pemberontakan G30S/PKI. Kendati demikian sebagai Pejabat Presiden Jenderal Soeharto tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut.

Sebagai Pejabat Presiden Soeharto tetap menghargai dan menghormati bekas pimpinannya itu mengingat hal ini juga tidak terlepas dari jasa-jasa beliau yang pada saat lampau telah mengorbankan diri dalam perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Jasa-jasa tersebut sangat dihargai oleh Jenderal Soeharto sekalipun kemudian beliau telah gagal, baik sebagai seorang negarawan maupun sebagai pribadi. Inilah sebab yang utama mengapa Jenderal Soeharto menolak untuk membawa Presiden Soekarno ke pengadilan.²⁵

Dengan demikian adalah suatu hal yang tidak benar apabila sampai ada tuduhan tentang keterlibatan Presiden Soekarno dalam peristiwa Pemberontakan

²⁴ Seperti yang telah dikemukakan dalam Otobiografinya bahwa Soeharto selalu memegang teguh falsafah Jawanya tentang istilah "*mikul dhuwur mendem jero*". Periksa Soeharto, G. Dwipayana, dan Ramadhan K.H., *op.cit.*, hal. 245.

²⁵ Sehubungan dengan tulisan O.G Roeder yang menyatakan bahwa "Soeharto menolak untuk membawa Soekarno, Gestapu Agung, ke tiang gantungan", penulis tidak sependapat. Sebagai seorang intelektual yang berpendidikan tinggi tentunya *lebih etis* apabila ia menuliskan "Soeharto menolak untuk membawa Soekarno ke depan pengadilan". Lihat O.G. Roeder, *op.cit.*, hal. 236.

G30S/PKI²⁶ karena seperti telah diuraikan di atas bahwa tidak ada pengadilan yang pernah memastikan Presiden Soekarno terlibat.²⁷ Padahal apabila kita kaji secara cermat pengadilanlah satu-satunya lembaga yang kompeten (landasan formal) untuk pemastian mengenai hal itu.²⁸ Lebih-lebih persyaratan ini tercantum dalam Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 yang menyebutkan menetapkan persoalan hukum selanjutnya mengenai Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden. Sementara Pejabat Presiden sendiri sama sekali menolak untuk mengadili Presiden Soekarno dalam kasus tersebut.

C. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno Sehubungan dengan Statusnya Pasca Diturunkan

Berdasarkan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 Presiden Soekarno dinyatakan tidak berkuasa lagi. Selanjutnya selaku Pejabat Presiden Jenderal

²⁶ Dalam versi lain menurut pengakuan seorang mantan ajudan Bung Karno yaitu Kolonel Maulwi Saelan, bahwa dalam rangka tekadnya untuk meluruskan kesalahpahaman sejarah ia menolak tuduhan keterlibatan Bung Karno dalam peristiwa G30S/PKI. Saelan menambahkan bahwa peristiwa tersebut pada dasarnya tak lain adalah suatu *creeping coup d' etat* atau kudeta yang dilakukan secara perlahan-lahan. Dalam bukunya yang berjudul "*Dari Revolusi 1945 sampai Kudeta 1966*" yang berisi kesaksiannya (yang akan segera diluncurkan), Saelan mengungkapkan kenyataan pada hari-hari panjang sewaktu kekuasaan Presiden Soekarno di-*pretheli*, Saelan mengakui bahwa ia berani menyatakan hal tersebut karena pasca Surat Perintah 11 Maret 1966 keluar, ia bertugas sebagai ajudan Bung Karno. Sehubungan dengan hal tersebut "Saelan sangat kecewa terhadap pengakuan Bambang Widjanarko yang mengatakan Bung Karno terlibat G30S/PKI. Bambang adalah satu-satunya bekas ajudan Bung Karno yang bersedia tanda tangan pada surat pemeriksaan interogator Pemerintah Orde Baru versi G30S/PKI sebagaimana yang sudah mereka arahkan sejak awal". Pernyataan Saelan itu dikutip dari "Pengabdian Majemuk Seorang Pejuang Revolusioner", *Kompas*, 4 Juni 2002, hal 12; Mengenai keterangan Bambang Wijanarko lihat Manai Sophiaan, *op.cit.*, hal. 115-116.

²⁷ Periksa Hardi, *Api Nasionalisme Cuplikan Pengalaman*, Jakarta, Gunung Agung, 1983, hal. 187.

²⁸ Manai Sophiaan, *op.cit.*, hal. 241.

Soeharto kemudian memberikan pidato kenegaraan sebagai Penjelasan Pelaksanaan Pengamanan Ketetapan MPRS tersebut. Sehubungan dengan sikap dan kebijakannya terhadap Presiden Soekarno, dalam pidato itu Jenderal Soeharto mengemukakan:

"Berdasarkan keterangan team dokter yang kompeten yang diberikan atas sumpah jabatan, bahwa sebenarnya keadaan kesehatan Bung Karno sudah sedemikian mundurnya sehingga wajarlah apabila kita sebagai bangsa yang berjiwa kebesaran Pancasila, akan memperlakukan beliau sesuai dengan keadaan kesehatannya tersebut."²⁹

Selanjutnya Jenderal Soeharto menambahkan:

"Kedudukan Presiden Soekarno telah ditegaskan oleh MPRS, oleh pemegang kedaulatan rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang akan kami laksanakan sebaik-baiknya dengan bantuan dan kepercayaan dari seluruh rakyat; *marilah kita semua tidak lagi mempersoalkan masalah Bung Karno.*"³⁰

Sementara itu Soekarno agaknya kurang begitu memahami apa yang dimaksudkan oleh Jenderal Soeharto. Oleh karena gelarnya sebagai Presiden tidak ditanggalkan secara nyata dan karena ia tetap tinggal di dalam lingkungan Istana Merdeka, Soekarno masih tetap tinggal dan menerima tamu dalam Istana tersebut. Selain itu ia juga mengundang tamu-tamu pribadi dan mengunjungi rekan-rekan seperjuangan lama di beberapa rumah sakit. Pada waktu luang Soekarno sering pula mengadakan inspeksi pada beberapa monumen.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Soekarno itu ternyata tidak menjadi kehendak Jenderal Soeharto selaku Pejabat Presiden. Oleh karena itu maka pada tanggal 6 Mei 1967 Pejabat Presiden mengumumkan Keputusan

²⁹ Dikutip dari Pidato Kenegaraan Pejabat Presiden Jenderal Soeharto Sebagai Penjelasan Pelaksanaan Pengamanan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967. Lihat O.G. Roeder, *op.cit.*, hal. 292-293.

³⁰ *Ibid.*

No.62/5/1967 perihal perlakuan selanjutnya terhadap Soekarno. Ia tidak lagi diijinkan menggunakan gelar sebagai Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata atau Panglima Besar Komando Tertinggi (KOTI). Selain itu Soekarno juga tidak diijinkan untuk menggunakan bendera kepresidenan.³¹

Sesudah Soekarno tidak mempunyai kekuasaan lagi, *histeria* atas hal-hal yang berbau Soekarno dikobarkan.³² Pada tanggal 7 Juli 1967 lahir apa yang dikenal dengan "Tekad Yogya" yaitu suatu pernyataan tekad para panglima dari keempat Kodam (Komando Daerah Militer) se-Jawa bersama-sama dengan panglima Kostrad (Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat) dan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) tentang beberapa tuntutan yang salah satunya berbunyi "mengambil tindakan tegas terhadap siapapun dan golongan manapun yang akan mengembalikan kekuasaan pemimpin Orde Lama Dr. Ir. Soekarno".³³ Pada intinya tuntutan mereka itu adalah dalam rangka "de-Soekarnoisasi".³⁴

Dalam perkembangan selanjutnya de-Soekarnoisasi menjangkau dalam berbagai hal. Selain semua ajaran dari Soekarno dinyatakan dilarang³⁵ juga dalam penulisan sejarah Indonesia, Soekarno dan pemerintahannya ditampilkan penuh

³¹ *Ibid*, hal. 191.

³² Manai Sophiaan, *op.cit.*, hal. 252

³³ O.G. Roeder lebih lanjut mengenai tuntutan itu periksa, *op.cit.*, hal. 297-298.

³⁴ Lihat H.A Haris Nasution, *op.cit.*, hal. 69.

³⁵ Manai Sophiaan, *op.cit.*; Schubungan dengan de-Soekarnoisasi tersebut sampai-sampai nama stadion olahraga menjadi sasarannya. Dalam kerangka ini Gelora Bung Karno (GBK) pun terkena imbasnya. Nama resmi Yayasan Gelora Bung Karno tanpa dasar hukum yang jelas di ganti menjadi Yayasan Gelora Senayan (YGS). Tentu saja hal ini dilakukan oleh Soeharto (Pemerintahan Soeharto) sebagai bagian dari upaya untuk menghapus jejak nama besar Soekarno dimata masyarakat/Bangsa Indonesia. Lebih lanjut mengenai uraian itu periksa "Sejarah Senayan Dari GBK Kembali ke GBK", *Bola*, Selasa 19 Februari 2002, hal. 10.

dengan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan merebaknya de-Soekarnoisasi tersebut sampai-sampai Dasar Negara Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno dalam pidatonya di depan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 harus diperlakukan sebagai bukan hasil pemikirannya.³⁶

Sementara itu Soekarno yang sudah tidak berkuasa dan telah dicabut semua hak politiknya, ia kemudian dikenakan "karantina politik".³⁷ Status ini secara resmi diumumkan beberapa bulan kemudian setelah ia tidak berkuasa (pada awal tahun 1968). Mulai sejak saat itulah Soekarno tinggal di Pavilyun Istana Bogor.³⁸ Selanjutnya, Soekarno diijinkan pindah ke tempat peristirahatan *Hing Puri Bima Sakti* yang terletak di Jalan Batu Tulis Bogor. Kepindahan itu didorong oleh keinginannya untuk memperoleh lingkungan hidup yang lebih segar dan indah.

Oleh karena selama kurang lebih satu tahun berada di tempat peristirahatan *Hing Puri Bima Sakti* kondisi fisik serta kesehatan Soekarno mengalami penurunan, maka atas anjuran team dokter ia dipindahkan.³⁹ Pada permulaan tahun 1969 Soekarno dipindahkan ke tempat karantina lain yaitu di

³⁶ Mengenai bukti dari hal tersebut lihat Nugroho Notosusanto, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1981, hal. 1-32.

³⁷ Uraian ini seperti yang telah dituliskan oleh Rachmawati Soekarnoputri di Mingguan *Simpom* edisi 3 Juli 1976 dalam Hardi, *op.cit.*, hal. 188; Hal ini ternyata konsisten dengan apa yang telah disampaikan oleh Soeharto dalam Otobiografinya. Lihat Soeharto, G. Dwipavana, dan Ramadhan K.H., *op.cit.*, hal. 244.

³⁸ Menurut pengakuan Maulwi Saetan, Soekarno dan keluarganya diusir dari Komplek Istana dalam waktu empat jam. Pada saat itu ia meninggalkan Istana dengan memakai kaos oblong dan piyama serta sandal usang, bajunya disampirkan dipundak. Lihat "Pengabdian Majemuk...", *Kompas*, *op.cit.*, hal. 4.

³⁹ Menurut keterangan dari Rachmawati Soekarnoputri ditempat Karantina *Hing Puri Bima Sakti* itulah Bung Karno mulai terserang penyakit reumatik dan kelumpuhan pada kedua kakinya. Dikutip dari Hardi, *op.cit.*, hal. 189.

Wisma Yaso yang terletak di Jalan Gatot Subroto (sekarang dijadikan Museum Satria Mandala). Di Wisma Yaso itulah Soekarno dirawat oleh Team Dokter yang diketuai oleh Prof. Dr. Mahar Marjono dan di tempat itu pula Soekarno berstatus sebagai tahanan politik serta berada dalam pemeriksaan Kopkamtib.⁴⁰ Menurut bahan informasi yang diperoleh, interogasi itu dihentikan karena sakitnya Soekarno menjadi cukup serius.⁴¹

Pada saat putri Soekarno yaitu Sukmawati Soekarnoputri melangsungkan pernikahannya di rumah Ibu Fatmawati yang terletak di Kebayoran Baru, Soekarno diperkenankan untuk menyaksikan pernikahan itu. Sejak saat itu masyarakat sebenarnya ingin mengetahui bagaimana kondisi kesehatan beliau. Akan tetapi keterangan dari team dokter pemeriksa sering tidak memberikan gambaran yang jelas. Kesehatan Soekarno dibulan Februari 1970 itu memang kelihatan menurun drastis.

⁴⁰ Pada saat menjadi dokter mantan Presiden Soekarno itulah Prof. Dr. Mahar Mardjono menemui kejanggalan. Dalam suatu kesempatan ia mengetahui bahwa obat-obat yang diresepkan untuk mantan Presiden Soekarno ternyata dihambat. Rupanya obat-obat itu disimpan (disembunyikan) di laci rumah sakit (RSPAD Gatot Subroto). Perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang dokter berpangkat militer tinggi. Pernyataan Prof. Mahar itu, dengan sedih disampaikan kepada dr. Kartono Mohamad yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI, sementara Prof. Dr. Mahar Mardjono menjabat sebagai ketuanya). Selanjutnya Prof. Mahar menambahkan bahwa pada saat itu, karena keadaan tidak memungkinkan membuka apa yang diketahuinya, Mahar hanya dapat mengatakan kepada Kartono bahwa apabila saatnya tiba ia akan mengungkapkannya. Akan tetapi sungguh sayang "beliau meninggal tanpa sempat memaparkannya". Dikutip dari "In Memoriam Mahar Mardjono, Simbol Moral Hadapi Kekuasaan", *Kompas*, 20 September 2002, hal. 1 dan 11; Bandingkan dengan Susanto Zuhdi dalam "Mengenang Tragedi Nasional Tiga Puluh Tujuh Tahun Lalu", *Kompas*, 30 September 2002, hal. 42; Apabila kita merenungkan secara mendalam mengenai nasib Bung Karno di Wisma Yaso itu maka timbul suatu kesan bahwa status Bung Karno sebagai tahanan (politik) itu adalah sangat ironis dan cukup menyedihkan. Betapa tidak...!!! Dalam perjuangannya mengusir penjajahan dan mewujudkan kemerdekaan, sebagai pemimpin rakyat yang rela mengalami penderitaan dan pembuangan politik, masuk-keluar penjara (Suka Miskin, Ende, Bengkulu dan Prapat). Akan tetapi kali ini, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia itu harus mengalami nasib sebagai tahanan dalam negara Republik Indonesia yang ia telah bangun dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaannya dengan pengorbanan.

⁴¹ Lihat Soeharto, G. Dwipayana, dan Ramadhan K.H., *op.cit.*, hal. 245.

Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 1970 pukul 20.15, tersiarlah berita bahwa Soekarno terpaksa dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, karena harus memerlukan perawatan intensif untuk mengatasi penyakitnya yang bertambah berat.⁴² Setelah mengalami perawatan intensif selama beberapa hari di RSPAD Gatot Subroto itu akhirnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 1970 pukul 07.00 Bapak Kemerdekaan Republik Indonesia itu telah meninggal dunia.⁴³

Wafatnya Soekarno telah memungkinkan Pemerintahan Soeharto melunakkan kebijaksanaan terhadapnya.⁴⁴ Sehubungan dengan hal tersebut Presiden Soeharto kemudian melakukan musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat dan pemerintah di Istana Negara.⁴⁵ Hasil dari musyawarah itu adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juni 1970 No.44/6/1970 yang menetapkan penyelenggaraan upacara pemakaman kenegaraan sebagai penghormatan negara kepada almarhum Dr. Ir. Soekarno sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, dan menetapkan Blitar sebagai tempat pemakaman jenazah almarhum Bung Karno.⁴⁶ Selain itu Keputusan

⁴² Hardi, *op.cit.*, hal. 190; Bandingkan dengan John D. Legge, *Soekarno Sebuah Biografi Politik* (Terj), Jakarta, Sinar Harapan, 1985, hal. 469.

⁴³ Menurut pengakuan Manai Sophiaan, begitu ketatnya penahanan terhadap Soekarno, hingga jenazahnya pun tidak boleh dibawa ke rumah keluarganya (Ibu Fatmawati), tetapi harus dibawa kembali ke tempat penahanannya di Wisma Yaso sebelum di makamkan. Periksa Manai Sophiaan, *op.cit.*, hal. 251; Salah satu informasi penting, bahwa Bung Karno meninggal masih dalam status tahanan politik. Dikutip dari "Megawati Harus Nyatakan Sikap Soal Masa Lalu", *Kompas*, 1 November 2002, hal. 6.

⁴⁴ Sepeninggal Soekarno tersebut Presiden Soeharto menyatakan "kecurigaan bahwa beliau terlibat dalam G30S/PKI sudah bisa dikesampingkan karena hal itu belum bisa dibuktikan." Dikutip dari Soeharto, G. Dwipayana, dan Ramadhan K.H., *op.cit.*, hal. 245.

⁴⁵ Beberapa tokoh yang diajak musyawarah itu antara lain; Dr. Mohammad Hatta, Wilopo, S.H., H. Anwar Tjokroaminoto, Mintardja, S.H., Prof. G.A. Siwabessy, Dr. Rubiyono dan Hasyim Ning. Dikutip dari Team Dokumentasi Presiden Republik Indonesia, *Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-27 Maret 1973*, Jakarta, PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1991, hal. 237.

⁴⁶ Hardi, *op.cit.*, hal 190.

Presiden tersebut juga menyatakan hari berkabung nasional selama tujuh hari terhitung sejak tanggal 21 Juni 1970.

Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintahan Soeharto mendirikan patung Dr. Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta (Monumen Proklamator) sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sebagai Proklamator Kemerdekaan. Pada tanggal 21 Juni 1979 Presiden Soeharto meresmikan makam Bung Karno di Blitar dan sekaligus mengukuhkannya sebagai Makam Pahlawan. Selanjutnya pemerintahan Soeharto juga merubah Bandar Udara Internasional Cengkareng menjadi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Akhirnya pada tanggal 8 November 1986 Bung Karno bersama Bung Hatta mendapat gelar Pahlawan Proklamator dari Pemerintahan Soeharto.⁴⁷

D. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan Penulisan Sejarah Indonesia terutama pada masa Demokrasi Terpimpin

Sebagaimana telah diketahui bahwa pada masa Pemerintahan Soeharto penulisan sejarah direayasa dan dikendalikan sedemikian rupa sehingga diharapkan hal itu akan dapat mempertahankan dan meningkatkan kekuasaannya. Sehubungan dengan rekayasa dan pengendalian itu Pemerintahan Soeharto menciptakan strategi yang mencakup dua hal: pertama berkaitan dengan hal-hal yang buruk dimasa lalu (pemerintahan sebelumnya) dengan mereduksi peran Soekarno dan menampilkannya secara buruk, dan kedua berkaitan dengan prinsip

⁴⁷ Dikutip dari "Seratus Tahun Mohammad Hatta", *Kompas*, 9 Agustus 2002, hal. 31.

legitimasi dengan menampilkan hal-hal yang baik (terutama dalam pemerintahannya) serta membesar-besarkan jasa Soeharto.⁴⁸

Pada tanggal 18 Maret 1976 Presiden Soeharto telah menerima secara resmi enam jilid buku yang berjudul *Sejarah Nasional Indonesia* yang merupakan karya serumpun ahli sejarah Indonesia.⁴⁹ Dalam perkembangan selanjutnya Presiden Soeharto kemudian memerintahkan supaya buku tersebut dipergunakan di sekolah-sekolah pemerintah. Seperti telah diketahui pula bahwa buku-buku itu dapat diterbitkan karena biaya yang disediakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud).⁵⁰

Di antara semua jilid buku *Sejarah Nasional Indonesia* (dari jilid I sampai VI) tersebut, ternyata terdapat satu jilid yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi (fakta sejarah), terutama yang menyangkut diri Presiden Soekarno.⁵¹ Dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI* terdapat susunan kalimat yang banyak menggambarkan pendirian dan penafsiran lain dari berbagai sejarawan, khususnya mengenai Pemerintahan Soekarno. Dengan perkataan lain tindakan sosial-politik yang telah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada saat itu tidak sesuai dengan pendirian dan penafsiran yang telah digambarkan mereka. Seolah-

⁴⁸ Asvi Warman Adam dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambari (Editor), *op.cit.*, hal. 69.

⁴⁹ Ahli-ahli sejarah tersebut antara lain; Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Dr. Marwati Djoened Poesponegoro dan sebagai penanggungjawabnya adalah Dr. Nugroho Notokusanto. Lihat B.M. Diah, *Meluruskan Sejarah*, Jakarta, Pustaka Merdeka, 1987, hal. 1; Sebagaimana penting untuk diketahui bahwa dalam edisi berikutnya yaitu Edisi ke-3 dan 4, Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo tidak lagi ikut serta dalam Tim Penyusun Sejarah Nasional Indonesia terutama jilid VI. Dengan demikian Tim Penyusun buku Sejarah Nasional Indonesia Edisi ke-3 dan 4 tinggal Prof. Dr. Marwati Djoened Poesponegoro dan Prof. Dr. Nugroho Notokusanto (Editor Sejarah Nasional Indonesia jilid VI).

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hal. 12.

olah Pemerintahan Soekarno terutama pada masa Demokrasi Terpimpin adalah suatu kemunduran dalam sejarah perkembangan bangsa.⁵² Hal ini tercermin dari peristiwa kembali ke UUD 1945 dan pengumuman pemberlakuan sistem Demokrasi Terpimpin. Setelah memberikan penafsiran sendiri tentang pengertian "Terpimpin", Tim Nugroho Notosusanto bersimpulan bahwa:

"Akan tetapi kemudian ternyata Presiden Soekarno menafsirkan "Terpimpin" itu dengan pimpinan pribadinya selaku Pemimpin Besar Revolusi, sehingga pengertiannya tidak lagi Demokrasi Terpimpin melainkan demokrasi yang dipimpin oleh Soekarno."⁵³

Interpretasi semacam itu, yang berasal dari seorang atau serumpun ahli sejarah dalam satu tim telah menunjukkan bahwa penulisan tersebut tidak ilmiah lagi dan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur politis. Selanjutnya dalam satu bab yang sama mengenai Demokrasi Terpimpin lagi-lagi tim penyusun itu menampilkan suatu hal yang bukan merupakan fakta sejarah.⁵⁴ Dalam penulisannya mereka menyatakan bahwa:

"Karena itu pada setiap pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus dan pelbagai kesempatan lain dikemukakan hal-hal yang seharusnya menjadi urusan dan tanggungjawab kabinet pemerintah walaupun sudah sedemikian jauhnya tindakan Presiden itu, jarang sekali terdengar suara untuk memprotesnya. Kiranya hal itu disebabkan karena partai-partai politik dalam masa perang kemerdekaan maupun dalam periode Demokrasi Liberal tidak berhasil menampilkan pemimpin berkaliber besar, sehingga selaku perdana menteri dapat memberikan pegangan kepada rakyat Indonesia yang hidup dalam suatu negara berkembang."⁵⁵

Pernyataan demikian itu menunjukkan bahwa tindakan Presiden Soekarno sebagai pemimpin rakyat Indonesia telah disangsikan dan apa yang telah

⁵² *Ibid.*

⁵³ Dikutip dari Sartono Kartodirdjo (dkk), *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Edisi ke-2), Jakarta, Balai Pustaka, 1977, hal. 104; Bandingkan dengan B.M. Diah, *op.cit.*

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 13.

⁵⁵ Sartono Kartodirdjo (dkk), *Sejarah Nasional* (Edisi ke-2)...., *op.cit.*, hal. 101

dilakukan oleh Presiden Soekarno merupakan suatu hal menyimpang sehingga tindakan untuk memprotesnya perlu dilakukan. Selain itu dalam menuliskan kata "kiranya" sebaiknya tidak perlu digunakan karena hal itu menunjuk pengertian akan perkiraan atau suatu hal yang belum pasti terjadi. Juga dengan menuliskan perkataan "kiranya" itu, penulis-penulis sejarah di bawah pimpinan Nugroho Notosusanto tidak yakin akan gerak kausalitas sejarah bahwa tidak ada protes terhadap Presiden Soekarno disebabkan karena tidak ada pemimpin berkaliber besar.⁵⁶

Selanjutnya dalam penulisan mengenai "rakyat yang sudah lama mendambakan stabilitas politik dan menggantungkan harapannya kepada berlakunya kembali UUD 1945 dalam rangka Demokrasi Terpimpin", mereka merumuskan suatu penafsiran yang berunsur politis pula. Penafsiran yang dimaksud dimuat dalam halaman yang sama pada alinea berikutnya yang berbunyi:

"Tidak berapa lama kemudian harapan-harapan tadi semakin kabur dan hilang, karena UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni. Kalau menurut UUD 1945, Presiden berada di bawah MPR seperti disebut di atas maka MPR(S) yang dibentuk atas Penetapan Presiden dengan pembatasan tugas dan anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden menjadi MPR(S) yang tunduk kepada Presiden."⁵⁷

Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan, apakah telah menjadi suatu fakta sejarah bahwa dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni? Apabila kita mengkaji secara cermat bahwa

⁵⁶ B.M. Diah, *op.cit.*, hal 14

⁵⁷ Sartono Kartodirdjo (dkk), *Sejarah Nasional* (Edisi ke-2) . . . *op.cit.* hal 194

pernyataan itu lebih cenderung kepada suatu penilaian atau penafsiran.⁵⁸ Adalah suatu hal yang tidak semestinya apalagi hal itu dilakukan oleh seorang atau sekelompok sejarawan yang profesional.

Selain itu dalam satu bab yang sama pula terdapat tulisan yang menyatakan bahwa:

"Atas petunjuk Presiden Soekarno PKI dengan ormasnya dapat dengan aman melakukan intimidasi dan teror politik terhadap pihak dan tokoh-tokoh yang dianggapnya lawan dengan mengatakan siapa saja menentang Nasakom apalagi anti PKI, adalah *kontra-revolusioner* dan anti Bung Karno."⁵⁹

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa Presiden Soekarno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi. Dengan mengatakan bahwa intimidasi dan teror yang dilakukan oleh PKI dan ormas-ormasnya adalah "atas petunjuk Presiden Soekarno" maka hal itu lebih merupakan suatu tuduhan yang berkait dengan tindakan-tindakan yang buruk.⁶⁰ Dengan perkataan lain suatu tindakan kejahatan seperti intimidasi dan teror politik adalah identik dengan petunjuk dari Presiden Soekarno.

Sehubungan dengan rekayasa dan pengendalian sejarah yang dilakukan oleh Pemerintahan Soeharto, penulisan sejarah seperti yang telah diuraikan di atas tersebut tentunya dapat dimengerti. Selain buku-buku tersebut dipergunakan dalam institusi-institusi pendidikan pemerintah, buku-buku itu dapat diterbitkan

⁵⁸ B.M Diah, *op.cit.*, hal. 15.

⁵⁹ Sartono Kartodirdjo (dkk), *Sejarah Nasional* (Edisi ke-2)....., *op.cit.*, hal. 108.

⁶⁰ Dalam pandangan itu B.M. Diah menyatakan bahwa dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI (Edisi ke-2), Presiden Soekarno bukan saja telah dituduh tetapi juga dihukum. Tanpa sadar penulis-penulis itu terbawa arus oleh kultus orang besar (Soekarno) dengan mengandengkan kebesarannya itu secara dramatis dengan hal-hal yang menakutkan (teror dan intimidasi politik). Periksa B.M. Diah, *op.cit.*, hal. 16-17.

karena biaya yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Depdikbud. Apalagi editor dari penulisnya adalah Nugroho Notosusanto yang merupakan seorang sejarawan pemerintah.

Sementara itu strategi dan pengendalian sejarah pada masa Pemerintahan Soeharto dilakukan pula melalui buku teks sejarah yang dipakai sebagai pegangan bagi siswa sekolah. Soeharto secara khusus pernah memerintahkan kepada Nugroho Notosusanto untuk merevisi buku pelajaran terutama sejarah yang berhubungan dengan Soekarno dan dirinya.⁶¹ Salah satu buku teks yang dijadikan pegangan dan menjadi wilayah yang banyak direvisi adalah buku "*30 Tahun Indonesia Merdeka*". Buku tersebut menjadi acuan bagi penulisan buku teks pelajaran sejarah di sekolah-sekolah terutama sekolah menengah.⁶²

Dari semua volume yang terdiri dari volume satu sampai empat semua menunjukkan peran Soeharto. Di antara sejumlah volume tersebut di bawah ini akan dibahas tentang volume yang ketiga (1965-1973) yang menguraikan tentang masa perpindahan (peralihan) kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Dalam buku tersebut Soekarno dan pemerintahannya ditampilkan dengan gambar-gambar, tetapi dengan citra yang buruk.⁶³ Dari sejumlah halaman dalam buku tersebut

⁶¹ Lihat Barbara Leigh dalam Eriyanto, *Kekuasaan Otorniter Dari Gerakan Pemudasan Menuju Politik Hegemoni Studi Atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar-Insist, 2000, hal. 79-80.

⁶² Selain buku *30 Tahun Indonesia Merdeka* dijadikan sebagai acuan bagi penulisan buku teks pelajaran sejarah, digunakan pula *buku putih* yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 1-173. Menurut buku ini, dalang dari peristiwa G30S adalah PKI dengan memeralat unsur-unsur ABRI. Persiapan mengenai gerakan telah dilakukan sejak lama dengan tujuan untuk merebut kekuasaan, mengganti ideologi dan menciptakan masyarakat komunis di Indonesia. Lebih lanjut periksa pula Asvi Warman Adam dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambari (Editor), *op.cit.*, hal. 573-574.

⁶³ Barbara Leigh dalam Eriyanto, *op.cit.*, hal. 80.



ditunjukkan sikap dan kebijakan dari Presiden Soekarno yang keliru. Hal ini tercermin dalam gambar-gambar yang menunjukkan demonstrasi mahasiswa menentangnya.⁶⁴ Selain itu terdapat pula gambar-gambar yang menunjukkan penderitaan rakyat pada masa itu (Pemerintahan Soekarno) yang sedang antri membeli beras dan minyak.⁶⁵

Dalam gambar selanjutnya ditunjukkan satu team dokter Cina dikirim pada bulan Mei 1962 untuk mengobati Presiden Soekarno (seperti telah diketahui bahwa Cina adalah suatu negara yang menganut ideologi komunis dan dekat hubungannya dengan Uni Soviet).⁶⁶ Di samping itu terdapat pula karikatur demonstran mahasiswa yang berisi ejekan terhadap Presiden Soekarno.⁶⁷ Dalam salah satu gambar bahkan ditunjukkan dirinya bersama dengan pemimpin Komunis D.N. Aidit dalam suatu pertemuan di Gelanggang Olah Raga Bung Karno (Gelora Senayan) Jakarta.⁶⁸ Meskipun tidak terdapat gambar yang secara tegas menunjukkan keterlibatan Presiden Soekarno dalam gerakan Komunis, akan tetapi gambar-gambar tersebut mensugesti pembaca untuk menyimpulkan/memberi kesan ada hubungan antara dirinya dengan Komunis.⁶⁹

Sehubungan dengan beberapa gambar Presiden Soekarno yang ditampilkan dengan citra yang buruk itu terdapat pula gambar yang menunjukkan kejelekan dari pemerintahannya yang tercermin dari gambar beberapa proyek

⁶⁴ Lihat Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973*, Jakarta, PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1986, hal. 86-88.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 39.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 36.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 107 dan 169.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 37.

⁶⁹ Barbara Leigh dalam Eriyanto, *op.cit.*, hal. 80

pembangunan yang terbengkelai.⁷⁰ Selain itu dalam salah satu gambar ditunjukkan pergantian peredaran uang dari seri lama ke seri baru yang sekaligus menggantikan gambar Soekarno dengan gambar yang lain.⁷¹ Dalam buku itu memuat pula halaman tentang meninggalnya mantan Presiden Soekarno. Akan tetapi ada ketidaksesuaian kata yang digunakan, karena dalam halaman tersebut ditulis "Bekas Presiden Soekarno". Bahkan dalam peristiwa meninggalnya mantan Presiden Soekarno tersebut hanya dimuat dalam satu halaman.⁷²

Di satu pihak Soekarno digambarkan dengan citra yang buruk disekitar peristiwa Pemberontakan G30S/PKI. Di pihak lain Soeharto tidak banyak digambarkan di sekitar peristiwa tersebut. Akan tetapi justru setelah terjadinya Pemberontakan G30S/PKI Soeharto banyak ditampilkan. Selain satu gambar yang ada dimuka⁷³, terdapat lebih dari 80 gambar yang memuat peran Soeharto dalam rangka pemulihan keamanan pasca meletusnya pemberontakan tersebut.⁷⁴ Hal ini membuktikan bahwa Soeharto mempunyai maksud untuk memperbesar peranannya dalam penulisan sejarah. Dengan menampilkan Soekarno secara buruk, Soeharto mempunyai harapan bahwa sebagai Presiden kedua ia tidak kalah dengan Presiden pertama.

⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun...., op.cit.*, hal. 39.

⁷¹ *Ibid*, hal. 171.

⁷² *Ibid*, hal. 212.

⁷³ *Ibid*, hal. 17.

⁷⁴ Barbara Leigh dalam Eriyanto, *op.cit.*, hal. 80.

E. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno sehubungan dengan Sejarah Lahirnya Pancasila Dasar Negara

Sebagaimana telah disebut-sebut dimuka bahwa strategi pengendalian sejarah pada masa Pemerintahan Soeharto mencakup dua hal yaitu; pertama mereduksi peran Soekarno dan menampilkan (pemerintahannya) secara buruk, kedua membesar-besarkan peran Soeharto dan menampilkan (pemerintahannya) secara baik. Dengan perkataan lain strategi pengendalian sejarah dilakukan sebagai upaya untuk memantapkan kedudukannya sebagai presiden di satu pihak dan menjatuhkan Presiden Soekarno dimata rakyat Indonesia di lain pihak. Hal ini tampak dalam penerbitan buku-buku sejarah yang salah satunya adalah buku *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara* yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto tahun 1981 dan diterbitkan oleh Penerbitan Negara Balai Pustaka Jakarta.⁷⁵

Seperti telah diketahui bahwa sejak tahun 1947 rakyat Indonesia telah meyakini bahwa Bung Karno lah yang merumuskan konsepsi Pancasila Dasar Negara pertama kali.⁷⁶ Akan tetapi Nugroho Notosusanto mengoreksinya dan koreksinya tersebut dituangkan dalam buku *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Pada intinya buku itu memberikan kesimpulan bahwa, Bung Karno bukanlah orang pertama dan satu-satunya yang mengajukan gagasan-gagasan

⁷⁵ Ungkapan-ungkapan dalam buku itu juga ditulis dalam artikel yang dimuat antara lain di harian; *Pos Kota* tanggal 21-28 Juli 1981, *Kompas* tanggal 26 Juli 1981, *Sinar Harapan* tanggal 3 dan 4 Agustus 1981, *Suara Karya* tanggal 4 dan 5 Agustus 1981 dan *Angkatan Bersenjata* tanggal 10 dan 11 Agustus 1981. Dikutip dari Yayasan Idayu, *Sekitar Tanggal dan Penggalinya Guntungan Pers dan Bibliografi Tentang Pancasila* (Edisi ke-2), Jakarta, Yayasan Idayu, 1981, hal. 14.

⁷⁶ P.J. Soewarno, *Sejarah dan Kekuasaan Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2001, hal. 18.

mengenai Dasar Negara Indonesia Merdeka, serta 1 Juni 1945 bukan merupakan Hari Lahir Pancasila.

Adapun sebagai sumber primer yang digunakan oleh Nugroho (yang ada hanya satu) yaitu buku karangan Prof. Mr. Muhammad Yamin yang berjudul *Naskah Persiapan Undang-Undang 1945* yang diterbitkan pada tahun 1959.⁷⁷ Alasan Nugroho menggunakan buku tersebut karena Muhammad Yamin adalah seorang pelaku dalam peristiwa itu. Selain itu buku tersebut telah diterbitkan dengan sebuah kata pengantar yang ditulis oleh Presiden Soekarno sendiri dengan tulisan tangan (Presiden Soekarno sendiri adalah juga seorang pelaku dalam peristiwa tersebut).⁷⁸ Dengan perkataan lain, bahwa kata pengantar tulis tangan tersebut dianggap *endosment* oleh Nugroho buat naskah Yamin.

Dalam pada itu Prof. Mr. A.G Pringgodigdo yang di dalam *Dokuritsu Junbi Cosakai* (BPUPKI) menjabat sebagai Wakil Kepala Sekretariat dan dalam kedudukan itu memimpin para *stenograf* yang mengambil notulen-notulen sidang-sidang badan tersebut, menyatakan kepada Nugroho bahwa buku Muhammad

⁷⁷ Nugroho Notosusanto, *Proses Perumusan...*, *op.cit.*, hal. 17

⁷⁸ Meskipun kata pengantarnya ditulis oleh Presiden Soekarno sendiri dengan tulisan tangan, namun hal itu masih disangsikan kebenaran dari isi buku itu. Dalam hal ini apakah Presiden Soekarno sebelum menulis kata pengantarnya telah membaca dengan teliti. Hal ini dikhawatirkan bahwa Presiden Soekarno dalam menuliskan buku ini, ia dalam keadaan tidak bebas untuk tidak *mengiyakan* (setuju) untuk naskah Yamin. Dalam rumusan lain ada pendapat bahwa pada waktu Naskah Yamin dipersiapkan Presiden Soekarno dalam ikatan moril dengan Yamin. Lebih jelasnya periksa tulisan G. Moedjanto, *Kompas*, 9 Agustus 1981 dalam Yayasan Idayu, *op.cit.*, hal. 17.

Yamin tersebut otentik.⁷⁹ Lebih lanjut A.G Pringgodigdo menambahkan bahwa isi buku itu kata demi kata (*woordelijke*) sama dengan isi *notulistisch verslag* itu.⁸⁰

Oleh karena Nugroho meyakini otentisitas buku tersebut, maka ia kemudian melacaknya. Kecuali itu ia juga melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh yang hadir dalam *Dokuritsu Jumbi Cosaka* tersebut.⁸¹ Di antara sejumlah tokoh itu hanya Dr. Mohammad Hatta yang mencurigai otentisitasnya pada bagian-bagian tertentu dalam buku *Naskah Persiapan Undang-Undang 1945*. Alasan kecurigaan itu mengingat kesangsian beliau terhadap integritas penyusunnya.⁸²

Dalam karyanya yang berjudul *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara* Nugroho menyebutkan:

"Bahwa Bung Karno *bukanlah orang pertama dan bukan orang satu-satunya* yang mengetengahkan suatu konsepsi mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Keistimewaan pidato beliau pada tanggal 1 Juni itu adalah, bahwa kecuali berisi pandangan atau usul mengenai dasar negara Indonesia merdeka, juga berisi usul mengenai nama dasar negara itu yakni *Pancasila, Trisila, atau Eka Sila*. "Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila.....". Dan setelah mengetengahkan kemungkinan diperasnya Pancasila menjadi hanya tiga azas dan akhirnya menjadi hanya satu azas, maka beliau berkata; Panca Sila menjadi Tri Sila, Tri Sila menjadi Eka Sila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih; Tri Sila, Eka Sila, atau Panca Sila! Jadi yang lahir pada tanggal 1 Juni itu adalah *nama Pancasila* (di samping nama Tri Sila dan Eka Sila yang tidak terpilih)."⁸³

⁷⁹ Otentisitasnya itu disebabkan oleh karena bagian buku itu yang mengenai sidang-sidang tersebut memang berupa pencetakan belaka dari laporan *stenografis* itu. Laporan *stenografis* itu dipinjam oleh almarhum Muh Yamin tetapi kemudian tidak dikembalikan. Periksa Nugroho Notosusanto, *Proses Perumusan....., op.cit.*, hal. 18; Bandingkan dengan Yayasan Pembela Tanah Air, *Sejarah Lahirnya Pancasila*, Jakarta, Yayasan Pembela Tanah Air Pusat, 1995, hal 7

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Sejumlah tokoh itu adalah Dr. Moh Hatta, Abi Kusno Tjokrosuyoso, Ahmad Subardjo, Kyai Haji Abdul Kahar Muzakir, Nyonya Sunaryo Mangunpuspito, A.R. Baswedan dan R.P. Suroso. Dikutip dari Nugroho Notosusanto, *Proses Perumusan....., op.cit.*, hal. 18.

⁸² *Ibid.*, hal. 19 dan 25.

⁸³ *Ibid.*, hal. 21.

Kemudian Nugroho juga mengemukakan bahwa:

"Bung Karno bukanlah orang pertama dan satu-satunya yang mengajukan gagasan-gagasan mengenai *dasar negara* sesuai dengan permintaan Ketua Badan Penyelidik, dr. Radjiman Wedyodiningrat. Sekurang-kurangnya ada dua orang lain yang juga mengajukan gagasan-gagasan mengenai dasar negara, lagi pula pengajuannya lebih dulu dari Bung Karno, yang menyampaikannya baru pada tanggal 1 Juni 1945. Mereka itu adalah Muhammad Yamin yang mengajukan gagasan-gagasan pada tanggal 29 Mei dan Prof. Dr. Supomo yang mengajukan konsepsinya pada tanggal 31 Mei 1945."⁸⁴

Selanjutnya Nugroho juga mengatakan:

"Bahwa nama Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945, kiranya tidak ada seorang pun yang mempersoalkan. Buktinya begitu menonjol, sehingga hal itu merupakan sesuatu "*notoir feit*". Bahwa Bung Karnolah yang pertama dan satu-satunya yang mengucapkan suatu pidato mengenai dasar negara Indonesia Merdeka *sekaligus dengan usul nama (antara lain) Pancasila*, kiranya juga tidak ada yang menyangsikan. Yang merupakan kontroverse adalah, bahwa pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu adalah konsepsi yang pertama dan satu-satunya mengenai dasar negara yang akhirnya berkembang menjadi Pancasila Dasar Negara yang sah dan autentik sebagaimana yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai bagian daripada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang *tidak terbukti*. Kecuali jika kita mau menggelapkan pidato Muh Yamin dan Supomo."⁸⁵

Dalam uraian selanjutnya Nugroho mengatakan pula bahwa:

"Jadi kalau ada orang yang mengatakan, bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahir Pancasila, maka kita harus menanyakan terlebih dulu; Pancasila yang mana! -kalau jawabannya adalah Pancasila Bung Karno maka hal itu dapat dibenarkan. Tetapi jika yang dimaksud dengan Pancasila adalah Pancasila Dasar Negara yang sah dan autentik (sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945) maka hal itu *tidak* benar. Karena Pancasila Dasar Negara itu tidak hanya bersumber kepada Pancasila Bung Karno 1 Juni 1945, melainkan juga bersumber kepada konsepsi-konsepsi lain, dalam hal ini konsepsi Yamin dan konsepsi Supomo, yang kemudian diolah oleh Panitia Sembilan menjadi Piagam Jakarta kemudian diolah oleh Panitia

⁸⁴ *Ibid*, hal. 24.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 27.

Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia sehingga memperoleh bentuknya yang autentik sekarang ini."⁸⁶

Munculnya buku *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara* ternyata menimbulkan reaksi keras dari kalangan masyarakat luas terutama dari para sejarawan⁸⁷ dan para tokoh pejuang kemerdekaan. Pada intinya mereka meragukan tulisan Nugroho Notokusanto karena isinya disangsikan kebenarannya. Beberapa sejarawan menyatakan bahwa di samping meragukan metodologi sejarah (*heuristik* dan *koraborasi*) yang telah digunakan oleh Nugroho, mereka juga mempertanyakan apakah ia sudah benar-benar melakukan penelitian kualitatif terhadap pendapat-pendapat dan pikiran-pikiran para pelaku serta saksi-saksi sejarah dalam peristiwa itu. Bahkan seorang sejarawan berpendapat bahwa karya Nugroho tersebut lebih merupakan "pamflet politik" daripada suatu karya sejarah yang ilmiah.⁸⁸

⁸⁶ Sesungguhnya apa yang telah diungkapkan oleh Nugroho Notokusanto tersebut bukan barang baru. Sepuluh tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1971, Brigadir Jenderal (Tituler) yang mengepalai Pusat Sejarah ABRI ini menerbitkan naskah yang berjudul *Naskah Proklamasi Yang Autentik dan Rumusan Pancasila Yang Autentik*. Naskah Proklamasi yang autentik menurut Nugroho adalah naskah yang diketik oleh Seyuti Melik, ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan kemudian dibacakan disaat Proklamasi Kemerdekaan sedang Naskah Pancasila yang autentik ialah yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam perkembangan selanjutnya naskah tersebut "diperbaiki" oleh Nugroho sembilan tahun kemudian yaitu pada tahun 1980 terbitlah sebuah artikel yang berjudul "*Mengamankan Pancasila Dasar Negara*". Artikel ini dimuat dalam majalah *Persepsi* no. 1 tahun 1. Nugroho sendiri adalah ketua redaksi majalah tersebut. Seperti diketahui bahwa dalam tulisan ini Nugroho telah menghimbau agar Pancasila Dasar Negara diamankan. Tetapi yang diamankan itu bukanlah rumusan pribadi Bung Karno (1 Juni 1945) yang dianggap Nugroho baru merupakan calon dalam merumuskan dasar negara. Lihat *Tempo*, 29 Agustus 1981 dan *Zaman*, 23-29 Agustus 1981 dalam Yayasan Idayu, *op.cit*, hal. 37 dan 42.

⁸⁷ Beberapa sejarawan yang memberikan reaksi terhadap tulisan Nugroho itu antara lain; 1) Drs. G. Moedjanto, M.A., dalam *Kompas*, 9 Agustus dan 13 September 1981, 2) Drs. Ruben Nalenan dalam *Kompas*, 9 Agustus dan 13 September 1981, 3) Drs. Abdurrachman Surjomihardjo dalam *Tempo*, tanggal 29 Agustus dan 5 September 1981, 4) Drs. Kuntowijoyo dalam *Tempo* tanggal 29 Agustus 1981 dan lain sebagainya. Lihat *ibid*, hal. 1-44.

⁸⁸ *Ibid*; Dalam hubungannya dengan Nugroho Notokusanto itu, Dr. Taufik Abdullah menyatakan bahwa dalam tulisan-tulisannya yang teoretis ia menolak kemungkinan mencapai obyektifitas sejarah. Ia menekankan nilai-nilai edukatif dari sejarah sampai-sampai membenarkan pembelokan sejarah. Dikutip dari "Arah Gejala dan Perspektif Studi Sejarah Indonesia" dalam Taufik Abdullah

Sehubungan dengan hal itu reaksi keras dan bersifat politis juga datang dari para tokoh masyarakat dan Purnawirawan Perwira Tinggi ABRI. Mereka mengeluarkan suatu deklarasi yang disebut "Deklarasi Pancasila" yang ditandatangani oleh tujuh belas orang dan kemudian dikeluarkan oleh Lembaga Soekarno-Hatta.⁸⁹ Deklarasi Pancasila dibacakan di depan Patung Proklamator Kemerdekaan (Monumen Proklamasi) pada tanggal 17 Agustus 1981 bertepatan dengan hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-36 jam 00.00. Pada intinya deklarasi tersebut tetap membenarkan tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahirnya Pancasila.⁹⁰

Sementara itu sebagai intelektual maupun sejarawan (pemerintah), Nugroho tampaknya sudah siap mental untuk melakukan banting stir, merubah pendiriannya apabila memang ditemukan fakta atau bukti baru yang lebih meyakinkan. Hal ini dapat diketahui dari seringnya dia mengucapkan pernyataan yang menunjukkan sikap *sportif* seorang intelektual sekaligus sejarawan bahwa:

"Seorang sejarawan yang baik tidak akan malu mundur kalau kemudian ditemukan bahan bukti yang lebih kuat dari yang dimilikinya."⁹¹

dan Abdurrachman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*, Jakarta, Kerja Sama Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS) dan LEKNAS-L.IPI serta PT Gramedia, 1985, hal. 28.

⁸⁹ Ketujuh belas orang penandatanganan itu adalah Ahmad Sukendro (Perwira Tinggi TNI-AD), Manai Sophiaan (mantan Duta Besar dan tokoh PNI/Front Marhaenis), Yusuf Hasyim (anggota DPR dan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan), H.M. Sanusi (tokoh intelektual Islam dan mantan pimpinan Parmusi), Usep Ranuwidjaja (mantan Dubes dan tokoh PDI), Surowo Abdul Manap (Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila), Soemali Prawiro S (tokoh PNI/Front Marhaenis), H.A.Y. Mokoginta (mantan Dubes dan perwira tinggi TNI/AD), Soejitno Soekirno (mantan Dubes dan perwira tinggi TNI-AU), Munasir (tokoh Nadlatul Ulama), H.R. Dharsono (mantan Sekjen ASEAN, Pangdam VI Siliwangi), Hugeng (mantan Kapolri), O.B. Syaaf (purn perwira tinggi TNI-AL), Slamet Bratanata (mantan menteri), Pamoe Hardjo (purn perwira tinggi TNI-AD dan pencipta lagu Garuda Pancasila), H.M. C.h Ibrahim (tokoh Islam) dan Soedradjat (pengusaha swasta). Dikutip dari mingguan *Simpomi*, dalam *ibid*, hal. 110-111

⁹⁰ Yayasan Pembela Tanah Air, *op.cit.*, hal. 219-220.

⁹¹ Yayasan Idayu, *op.cit.*, hal. 76; Bandingkan dengan Yayasan Pembela Tanah Air, *op.cit.*, hal 22.

Dalam perkembangan selanjutnya pernyataan Nugroho Notosusanto itu ternyata tidak sepenuhnya dapat dipertahankan, karena sewindu kemudian yaitu pada tahun 1989 telah ditemukan bukti baru yang otentik yaitu *Pringgodigdo Archief* (Arsip Pringgodigdo). Arsip itu telah membuktikan secara meyakinkan bahwa Bung Karno adalah satu-satunya penggali Pancasila Dasar Negara dan 1 Juni 1945 adalah Hari Lahirnya Pancasila.⁹² Selain itu arsip tersebut sekaligus menggugurkan pendapat/pendirian dari Nugroho Notosusanto.⁹³ Dengan demikian terbongkar pula, secara meyakinkan manipulasi Yamin dan Nugroho yang hendak memisahkan Pancasila dari sejarah kelahirannya, yang pada dasarnya hendak merusak nilai-nilai wawasan kebangsaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia.⁹⁴

⁹² Selain *Pringgodigdo Archief* telah membuktikan secara meyakinkan bahwa Bung Karno adalah satu-satunya penggali Pancasila Dasar Negara dan 1 Juni 1945 adalah Hari Lahirnya Pancasila, keyakinan itu didukung pula oleh fakta-fakta lain yaitu dari karya-karya Moh Yamin lainnya yang justru mengakui bahwa penggali pertama Pancasila adalah Bung Karno. Adapun karya-karya Yamin adalah: 1) *Sistematika Filsafat Pancasila* (1958); 2) *Tinjauan Pancasila terhadap Revolusi Fungsional* (1959); 3) *Naskah Persiapan UUD 1945* jilid II (1959); 4) *Lima Uraian tentang UUD 1945* (1960); dan 5) *Pembahasan UUD-RI* (1960).

Kecuali ada pengakuan dari Yamin, ada saksi-saksi lain (saksi melihat langsung Bung Karno berpidato di depan BPUPKI 1 Juni 1945). Mereka adalah K.H. Dewantara (1950), K.H. Mansyur (1958), R.P. Suroso (1964), Rooseno (1981), Radjiman Wedyodiningrat (1957), dan A.A. Maramis (1975). Selain itu ada juga *informan* (tahu dari orang atau dari media lain), yaitu Moh Hatta (sepanjang hari tanggal 1 Juni 1945 ada di Banjarmasin), Adam Malik, Abu Hanifah, Notonagoro, Sunaryo, dan A. Subarjo. Selain juga masih ada saksi lain, yaitu Ibu Fatmawati Soekarno. Dikutip dari G. Moedjanto dalam "Antara Hari Kelahiran dan Hari Kesaktian Pancasila", *Kompas*, 30 September 2002, hal. 40; Mengenai pengakuan-pengakuan Yamin bahwa Bung Karno penggali Pancasila dan 1 Juni 1945 adalah Hari Lahirnya Pancasila periksa Yayasan Pembela Tanah Air, *op.cit.*, hal. 220-228.

⁹³ Oleh karena arsip tersebut baru ditemukan kembali pada tahun 1989, yaitu empat tahun pasca Nugroho Notosusanto meninggal dunia, maka beliau tidak dapat menggunakan sumber itu untuk meluruskan/merevisi bukunya yang berjudul *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Sayang!

⁹⁴ Mengenai *Pringgodigdo Archief* lebih jelasnya lihat *ibid.*, hal. 21-49

Sampai di sini pembahasan mengenai sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno. Dalam bab selanjutnya akan diuraikan mengenai sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap keluarga Soekarno.



BAB V

SIKAP DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SOEHARTO TERHADAP KELUARGA SOEKARNO

Dalam membahas sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Keluarga Soekarno, di bawah ini akan dibahas mengenai berbagai hal yang ditinjau dari aspek politik.

A. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Keluarga Soekarno Secara Umum

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam keluarga besar Soekarno, hanya Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra yang secara khusus tampil dalam panggung politik. Sebetulnya mereka pada tahun 1982 (menjelang Pemilu) sudah bersepakat untuk tidak terjun ke dalam salah satu organisasi sosial politik (orsospol), dalam hal ini politik praktis. Konsensus keluarga pada waktu itu disepakati oleh Guntur, Mega, Guruh, Sukma, Rachma, Bayu, dan Taufan di rumah Guntur di Jalan Sriwijaya, Jakarta.

Di samping itu mereka pada saat itu mempunyai keyakinan bahwa tidak ada orsospol, termasuk PDI, yang melanjutkan semangat Marhaenisme, ajaran Soekarno. Marhaenisme adalah ajaran Soekarno yang dijadikan azas PNI pada tahun 1952. Pada tahun 1973 PNI kemudian berfusi ke dalam PDI.¹

¹ "Langkah Mega dan Harapan Keluarga Bung Karno", *Forum Keadilan*, Nomor 7, tahun V, 12 Juli 1996, hal. 14.

Dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan perubahan jaman, yakni ketika mulai diberlakukan azas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi semua organisasi kemasyarakatan², maka kesepakatan Keluarga Soekarno itu mulai dilanggar. Hal ini terbukti dari apa yang telah dilakukan oleh Megawati dan Guruh pada tahun 1987. Nama mereka muncul dalam daftar nama calon legislatif (caleg) untuk PDI.

Memang tidak semua keluarga besar Soekarno akhirnya tertarik untuk tampil dalam pentas politik. Seperti yang telah dilakukan pada masa lalu, mereka khawatir akan adanya pembatasan-pembatasan dari pihak pemerintah. Hal ini telah terbukti dalam rencana penampilan Guntur Soekarnoputra pada kampanye Pemilu tahun 1971 yang kemudian tidak mendapat izin dari pemerintah (kena cekal).³ Oleh karena itu daripada hal demikian hanya akan membuat mereka kecewa dan frustrasi, maka sebagian mereka akhirnya mencoba untuk menghindari masalah dengan kegiatan politik. Walaupun demikian, mereka tentu saja tidak buta politik sama sekali.⁴

Tampilnya Megawati dan Guruh ke atas pentas politik agaknya kurang begitu mendapat dukungan dari Rachmawati Soekarnoputri. Rachmawati menilai cara kedua saudaranya itu tidak akan efektif dalam suasana dan tatanan politik (iklim politik) yang terjadi pada saat itu. Selain itu ia pun juga khawatir bahwa

² Mengenai proses penetapan Pancasila sebagai azas tunggal lihat Bab III Pandangan dan Pikiran Soeharto.

³ "Apa Dibalik Mega", *Tempo*, 11 Desember 1993, hal. 34; Bandingkan dengan "Mereka Ahli Waris Nama Besar", *Tempo*, 18 Desember 1993, hal. 25.

⁴ Ahmad Bahar, *Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993-1996*, Yogyakarta, Pena Cendekia, 1996, hal. 91.

Megawati dan Guruh hanya akan menjadi alat/sarana penarik suara.⁵ Akan tetapi apa mau dikata, Megawati dan Guruh tentu mempunyai hak dan alasan tersendiri untuk meninggalkan konsensus tersebut.

Sementara itu untuk mewujudkan cita-citanya Rachmawati lebih memusatkan diri dalam bidang sosial melalui kegiatan pendidikan. Dalam rangka menyalurkan ajaran-ajaran Soekarno dan mengembangkan pendidikan, ia mendirikan Yayasan Pendidikan Soekarno. Yayasan yang dipimpin oleh Rachmawati tersebut juga merancang berdirinya perguruan tinggi swasta yang kemudian diberi nama Universitas Bung Karno yang terletak di Jalan Sudirman Jakarta. Akan tetapi lagi-lagi langkah Rachmawati itu mendapat rintangan. Pada tahun 1984 ketika pihak Universitas Bung Karno sedang sibuk menerima calon mahasiswa baru yang kurang lebih berjumlah 4000 orang, pemerintah mengeluarkan larangan untuk membekukan Universitas Bung Karno itu. Dengan perkataan lain Universitas Bung Karno tidak mendapat izin untuk berdiri. Alasan yang dipakai pada waktu itu adalah "izin belum keluar".⁶ Dalam kesempatan lain ketika Yayasan Pendidikan Soekarno berniat untuk mendirikan museum, lagi-lagi izin pun tak kunjung turun. Usaha ini dirintis oleh Guruh Soekarnoputra yang menjadi ketua yayasan yang beranggotakan seluruh keluarga besar Soekarno itu.⁷

⁵ "Langkah Mega.....", *Forum Keadilan*, op.cit.

⁶ Menurut Asvi Warman Adam, hal tersebut merupakan tindakan politik untuk melarang berkembangnya ajaran Soekarno. Lihat Asvi Warman Adam dalam Henry Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambari (Editor), *Panggung Sejarah, Persembahan Kepada Prof. Dr. Danys Lombart*, Jakarta, Ecole Francaise, d'Extreme-Orient Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Yayasan Obor Indonesia, 1999, hal. 572; Bandingkan dengan "Mereka Ahli Waris.....", *Tempo*, op.cit., hal. 27; Apabila dilihat dari kacamata sekarang, larangan pemerintah untuk mendirikan Universitas Bung Karno tersebut merupakan suatu hal yang aneh dan diskriminatif. Mengapa demikian? Karena di Sumatera Barat (Padang) boleh berdiri Universitas Bung Hatta.

⁷ Sampai berita ini diterbitkan dalam tahun 1993, ijin tersebut belum juga turun. Lihat "Apa Dibalik.....", *Tempo*, op.cit., hal. 35.

Selain itu ketika W.S Rendra dan N. Riantiarno dilarang mementaskan karya mereka (termasuk drama yang berjudul *Konglomerat Burisrawa*), Guruh pun tidak diperbolehkan mementaskan karya seninya yaitu *Swaramahardhika*.⁸

Pemerintah sendiri terkesan tak acuh ketika anak-anak Soekarno dalam hal ini Megawati dan Guruh tampil ke atas kancah politik, yaitu dalam kampanye pada Pemilu tahun 1987.⁹ Akan tetapi dalam perkembangannya ternyata Megawati dan Guruh justru sangat berpengaruh dalam kemajuan PDI. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah perolehan kursi PDI di DPR maupun MPR. Kejadian itu tentunya merupakan suatu ancaman terhadap kelangsungan dan eksistensi pemerintah pada saat itu.

Sehubungan dengan ancaman tersebut, sebagai langkah awal pemerintah kemudian melarang orsospol itu (PDI) untuk menggunakan simbol atau gambar Soekarno sebagai identitas partai, terutama dalam kampanye Pemilu berikutnya yaitu pada tahun 1992.¹⁰ Sungguhpun demikian tanpa simbol Soekarno pun figur Megawati dan Guruh ternyata masih mampu menyedot suara. Hal ini terbukti dari perolehan kursi PDI di DPR yang mengalami peningkatan, dari 40 kursi (1987) menjadi 56 kursi (1992). Melihat peningkatan perolehan suara tersebut agaknya pemerintah terkejut.¹¹ Apalagi, pada Sidang Umum MPR tahun 1993 Guruh telah resmi mencalonkan diri sebagai Presiden RI.¹²

⁸ Dalam pengakuannya kepada *Tempo*, Guruh Soekarno Putra mengatakan bahwa "kalau hambatan-hambatan itu karena kami putra Bung Karno, hal itu sungguh-sungguh naif. Periksa *ibid*.

⁹ "Terjebak Taktis Politik", *Tempo*, 25 Desember 1993, hal. 19; Bandingkan dengan Ahmad Bahar, *op.cit.*, hal., 51.

¹⁰ Arif Zulkifli, *PDI Di Mata Golongan Menengah Indonesia*, Jakarta, Grafiti, 1996, hal. 50.

¹¹ *Ibid*, hal. 80.

¹² "Langkah Mega....", *Forum Keadilan*, *op.cit.*, hal.14;

Fenomena kenaikan suara PDI dan kemunculan bakal calon presiden ini agaknya membuat para petinggi negara gelisah. Mereka mencoba untuk mengantisipasi supaya hal tersebut tidak terulang lagi dalam Pemilu yang akan datang (1997). Apalagi akses Megawati yang pada awal tahun 1994 terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI. Hal itu tentunya harus dipertimbangkan. Selain itu adanya informasi bahwa kelompok-kelompok pendukung Megawati rajin membentuk dan mengkoordinasi sekaligus membina satgas-satgas (satuan tugas) di daerah, yang dikhawatirkan akan menimbulkan tawuran massal dengan massa kontestan lain. Bahkan satu hal yang dikhawatirkan lagi yaitu adanya penggalangan massa secara besar-besaran (*people power*). Oleh karena itu supaya hal itu tidak terjadi, tampaknya sampai pada simpulan bahwa tak ada cara lain *kecuali* "Mega harus digulingkan dari puncak kepemimpinan Ketua Umum DPP PDI dan keluar dari DPR".¹³

B. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Keluarga Soekarno Khususnya Megawati Soekarnoputri

Di bawah ini akan dibahas tentang sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap keluarga Soekarno terutama kepada Megawati Soekarnoputri. Dalam uraian ini sengaja menyertakan pembahasan mengenai PDI karena membahas Megawati tidak bisa lepas satu sama lain dengan pembahasan tentang PDI.

¹³ "Langkah Mega....", *Forum Keadilan*, op.cit., hal. 14.

1. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto dalam Kongres PDI di Medan

Seperti telah diketahui bahwa upaya penyelenggaraan Kongres PDI di Medan itu sesungguhnya sudah muncul sejak awal Mei 1996. Akan tetapi secara formal upaya tersebut baru dimulai ketika 50 orang warga PDI yang menyatakan diri mewakili 19 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mendatangi kantor Departemen Dalam Negeri (Depdagri) pada 3 Juni 1996.¹⁴ Mereka menyatakan bahwa terdapat tuntutan dari DPD dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) supaya dilaksanakan kongres sebagai kelanjutan dari Musyawarah Nasional (Munas) pada tahun 1993. Menurut laporan DPP yang disampaikan ke Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung, PDI di berbagai daerah dan cabang mengaku mendapat tekanan dari Kodim (Komando Distrik Militer), Korem (Komando Resort Militer) dan Kodam (Komando Daerah Militer) setempat agar mereka mendukung dilaksanakannya kongres.¹⁵

Dalam perkembangan selanjutnya untuk menindak lanjuti laporan awal Mei 1996 tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Alex Litaay dan beberapa pengurus DPP PDI yang lain menemui Kassospol (Kepala Staf Sosial Politik) ABRI Letnan Jenderal TNI Syarwan Hamid untuk meminta keterangan perihal kongres. Menurut Syarwan, justru para senior PDI lah yang menghendaki diselenggarakannya kongres, sementara yang dilakukan ABRI di daerah semata merupakan permintaan para senior itu. Anehnya dalam pertemuan itu, Alex Litaay

¹⁴ Arif Zulkifli, *op.cit.*, hal. 210.

¹⁵ Dikutip dari Veven S.P. Wardhana, *Kemelut PDI Di Layar Televisi*, Jakarta, Institut Studi Arus Informasi, 1997, hal. 18.

bahkan disarankan supaya bergabung dengan para senior PDI di bawah Fatimah Achmad. Ia adalah salah seorang fungsionaris DPP PDI yang menginginkan diselenggarakannya kongres.¹⁶

Sementara itu Ketua Umum DPP PDI Megawati Soekarnoputri kemudian mengadakan rapat untuk membahas perihal usulan kongres tersebut. Rapat dilakukan di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta. Dihadiri oleh 26 fungsionaris DPP PDI rapat berjalan alot, karena sementara pihak, yakni 15 fungsionaris, mendukung dilaksanakannya kongres dan sisanya 11 fungsionaris menolaknya. Menurut kesebelas fungsionaris yang menolak kongres, sebagian besar pernyataan tertulis yang dibawa ke Depdagri tidak sah karena tidak ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.¹⁷ Oleh karena tidak ada hasil atau keputusan untuk melangsungkan kongres ataukah tidak, hal ini kemudian membuat Fatimah Achmad menyelenggarakan rapat di sebuah hotel (minus Ketua Umum DPP PDI) untuk sekaligus menentukan panitia kongres.¹⁸

Rencana kongres itu akhirnya menjadi kontroversial.¹⁹ Di satu pihak ada yang mendukung (*pro*) dan di pihak lain ada yang menolak (*kontra*). Di antara mereka yang menyatakan mendukung adalah Soerjadi (mantan Ketua Umum DPP PDI periode 1986-1993), Ketua DPD PDI Jawa Tengah Soemaryo, Ketua dan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Yang penting diperhatikan adalah alasan untuk melaksanakan kongres tidak sepenuhnya masalah yuridis formal, yakni amanat AD-ART partai (organisatoris). Dalam rapat tersebut terungkap bahwa kepemimpinan Megawati dipersoalkan karena tidak sejalan dengan kebijakan politik pemerintah; Mulai dari hubungan Mega dengan kelompok kritis/aktifis sampai upaya pencalonan Megawati sebagai presiden, yang bagi sementara kalangan dinilai terlalu cepat, di samping sampai dibiarkannya Aberson Marley Sihalohe mempersoalkan doktrin dwi fungsi ABRI. Selain itu alasan lain seperti diungkapkan kader PDI pro-kongres, Ismunandar, bahwa PDI dikhawatirkan akan dibawa ke arah *people power*. Dikutip dari Arif Zulkifli, *op.cit.*, hal. 210.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Veven S.P. Wardhana, *op.cit.*, hal. 18.

Sekretaris DPD PDI Sumatra Utara Patowi Bowi dan Buttu R. Hutapea dan Ketua DPD PDI Lampung Refli Thalib. Sementara itu berbagai pihak yang menolak kongres antara lain Mh. Isnaeni, Sabam Sirait, Abdul Madjid, Benmang Reng Say dan Marsoesi.²⁰

Sehubungan dengan kontroversi tersebut di berbagai DPD dan DPC terjadi perpecahan. Mereka ada yang mendukung kongres dan ada pula yang menolak kongres. Di antara yang menolak itu kemudian ada yang melakukan aksi yang dramatis. Tercatat kurang lebih 3000 massa simpatisan PDI di Semarang membubuhkan cap jempol darah pada bentangan kain, setelah sebelumnya mereka berhasil mengambil alih Kantor DPD PDI Jawa Tengah.

Tindakan serupa berlangsung di DPD PDI Sumatra Utara. Akan tetapi langkah itu tidak semudah dengan apa yang telah dilakukan oleh massa PDI di Semarang karena mereka harus berhadapan langsung dengan Panglima Kodam Bukit Barisan dan Kapolda Sumatra Utara. Ketidakpercayaan massa PDI daerah terhadap para pimpinan DPD PDI yang mendukung kongres juga terjadi di Riau. Sehubungan dengan sikap itu, mereka kemudian memecat Ketua dan Sekjen DPD PDI Riau Burdin Islamy dan Edward Aritonang.²¹

Selain itu tindakan serupa juga dilakukan oleh berbagai massa PDI di daerah-daerah. Misalnya di Bali para pengurus DPD PDI menyelenggarakan doa bersama dan menyatakan setia serta mendukung PDI kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Suatu hal yang menarik lagi, bahwa dari PDI daerah yang semula

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hal. 18-19.

setuju dan mendukung kongres, di saat kemudian mereka berbalik dan menyatakan diri berada di belakang barisan Megawati. Tindakan itu salah satunya dilakukan oleh DPD PDI Sumatra Selatan. Menurut keterangannya saat mereka menyetujui kongres itu dikarenakan adanya tekanan dari aparat setempat. Pengakuan adanya tekanan dari aparat juga disampaikan oleh DPD PDI di Jawa Barat.²²

Sementara itu Ketua DPD PDI Jawa Timur Soetjipto yang diangkat DPP PDI Megawati melalui Surat Keputusan No.043/1994 (yang selalu bentrok dengan kubu Latief Pudjosakti, yang didukung pemerintah daerah Jawa Timur/Gubernur Basofi Sudirman selaku pembina politik) sebagai protes atas rencana diselenggarakannya kongres, mereka berniat melakukan *long march* dari Surabaya ke Kantor Depdagri Jakarta.²³ Tujuan dari kegiatan tersebut semata-mata adalah untuk mengingatkan pemerintah agar mau mendengarkan aspirasi dan keinginan rakyatnya yang tidak menghendaki dilaksanakannya kongres.

Sehubungan dengan peristiwa-peristiwa tersebut pemerintah yang seharusnya bersikap netral ternyata tidak sepenuhnya dapat diharapkan. Hal itu tercermin dari dukungan Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memed yang bersedia untuk membuka kongres.²⁴ Dukungan serupa untuk menghadiri kongres juga diungkapkan oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung.²⁵ Sehubungan dengan hal itu, Kassospol ABRI Letnan Jenderal TNI Syarwan Hamid dalam

²² *Ibid*, hal. 19.

²³ Arif Zulkifli, *op.cit.*, hal. 204; Bandingkan dengan Veven S.P. Wardana, *op.cit.*, hal. 18.

²⁴ *Kompas*, 14 Juni dan 20 Juni 1996 dalam *Centre for Strategic and International Studies*, Dokumentasi Kliping Peta Politik Indonesia, tahun VIII, No.12, Juni 1996, hal. 26 dan 46.

²⁵ Lihat *Kompas*, 18 Juni 1996 dalam *ibid*, hal. 37.

berbagai kesempatan menyatakan bakal ikut mengamankan kongres.²⁶ Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Asisten Sosial Politik (Assospol) Kassospol ABRI Mayor Jenderal Soewarno Adiwijoyo dan Kapolri Letnan Jenderal Pol Diby Widodo.²⁷ Sementara Panglima Kodam Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Sedyanto yang antara lain membawahi wilayah Medan tempat rencana kongres dilangsungkan, juga menyatakan siap mengamankan kongres ketika rombongan Fatimah Achmad menemuinya.²⁸

Adanya sikap para aparat pemerintah yang tampak berpihak²⁹ inilah justru kemudian memunculkan protes dan reaksi keras para warga PDI yang menolak diselenggarakannya kongres. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sendiri secara resmi menyatakan keprihatianannya atas terlampau jauhnya intervensi pemerintah atas persoalan yang dihadapi PDI itu. Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman, hal itu antara lain terlihat dari gencarnya pemerintah mengumandangkan argumentasi dari salah satu pihak yang bertikai di PDI.³⁰

Apa pun yang terjadi kongres tersebut akhirnya berlangsung dengan

²⁶ Veven S.P. Wardhana, *op.cit.*

²⁷ *Kompas* 15 Juni 1996 dalam *Centre for Strategic and International Studies*, *op.cit.*, hal. 28.

²⁸ Veven S.P. Wardhana, *op.cit.*

²⁹ Di antara kecurigaan dan asumsi terhadap rekayasa yang dilakukan aparat pemerintah, toh masih tersisa suara-suara aparat yang tergolong netral. Di antara suara-suara netral itu datang dari Menteri Pertahanan Keamanan Jenderal TNI Edy Sudrajat, Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Soesilo Soedarman. Edy Sudrajat mengharapkan agar permasalahan yang terjadi di tubuh PDI secepatnya dapat diselesaikan melalui dialog antar pimpinan PDI, sementara Moerdiono menjanjikan bahwa pemerintah tidak akan memihak kepada salah satu pihak, dan sementara Soesilo Soedarman menyarankan agar kedua pihak yang bertikai mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Lihat *Kompas*, 15 dan 17 Juni 1996 dalam *Centre for Strategic and International Studies*, *op.cit.*, hal. 28 dan 36.

³⁰ *Kompas*, 19 Juni 1996 dalam *ibid*, hal. 39-40.

mulus. Hal ini tampak dari pelaksanaan kongres yang sedemikian rapi dan hampir tanpa hambatan yang berarti. Bahkan rencana kongres yang sedianya dilaksanakan dari tanggal 20 hingga 24 Juni 1996, ternyata berhasil dipersingkat menjadi hanya dua hari. Dengan perkataan lain kongres dapat ditutup dua hari lebih cepat.³¹

Sebagaimana telah disebut-sebut bahwa dalam kongres tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memed dan Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung. Akan tetapi Ketua Umum DPP PDI Megawati Soekarnoputri bersama 11 orang fungsionaris lainnya justru tidak datang. Ketidakhadiran Megawati bersama 11 orang fungsionaris tersebut seperti diakui oleh Ketua Panitia Pelaksana Kongres bahwa mereka memang tidak diundang.³²

Kongres yang berlangsung dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu akhirnya memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum DPP PDI.³³ Keputusan kongres

³¹ Arif Zulkifli, *op.cit.*, hal. 212.

³² *Kompas*, 14 Juni 1996 dalam *Centre for Strategic and International Studies*, *op.cit.*, hal. 26; Sehubungan dengan hal tersebut, *lagelannya* lagi adalah pernyataan Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung yang secara sinis menyatakan Mega tidak datang karena mungkin tahu akan "kalah".

³³ Naiknya mantan Ketua Umum DPP PDI periode 1986-1993 ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Ia adalah ketua yang diangkat oleh pemerintah, ketika Kongres PDI ke III pada tahun 1986 tidak mampu menentukan ketua umum (adalah Mendagri, ketika itu Soepardjo Rustam yang "melahirkan" Soerjadi).

Ketika akhirnya terpilih, Soerjadi kemudian melakukan langkah-langkah politik yang ternyata meningkatkan perolehan suara PDI pada Pemilu 1992. Namun, langkah itu bukan sesuatu yang menyenangkan bagi pemerintah. Dalam Kongres PDI ke IV Medan 1993, keadaan justru berbalik. Kongres Medan tidak lagi memilih Soerjadi karena pemerintah secara jelas menunjukkan sikap tidak mendukung kepemimpinannya.

Fenomena Soerjadi hingga pasca Kongres Medan 1996 menjadi catatan penting dalam sejarah PDI: Seorang pemimpin diangkat, dijatuhkan, dan diangkat lagi. Setidaknya terdapat dua penjelasan untuk fenomena ini. Pertama, fenomena itu menunjukkan kepiawaian seorang politikus memainkan peran politiknya dalam sebuah sistem politik khas Orde Baru. Dukungan dan ancaman kepada kekuasaan dibaca tepat oleh Soerjadi dengan memperhatikan konteks waktu, tempat dan konstelasi politik. Kedua, fenomena ini juga bisa berarti inkonsistensi kebijakan politik pemerintah.

Dukungan dan sikap kontra terhadap aktor politik tertentu dibaca dengan melihat seberapa jauh aktor politik yang bersangkutan memberikan jaminan bagi keberlangsungan stabilitas politik

tersebut dinilai pemerintah sebagai suatu keputusan yang sah. Oleh karena itu pemerintah sudah tidak mengakui lagi DPP PDI di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri berdasarkan hasil Munas di Jakarta akhir Desember 1993 yang lalu.

Pada akhirnya, sikap pemerintah menjadi terjelaskan, terutama setelah Presiden Soeharto akhirnya menerima pengurus baru DPP PDI hasil kongres menghadap di Bina Graha pada tanggal 25 Juli 1996. Pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Ketua Umum DPP PDI hasil kongres yaitu Soerjadi bersama 10 pengurus lainnya tersebut berlangsung selama 1 jam. Sebagai simpulannya bahwa mereka resmi mendapatkan restu.³⁴

3. Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto Menjelang dan Dalam Peristiwa 27 Juli 1996

Kongres Medan yang dilaksanakan tanggal 20-24 Juni 1996 ternyata telah memunculkan reaksi keras (protes) dari para pendukung Megawati. Sebagai wujud protes tersebut pada tanggal 20 Juni 1996 ribuan massa pendukung Megawati bersama-sama dengan tokoh-tokoh pro-demokrasi melakukan *long march* dari kantor DPP PDI Jalan Diponegoro menuju Taman Monumen Nasional (Monas). Aksi damai itu berakhir dengan kekerasan ketika gabungan aparat militer menghentikan pawai tersebut. Dalam peristiwa bentrokan yang dikenal

jangka pendek. Ketika sang aktor politik mampu menjamin stabilitas dan keberlangsungan *status quo*, dukunganpun diberikan. Namun, ketika ia tidak memberikan jaminan itu maka dukungan dengan segera ditarik. Keadaan ini menjadi tampak menarik karena baik ketika Soerjadi gagal dalam Kongres Medan 1993, maupun ia kembali dipilih dalam Kongres Medan 1996 tidak terjadi banyak perubahan dalam konstelasi kekuasaan. Dikutip dari Arif Zulkifli, *op.cit.*, hal. 213-214.

³⁴ Veven S.P. Wardhana, *op.cit.*, hal. 20; Bandingkan dengan *Suara Karya*, 26 Juli 1996 dalam *Centre for Strategic and International Studies*, "Dokumentasi Kliping Peta Politik Indonesia", tahun VIII, No.14, Juli 1996, hal. 63.

sebagai "Insiden Gambir" itu puluhan orang peserta pawai (termasuk aparat keamanan) mengalami luka-luka.³⁵

Sehubungan dengan insiden tersebut, Pangdam Jaya (Jakarta Raya) Mayor Jenderal TNI Soetiyoso menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir lagi para pendukung Megawati yang melakukan aksinya turun ke jalan. Bahkan Soetiyoso kemudian menegaskan bahwa ia mengancam akan menindak tegas massa demonstran PDI yang turun ke jalan.³⁶ Pernyataan Soetiyoso itu dikemukakan di depan para wartawan baik dalam maupun luar negeri tidak jauh dari peristiwa tersebut.

Ancaman Pangdam Jaya Mayor Jenderal Soetiyoso yang akan menindak massa demonstran PDI pro-Megawati, dalam perkembangannya dimanifestasikan dalam bentuk lain. Para pendukung PDI pro-Megawati ternyata mempunyai cara lain untuk menempuh strategi yang berbeda. Mereka kemudian memusatkan aktifitasnya di Kantor DPP PDI dan menggelar "mimbar demokrasi". Kegiatan itu bertujuan, selain dikarenakan mereka mendengar isu akan diambil-alihnya kantor oleh pihak pengurus PDI hasil Kongres Medan, juga untuk mendukung lebih lanjut kelangsungan aktifitas DPP PDI hasil Munas.³⁷

Seperti telah diketahui bahwa mimbar demokrasi merupakan manifestasi dukungan kepada Megawati, dimana setiap orang tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, dan ekonomi diberi kesempatan untuk tampil berpidato di

³⁵ Bentrokan itu membawa akibat lima orang warga PDI terluka parah, 73 luka ringan, 48 ditahan dan 8 unit mobil milik warga PDI hancur. Sementara dari pihak anggota ABRI sendiri dikabarkan 55 orang cedera. Periksa A. Made Tony Supriatma, 1996: *Tahun Kekerasan Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997, hal. 10.

³⁶ Veven S.P. Wardhana, *op.cit.*, hal. 19-20.

³⁷ A. Made Tony Supriatma, *op.cit.*, hal. 10-12.

panggung yang didirikan di halaman Gedung DPP PDI. Tidak hanya anggota DPR-MPR, mahasiswa, aktifis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), aktifis ormas, tapi juga kalangan buruh, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, dan pemuda pengangguran berpidato. Dari mulai dukungan terhadap kepemimpinan Megawati hingga isu-isu di seputar kesenjangan sosial-ekonomi, kolusi MA (Mahkamah Agung), upah buruh yang rendah, "kanker" korupsi dikalangan pejabat, penggusuran, situasi sosial-politik mutakhir dan sebagainya menjadi bahan pidato para peserta.³⁸

Mimbar demokrasi merupakan istilah yang diberikan oleh para pendukung PDI pro-Megawati yang memusatkan aktifitasnya di Gedung DPP PDI. Sementara para pejabat dan aparat pemerintah yang terkena sasaran kritik umumnya mereka menyebut kegiatan itu sebagai "mimbar bebas". Oleh karena itulah maka para pejabat dan aparat pemerintah kemudian mengeluarkan beragam pernyataan yang mengecam pelaksanaan mimbar bebas tersebut. Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung menyatakan bahwa mimbar bebas tersebut sudah mengarah ke tindakan makar, karenanya harus dihentikan.³⁹ Selain itu Kassospol Letnan Jenderal TNI Syarwan Hamid mengumpulkan ormas-ormas *underbow* Golkar untuk menyampaikan pernyataan bersama sehubungan dengan diadakannya mimbar tersebut.⁴⁰ Selanjutnya Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Soetiyoso menghimbau untuk menutup mimbar bebas tersebut.⁴¹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Kompas*, 23 Juli 1996 dalam *Centre Strategic International Studies*, "Dokumentasi Kliping Tentang Peta Politik Indonesia", tahun ke VIII, No.14, Juli 1996, hal. 58.

⁴⁰ Lihat A. Made Tony Supriatma, *op.cit.*, hal. 12.

⁴¹ Veven S.P. Wardhana, *op.cit.*, hal. 20.

Sungguhpun demikian masih ada pejabat yang *notabene* terkenal sangat loyal dengan Pemerintah Orde Baru, yakni Prof. Soehardiman⁴² yang malah membantah pernyataan-pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa tidak mungkin para pendukung Megawati berontak kalau tidak memiliki persenjataan. Memang sejumlah analisa politik menyebutkan, akibat tindakan pemerintah yang secara terang-terangan menjatuhkan Megawati tanpa memperdulikan etika politik, maka dikalangan pejabat yang sedikit banyak tidak menyetujui cara-cara klik kelompok yang merekayasa kongres Medan, berupaya untuk tidak memberi pendapat atau komentar tentang pertikaian di tubuh PDI tersebut.⁴³

Sementara itu, menanggapi berbagai pernyataan ketidaksetujuannya diadakan mimbar bebas tersebut, Ketua Umum DPP PDI hasil Munas 1993 Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa penyelenggaraan mimbar demokrasi tersebut, sama sekali bukan bertujuan untuk makar, melainkan merupakan perwujudan hak-hak rakyat yang telah dirampas untuk menyampaikan aspirasinya.⁴⁴ Lebih lanjut Megawati menambahkan bahwa mimbar demokrasi itu jangan dilihat dari sudut provokasi, tetapi harus dipandang sebagai saluran komunikasi dari rakyat yang merasa terinjak-injak kepribadiannya sehubungan dengan Kongres Medan.⁴⁵ Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menghentikan atau membubarkan mimbar tersebut.

⁴² Prof. Soehardiman adalah Jenderal Purnawirawan dan Ketua Serikat Organisasi Karya Seluruh Indonesia (SOKSI). Lihat A. Made Tony Supriatma, *op.cit.*, hal. 11

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Suara Pembaharuan*, 23 Juli 1996 dalam *Centre for Strategic and International Studies*, "Kliping No.14, Juli 1996.....", *op.cit.*, hal. 59-60.

⁴⁵ A. Made Tony Supriatma, *op.cit.*, hal. 11-12.



Sebagaimana telah dimengerti bahwa tuduhan Pangab Jenderal Feisal Tanjung, tampaknya didasarkan pada kenyataan bahwa dukungan terhadap Megawati dari hari ke hari semakin bertambah besar dan masa yang hadir di acara mimbar bebas dan aksi-aksi lainnya sudah semakin terbentuk secara "ideologis". Awal Juli 1996 misalnya, ribuan mahasiswa dan simpatisan warga PDI menggelar aksi seribu bunga. Aksi damai ini berlangsung tertib dengan membagi-bagikan bunga kepada polisi, tentara, dan masyarakat di sekitar tempat aksi.⁴⁶

Sehubungan dengan mimbar bebas tersebut, sejumlah pengamat sejarah dan politik mengemukakan bahwa mimbar tersebut merupakan fenomena yang unik dalam sejarah politik Pemerintahan Orde Baru. Menurut pendapat mereka selama lebih dari 20 tahun Pemerintahan Orde Baru telah terjadi *mistifikasi* arti tentang partisipasi rakyat. Manifestasi kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat tampaknya identik dengan "kebulatan tekad", "doa politik", "kelompencapir", "safari ramadhan" dan ritual-ritual sejenisnya. Tiba-tiba saja kasus PDI memunculkan kembali watak partisipasi rakyat seperti di zaman pergerakan nasional, yaitu rapat umum (*openbare vergadering*). Mimbar bebas tersebut kemudian diikuti oleh segala lapisan sosial yang terbentuk secara ideologis.⁴⁷

Oleh karena demikian kuatnya ikatan ideologis dan perasaan senasib sepenanggungan, maka dapat dimengerti jika para satgas PDI yang bertugas merasa wajib untuk mengikrarkan diri untuk mempertahankan Kantor DPP PDI

⁴⁶ *Ibid*, hal. 12.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 17.

apapun resiko yang akan mereka hadapi. "Kami bersumpah darah untuk mempertahankan Markas dan tidak akan menuntut kepada ibu Mega seandainya ada anggota kami yang tewas", demikian tulis seorang Satgas DPP PDI yang menorehkan tanda tangan darahnya di kain putih di Gedung DPP PDI.⁴⁸ Pernyataan sikap satgas PDI tersebut dapat dipahami, mengingat berbagai pernyataan pejabat dan kubu Soerjadi di berbagai media massa, mengisyaratkan akan adanya "pengambilalihan gedung" dari kubu Megawati.⁴⁹

Pada hari Sabtu, pukul 06.00 WIB, tanggal 27 Juli 1996, terjadilah perebutan/pengambilalihan kantor DPP PDI yang dilakukan oleh massa pendukung pro-kongres Medan yang dipimpin oleh Sekjen PDI Buttu R. Hutapea.⁵⁰ Mula-mula datang beberapa bus yang sarat penumpang beratribut kepala banteng berhenti di sekitar gedung bioskop Megaria tak jauh dari lokasi Kantor DPP PDI.⁵¹ Selain itu, sebanyak tujuh truk yang sarat penumpang pula dan beratribut sama berhenti di depan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta. Para penumpang yang berkaos merah bertulis "pro-Kongres Medan", bersenjata batu, pentungan, dan benda-benda tajam lainnya segera melakukan agitasi terhadap para aktifis dan satgas DPP PDI pro-Megawati yang tengah

⁴⁸ *Ibid*, hal. 17-18.

⁴⁹ Mengenai rencana pengambilalihan Kantor DPP-PDI periksa *Kompas*, 26 Juni 1996 dalam *Center for Strategic and International Studies*, "Kliping, No.13, Juli 1996.....", hal. 36.

⁵⁰ Menurut staf pengajar Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Cornelis Lay yang diminta Megawati untuk melakukan investigasi terhadap kasus 27 Juli, operasi penyerbuan itu sebenarnya direncanakan berlangsung 21 Juli 1996. Akan tetapi karena bocor ke telinga Megawati operasi tersebut dibatalkan dan ternyata muncul seminggu kemudian. Dikutip dari "Tragedi 27 Juli 1996 Mega, Sutiyoso, dan Arus Bawah PDI-P", *Kompas*, 27 Juli 2002, hal. 8; Mengenai rencana penyerbuan Kantor DPP-PDI, bandingkan dengan Rosihan Anwar, "*Petite Histoire 27 Juli 1996*", *Kompas*, 27 Juli 2002, hal. 3.

⁵¹ A. Made Tony Supriatma, *op.cit.*, hal. 18.

berada di halaman gedung. Selanjutnya mereka melempar batu dan benda-benda lainnya ke arah aktifis dan satgas PDI pro-Megawati.⁵²

Kurang lebih lima belas menit kemudian, sekitar 500 personil pasukan antihuru-hara dengan peralatan lengkap tiba di Markas DPP PDI. Sepuluh menit kemudian, tiba ratusan tentara, dibantu dua panser yang menempatkan diri di bawah jembatan layang dan di belakang kantor (pos) polisi Megaria. Selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB, Kapolres Jakarta Pusat Letnan Kolonel Abubakar Nataprawira menghentikan perang batu dan bernegosiasi dengan para aktifis dan Satgas PDI pro-Megawati. Akan tetapi perundingan tersebut akhirnya gagal mencapai kata sepakat, dan dua ambulans yang dipersiapkan untuk membawa mereka yang luka-luka, ditolak oleh para aktifis dan Satgas PDI pro-Megawati.⁵³

Selanjutnya serangan kedua dilakukan oleh para pasukan merah pro-Kongres Medan yang dimulai pukul 08.15 WIB. Pada kali ini hujan batu lebih gencar daripada yang pertama tadi. Pasukan antihuru-hara mulai merapat ke pagar halaman, di belakang pasukan merah pro-Kongres Medan yang dikomando Komandan Kodim (Dandim) Jakarta Pusat Letnan Kolonel Jul Efendi.⁵⁴ Sementara itu pasukan antihuru-hara terus mensuplai batu. Akhirnya pagar bagian Timur dijebol oleh puluhan pasukan antihuru-hara, yang disusul kemudian masuknya pasukan merah pro-Kongres Medan. Sebagian dari para penyerbu yang berada di halaman membakar spanduk dan ban-ban, sementara sebagian lagi

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

masuk ke dalam gedung dimana sebagian dari puluhan aktifis dan Satgas PDI pro-Megawati bertahan.⁵⁵

Kantor DPP PDI yang sebelumnya dikuasai oleh para pendukung PDI pro-Megawati tersebut akhirnya berhasil diambil alih dan dikuasai oleh para pendukung PDI pro-Kongres Medan. Akan tetapi pengambilalihan kantor itu kemudian menyulut kerusuhan massal di berbagai jalan protokol di seputar Jakarta Pusat yang kurang lebih berlangsung selama dua hari.⁵⁶ Kerusuhan ini telah mengakibatkan banyak kerugian, tidak hanya secara material tetapi juga jatuhnya korban luka-luka dan tewas. Sebuah penyelidikan oleh Komnas HAM Indonesia menyatakan lima orang tewas dan 149 orang luka-luka, tetapi 74 orang masih belum ditemukan. Mereka yang hilang itu sebagian besar dari kalangan sekitar 200 orang yang ditangkap ABRI pada hari pertama kerusuhan itu (27 Juli).⁵⁷

Sampai disini pembahasan mengenai sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Keluarga Soekarno. Selanjutnya dalam bab VI (terakhir) akan dibahas tentang simpulan.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Dikutip dari M.C. Ricklefs, *A. History of Modern Indonesia since C.1200* (Third Edition, 2001) dalam Rosihan Anwar "*Petite Histoire.....*", *Kompas*, op.cit., hal. 18.

⁵⁷ Lihat A. Made Tony Supriatma, *op.cit.*, hal. 31; Bandingkan dengan Rosihan Anwar "*Petite Histoire.....*", *Kompas*, op.cit

⁵⁸ Mengenai istilah ini lebih jelasnya periksa Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Bentang Budaya, 1995, hal. 104; Periksa pula G. Moedjanto, "Dari Kesimpulan ke Simpulan", *Kedaulatan Rakyat*, 28 Oktober 2000, hal. 8.

BAB VI

SIMPULAN

Munculnya Pemerintahan Soeharto (Orde Baru) digambarkan sebagai kemenangan generasi baru melawan kepemimpinan Soekarno (Orde Lama) yang penuh penyimpangan dan penyelewengan. Sikap dan kebijakan politik yang penting dalam Pemerintahan Orde Baru adalah mengambil kegagalan dan keburukan pemerintahan lama sebagai sarana untuk mengidentifikasi pemerintahannya, terutama dalam penulisan sejarah. Sejalan dengan hal tersebut Soekarno dan pemerintahannya ditampilkan secara buruk serta penuh dengan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, sebaliknya Soeharto dan pemerintahannya ditampilkan dengan baik, sebagai masa yang mengutamakan pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Penggambaran semacam itu digunakan untuk menekankan keabsahan (legitimasi) pemerintahan Soeharto dengan mencitrakan Pemerintahan Orde Baru lebih baik dengan dibanding dengan Pemerintahan Orde Lama sekaligus dengan harapan bahwa Soeharto sebagai Presiden kedua tidak kalah dengan Presiden pertama. Pengalaman politik pada masa lalu dimanfaatkan oleh Pemerintahan Orde Baru untuk merumuskan strategi politik dan pada saat yang bersamaan melakukan konsolidasi kekuasaan, memapankan legitimasi untuk melanggengkan kekuasaannya. Dari uraian dalam bab II, III, IV, dan V dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan dan pemikiran politik Soekarno pada intinya merupakan manifestasi dari perjuangannya yang ditempuh pada saat itu. Soekarno berusaha memimpin

dari suatu titik tolak baru dalam perlawanan rakyat Indonesia melawan kekuasaan pemerintah kolonial. Ia melihat fenomena gerakan kemerdekaan yang terpecah-pecah yang terjadi di Indonesia. Hal ini tercermin dari adanya bentrokan antara Sarekat Islam (SI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain itu adanya gerakan-gerakan kemerdekaan yang terdiri atas kelompok-kelompok yang lebih kecil yang mendasarkan diri pada kesatuan suku maupun keagamaan. Soekarno menyesalkan perpecahan itu. Ia melihat keharusan untuk bangun dan mulai merintis jalan ke arah pembentukan suatu organisasi massa yang mencakup keseluruhannya sebagaimana untuk mengembangkan kekuatan dan membendung kekuasaan rezim kolonial. Oleh karena itu naluri politik membawa Soekarno kepada keyakinan bahwa ia dapat menjembatani perpecahan-perpecahan yang ada melalui anjuran persatuan antara Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Dalam menemukan ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat yang sejahtera secara merata, Soekarno mengemukakan pemikiran mengenai konsep Marhaenisme. Marhaenisme adalah lambang dari penemuan kembali kepribadian nasional yang mencerminkan sifat dari masyarakat Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang membahas persoalan mengenai Dasar Negara Indonesia Merdeka, Soekarno mengemukakan untuk pertama kali konsepsi tentang dasar filsafat negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hakekatnya pandangan dan pemikiran politik Soekarno merupakan argumentasi yang khas sebagaimana yang telah dikemukakan pada

saat-saat sebelumnya, ia merupakan ikhtisar dari gagasan-gagasan politik yang telah dikembangkan sejak tahun 1926. Setelah Indonesia merdeka, Soekarno yang kemudian menjadi Presiden tetap menjadi tokoh sentral yang mendominasi kepolitikan Indonesia terutama diakhir tahun 1950-an sampai dengan pertengahan tahun 1960-an. Adanya krisis yang terjadi diakhir tahun 1950-an, mendorong Soekarno untuk melakukan langkah baru yang oleh Soekarno dinamakan "Demokrasi Terpimpin". Soekarno menawarkan sesuatu untuk diyakini kepada bangsa Indonesia, sesuatu yang diharapkan banyak orang akan memberi mereka dan negara mereka martabat serta kebanggaan. Dalam pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin itulah Soekarno banyak menyampaikan pandangan dan pemikiran politiknya yang tertuang dalam pidato-pidato amanatnya. Tema-tema pidato yang disampaikan oleh Soekarno adalah tentang "Menuju Revolusi Nasional". Soekarno menginginkan suatu Indonesia yang besar dan megah yang tercermin dari gelombang revolusinya. Sementara itu untuk mengatasi konflik dan perpecahan serta menjalin persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia Soekarno mengemukakan gagasan tentang persatuan antara Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom). Gagasan tersebut merupakan kebangkitan kembali dari tulisan lamanya tentang Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang ditulis tahun 1926.

2. Pandangan dan Pikiran Politik Soeharto pada hakekatnya merupakan visi dan misi yang menjangkau masa depan bangsa, yang intinya mengandung pengertian supaya belajar dari sejarah kegagalan dimasa lalu. Soeharto menghimbau dan berharap kepada bangsa Indonesia, sebagai generasi penerus

agar seluruh cita-cita aspirasi dan gagasan dasar tentang masyarakat Indonesia yang telah dikembalikan (sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945) sejak lahirnya pemerintahan Soeharto terus dijaga dipertahankan dan dikembangkan secara berkesinambungan. Dalam rangka melaksanakan Demokrasi Pancasila, Pemerintahan Soeharto berusaha mengoreksi penyelewengan dan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan tekad itulah maka tema perjuangan pokok Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Perjuangan Orde Baru diberi landasan yang kuat baik secara ideologis maupun konstitusional. Sebagai landasan ideologi adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Dalam perkembangannya untuk menghayati dan menjabarkan Pancasila supaya dapat dimengerti dan diamalkan, Soeharto mengemukakan pandangan dan pikirannya mengenai falsafah negara yaitu Pancasila. Pidato-pidato yang disampaikan Soeharto pada intinya merupakan pengejawantahan pandangan dan pikirannya terhadap Pancasila yang telah lama tertanam dalam hati bangsa Indonesia, yang pengungkapannya kali ini lebih pada suatu konsep ideologi nasional. Seperti telah disebut di muka bahwa Pemerintahan Soeharto untuk melaksanakan koreksi dan kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas, terutama bagi partai-partai politik yang ada. Bertolak dari konsekuensi inilah partai-partai politik disederhanakan jumlahnya. Dengan Pancasila sebagai satu-

satunya azas maka partai-partai politik tinggal melaksanakan program-programnya demi tercapainya tujuan yang dikehendaki.

3. Sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno secara nyata dipandang sebagai suatu hal yang tidak mudah untuk dimengerti dan dipahami. Di satu pihak Pemerintahan Soeharto menunjukkan sikap menghargai dan menjunjung tinggi Soekarno sebagai seorang yang telah mengorbankan diri dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan. Soekarno mempunyai jasa besar dalam menyatukan dan mengantarkan bangsa Indonesia menuju terwujudnya kemerdekaan. Sikap menghargai dan menjunjung tinggi jasa-jasa Soekarno tersebut oleh Pemerintahan Soeharto diwujudkan misalnya dalam bentuk pidato kenegaraan pejabat presiden sebagai Penjelasan Pelaksanaan Pengamanaan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967, dikeluarkannya Keputusan Presiden No.44/1970 tentang penetapan penyelenggaraan upacara pemakaman kenegaraan sebagai penghormatan negara kepada almarhum Dr. Ir. Soekarno sebagai Proklamator Kemerdekaan mendirikan Monumen Proklamator Soekarno-Hatta, pemberian gelar Pahlawan Proklamator (bersama Bung Hatta) dan lain sebagainya. Di pihak lain sebaliknya, Pemerintahan Soeharto memperlakukan Soekarno dengan tidak semestinya. Perlakuan itu tercermin misalnya dalam bentuk tindakan terhadap Soekarno yang sudah tidak berkuasa dikenakan "karantina politik". Adalah merupakan suatu hal yang ironis dan aneh apabila seorang Proklamator Kemerdekaan harus mengalami nasib sebagai tahanan dalam negara yang ia telah bangun dan perjuangkan. Suatu hal yang lebih menyedihkan lagi bahwa dalam tahanan tersebut

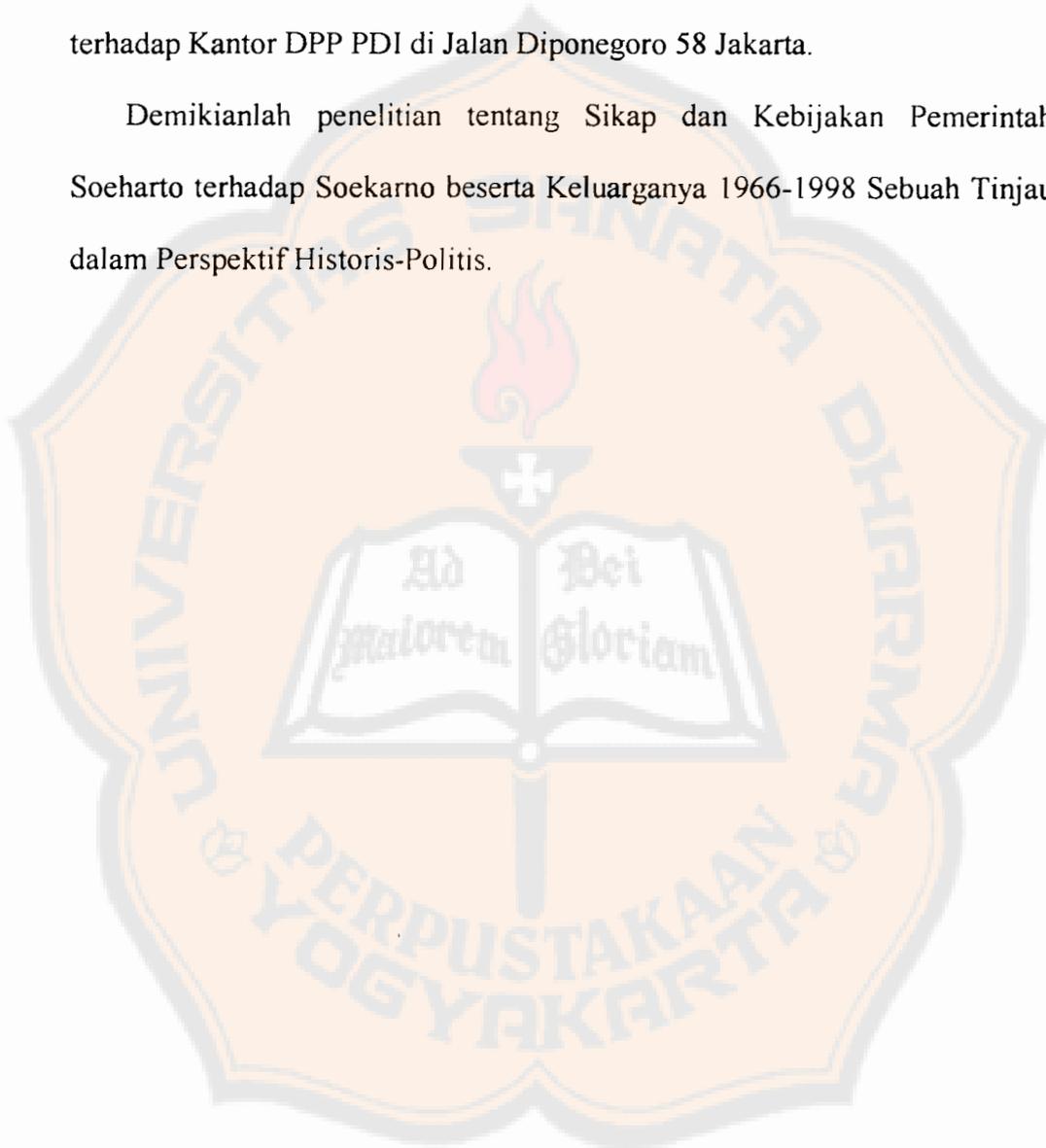
Soekarno berada dalam status pemeriksaan Kopkamtib. Sementara itu dalam penulisan sejarah, Pemerintahan Soeharto mereduksi peran Soekarno, dan sebaliknya Soeharto dibesar-besarkan peranannya. Bahkan Soekarno dan pemerintahannya (Demokrasi Terpimpin) ditampilkan secara buruk dan penuh penyimpangan terhadap UUD 1945, sedangkan Soeharto dan pemerintahannya digambarkan secara baik sebagai era yang mengutamakan Pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto dalam penulisan sejarah tersebut sampai-sampai Dasar Negara Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno dalam pidatonya di depan Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 harus diperlakukan sebagai bukan hasil pemikirannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sikap dan kebijakan Pemerintah Soeharto terhadap Soekarno adalah mendua. Hal ini kiranya bisa dipahami mengingat Pemerintahan Soeharto ingin menciptakan landasan pembenaran dan legitimasi atas praktek politik yang dijalankan. Di satu sisi Pemerintahan Soeharto menghargai dan menjunjung tinggi jasa-jasa Soekarno. Sedangkan di sisi lain pengalaman politik dimasa lalu digunakan oleh Pemerintahan Soeharto untuk merumuskan strategi dan pada saat yang bersamaan mengkonsolidasikan kekuasaan untuk memapankan dan memantapkan legitimasinya.

4. Sikap dan kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap keluarga Soekarno dalam hal ini ditinjau dari aspek politiknya merupakan suatu hal menarik untuk disimak. Sejak awal keluarga Soekarno (anak-anak Soekarno) banyak mendapat pembatasan-pembatasan dalam melakukan kegiatan terutama dalam

hal politik praktis. Salah satu contoh pembatasan itu adalah larangan terhadap Guntur Soekarnoputra untuk mengikuti kampanye PNI dalam Pemilu 1971. Sehubungan dengan pembatasan itu, sampai-sampai telah dicapai suatu kesepakatan dalam keluarga besar Soekarno untuk tidak terjun dalam kancah politik. Sungguhpun demikian pemerintah ternyata juga melakukan pembatasan terhadap anak-anak Soekarno untuk melakukan kegiatan non-politik. Hal ini terbukti dari tidak diizinkan Rachmawati Soekarnoputri untuk mendirikan Universitas Bung Karno. Bahkan Guruh Soekarnoputra yang akan mementaskan karya seninya (*Swaramahardhika*) pun dilarang oleh pemerintah. Sementara itu seiring dengan perkembangan politik di tanah air Megawati diperbolehkan tampil ke atas panggung politik. Tampilnya Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI ternyata juga mendapat tekanan, dan berbagai usaha dilakukan untuk menjatuhkan popularitasnya. Mula-mula banyak pihak mencoba menjegal Megawati dengan alasan akan dapat membangkitkan kembali Soekarnoisisme. Oleh karena hal itu tidak terbukti maka ditempuh cara lain untuk menjatuhkan Megawati. Setelah sekian kali upaya penggulingan Megawati tidak berhasil, tampaknya dalam Kongres PDI di Medan yang berlangsung tanggal 20-22 Juni 1996, Megawati secara resmi digusur dari kursi kepemimpinan DPP PDI. Posisi itu akhirnya diduduki oleh Soerjadi yang mendapat "restu" dari pemerintah, melalui forum kongres yang oleh banyak pihak dinilai "dipaksakan" itu. Kongres yang dilaksanakan selama dua hari berlangsung mulus dan aman (bahkan lebih cepat dari yang telah direncanakan). Tidak terdengar protes, kerusuhan, ataupun *deadlock* seperti

layaknya Kongres PDI pada masa-masa sebelumnya. Hal ini dapat dipahami mengingat kongres tersebut mendapat dukungan pemerintah dan mendapat jaminan keamanan dari ABRI. Akhirnya dukungan itu dilanjutkan dalam sebuah "penyerbuan berencana" yang dilancarkan pada tanggal 27 Juli 1996 terhadap Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta.

Demikianlah penelitian tentang Sikap dan Kebijakan Pemerintahan Soeharto terhadap Soekarno beserta Keluarganya 1966-1998 Sebuah Tinjauan dalam Perspektif Historis-Politis.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Surjomihardjo,
1985: *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*, Diterbitkan dengan kerja sama Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS) dan LIKNAS-LIPI serta PT Gramedia, Jakarta.
- Abdul Gafur,
1987: *Pak Harto Pandangan dan Harapannya*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Adams, Cindy,
1966: *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Bahar,
1996: *Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993-1996*, Pena Cendekia, Yogyakarta.
- Badudu, J.S dan Sutan Muhammad Zain,
1994: *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Berkhofer, Robert F., Jr.,
1969: *A Behavioral Approach to Historical Analysis*, The Free Press, New York.
- Bernhard Dahm,
1987: *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (Terj), Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
- Budiardjo, Miriam,
1993: *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Chambert-Loir, Henry dan Hassan Muarif Ambari (Ed),
1999: *Panggung Sejarah, Persembahkan Kepada Prof. Dr. Danys Lombard*, Ecole Francaise, d' Extreme-Orient Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Diah B.M.,
1987: *Meluruskan Sejarah*, Pustaka Merdeka, Jakarta.
- Echols, John M., dan Hassan Shadilly,
1996: *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Eriyanto,
2000: *Kekuasaan Otoriter Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni Studi atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*, Pustaka Pelajar-Insist, Yogyakarta.
- Ernest Renan,
1968: *Apakah Bangsa Itu?* (Terj), Erlangga, Jakarta.
- Feith, Herbert,
1962: *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca.
- Gani, Soelistyati Ismail,
1984: *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Goetschalk, Louis,
1975: *Mengerti Sejarah Pengantar Ilmu Sejarah* (Terj), Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hardi,
1983: *Api Nasionalisme Percikan Pengalaman*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Joeniarto,
1996: *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono (dkk).
1977: *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Edisi ke-2), Balai Pustaka, Jakarta.
-
- _____,
1992: *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kuntowijoyo,
1995: *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Legge, John D.,
1985: *Soekarno Sebuah Biografi Politik* (Terj), Sinar Harapan, Jakarta.
- Lev, Daniel S.,
1966: *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*, Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, Ithaca.
- Made Tony Supriatma A.,
1997: *1996: Tahun Kekerasan Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Madjelis Permusjawaratan Rakjat Republik Indonesia,
1967: *Sidang Istimewa MPRS pada tahun 1967*, Penerbitan MPRS No.6,
Jakarta.
- Manai Sophiaan,
1994: *Kehormatan Bagi Yang Berhak*, Yayasan Mencerdaskan Kehidupan
Bangsa, Jakarta.
- Mangil Martowidjojo,
1999: *Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967*, Grasindo, Jakarta.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto,
1984: *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Edisi ke-4), Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta.
- Moedjanto G.,
1998: *Indonesia Abad 20 Jilid I*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____,
1993: *Indonesia Abad 20 Jilid II*, Kanisius, Yogyakarta.
- Nasution H.A. Haris,
1975: *Dari Kup 1 Oktober 1965 ke Sidang Istimewa MPRS 1967*, Tanpa
Penerbit, Jakarta.
- Nazaruddin Sjamsuddin,
1984: *PNI dan Kepolitikannya*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Nugroho Notosusanto,
1981: *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, PN Balai Pustaka,
Jakarta.
- _____(Ed),
1985: *Tercapainya Konsensus Nasional*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Oedijo (dkk),
1965: *Doktrin Revolusi Indonesia*, Persahabatan Press, Surabaya.
- Ramlan Surbakti,
1992: *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ricklefs M.C.,
1995: *Sejarah Indonesia Modern* (Terj), Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Roeder O.G.,
1969: *Soeharto Dari Pradjurit Sampai Presiden*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia,
1986: *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973*, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta.
- _____,
1994: *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang Aksi, dan Pemumpasannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeharto, G. Dwipayana, dan Ramadhan K.H.,
1989: *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (Otobiografi)*, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta.
- Soekarno,
1951: *Indonesia Menggugat Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial*, SK Seno, Jakarta.
- _____,
1964: *Dibawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta.
- _____,
1984: *Pancasila Dasar Negara*, Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, Jakarta.
- Sudirjo, Radik Utoyo (dkk),
1979: *Fajar Orde Baru Lahirnya Orde Baru*, Yayasan Kesejahteraan Jayakarta-Kodam V Jaya Badan Penerbit Almanak RLBP Alda, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis,
1992: *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-Butir Pemikiran Kritis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suwarno, P.J.,
2001: *Sejarah dan Kekuasaan Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Team Dokumentasi Presiden Republik Indonesia,
1991: *Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965-27 Maret 1968*, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Team Dokumentasi Presiden Republik Indonesia,

1991: *Jejak langkah Pak Harto 18 Maret 1968-27 Maret 1973*, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta.

1991: *Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1973-23 Maret 1978*, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta.

Veven Wardhana S.P,

1997: *Kemelut PDI di Layar Televisi*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta.

Yayasan Idayu,

1981: *Sekitar Tanggal dan Penggalinya Guntingan Pers dan Bibliografi tentang Pancasila* (Edisi kedua), Yayasan Idayu, Jakarta.

Yayasan Pembela Tanah Air,

1995: *Sejarah Lahirnya Pancasila*, Yayasan Pembela Tanah Air Pusat, Jakarta.

2. Dokumentasi, Koran, dan Majalah

Asvi Warman Adam, "Berbagai Kisah G30S", *Kompas*, 30 September 2002.

"Apa dibalik Mega", *Tempo*, 11 Desember 1993.

Baskara Wardaya. "Bung Karno dan Kaum Muda", *Bernas*, 6 Juni 2002.

Centre for Strategic and International Studies, "Dokumentasi Kliping tentang Peta Politik Indonesia", Tahun VIII, No.12, Juni 1996.

_____, "Dokumentasi Kliping tentang Peta Politik Indonesia", Tahun VIII, No.13, Juni 1996.

_____, "Dokumentasi Kliping tentang Peta Politik Indonesia", Tahun VIII, No.14, Juni 1996.

"In Memoriam Mahar Mardjono, Simbol Moral Hadapi Kekuasaan", *Kompas*, 20 September 2002.

"Langkah Mega dan Harapan Keluarga Bung Karno", *Forum Keadilan*, Nomor 7, Tahun V, 5 Juli 1996.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Maulwi Saclan, "Pengabdian Majemuk Seorang Pejuang Revolusioner", *Kompas*, 4 Juni 2002.

"Mega dan Berbagai Tanda", *Tempo*, 25 Desember 1993.

"Megawati Harus Nyatakan Sikap Soal Masa Lalu", *Kompas*, 1 November 2002.

"Mereka Ahli Waris Nama Besar", *Tempo*, 18 Desember 1993.

Moedjanto G., "Dwi Tunggal Soekarno-Hatta", *Kompas*, 9 Agustus 2002.

_____, "Dari Kesimpulan ke Simpulan", *Kedaulatan Rakyat*, 28 Oktober 2000.

_____, "Antara Hari Kelahiran Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila", *Kompas*, 30 September 2002.

Susanto Zuhdi, "Mengenang Tragedi Nasional Tiga Puluh Tujuh Tahun Lalu", *Kompas*, 30 September 2002.

Rosihan Anwar, "*Petite Histoire* 27 Juli 1996", *Kompas*, 27 Juli 2002.

"Sejarah Senayan Dari Gelora Bung Karno Kembali ke Gelora Bung Karno", *Bola*, Selasa 19 Februari 2002.

"Seratus Tahun Mohammad Hatta", *Kompas*, 9 Agustus 2002.

"Tragedi 27 Juli 1996 Mega, Sutiyoso, dan Arus Bawah", *Kompas*, 9 Agustus 2002.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

GLOSSARY

1. *Algemeene Studie Club* :

Kelompok Studi Umum

2. *Chauvinisme* :

Wawasan kebangsaan sempit

3. *de facto* :

Berdasarkan fakta/kenyataan

4. *de jure* :

Berdasarkan hukum yang berlaku

5. *Dokuritsu Junbi Cosakai* :

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

6. *Epilog* :

Bagian akhir dalam pidato yang berupa uraian singkat

7. Karantina Politik :

Penahanan politik dengan cara diisolasi

8. Komintern :

Komunisme Internasional

9. Legitimasi :

Pengabsahan

10. *Long March* :

Menempuh perjalanan jauh dengan jalan kaki

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

11. *Nastelgi* :

Panas Kenthel Legi (Panas Kental Manis)

12. NIP (*Nationaal Indische Partij*) :

Partai Nasional India

13. Pra :

Sebelum/yang lebih dulu

14. Pasca :

Setelah/sesudah

15. *Retooling* :

Pengaturan kembali

16. *Resuffle* :

Menyempurnakan

17. Revolusi Politik :

Perubahan di bidang politik/ketatanegaraan yang dilakukan secara cepat dan mendasar

18. *Sinkretisme* :

Paham yang dihasilkan oleh perpaduan atau pemaduan dua aliran atau agama; tujuannya agar memperoleh keserasian, keseimbangan atau kesesuaian

19. *Soko Guru* :

Tiang besar yang terletak di tengah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

20. THS (*Technische Hoogeschool*):

Sekolah Tinggi Teknik pada jaman kolonial (sekarang Institut Teknologi Bandung/ITB)

